

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PERAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN
(IMP) DALAM PROGRAM KEPENDUDKAN KELUARGA
BERENCANA (KKB) DI KABUPATEN KLATEN**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh Gelar Magister Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

MUHAMMAD YUNIARSO

NIM. 500833558

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2017

ABSTRAK

**PERAN KADER
INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP) DALAM
PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA (KKB)
DI KABUPATEN KLATEN**

Muhammad Yuniarso
yuniarsos2@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Indikator keberhasilan program KKB di kabupaten Klaten dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan stagnasi bahkan penurunan , antara lain terlihat dari tingkat pemakaian kontrasepsi/*Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) dan *Total Fertility Rate* (TFR). Kondisi tersebut salah satunya disebabkan oleh kader IMP yang belum dapat menjalankan perannya secara optimal. Penelitian Peran IMP dalam Program KKB di Kabupaten Klaten ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran kader IMP serta kendala yang dihadapi dalam mengelola program KKB di kabupaten Klaten sesuai dengan perannya. Fokus dalam penelitian adalah peran kader IMP dalam program KKB dengan mengambil lokasi di kecamatan Kemalang dan Klaten Utara. Desain penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan informan yang terdiri kader IMP, kepala seksi Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan DissosP3AKB kabupaten Klaten, penyuluh KB, dan warga masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ditinjau dari 3 (tiga) aspek yang terdiri dari norma-norma, kemampuan, dan kepentingan maka peran pertemuan, KIE dan konseling, pelayanan kegiatan, dan kemandirian sudah dapat dilakukan kader IMP meskipun belum optimal. Peran pengorganisasian hanya dilakukan oleh kader PPKBD yaitu sebagai koordinator kader di bawahnya. Peran pendataan pemetaan dan pencatatan dapat dilakukan oleh kader IMP namun belum ditindaklanjuti dengan pemanfaatan hasilnya, demikian juga dalam hal pencatatan dan pelaporan secara baku. Beberapa kendala yang dihadapi oleh para kader IMP bermuara pada kekurangan dalam hal : jumlah penyuluh KB, alokasi anggaran program KKB dari pemerintah, kemitraan dengan program pemberdayaan masyarakat, jumlah kader kelompok kegiatan (poktan), serta kualifikasi dan kompetensi kader IMP sehingga perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan untuk mengatasinya.

Kata Kunci : peran kader, kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), program Kependudukan Keluarga Berencana (KKB).

ABSTRACT**THE ROLE OF THE CADRE
OF RURAL COMMUNITY INSTITUTION (IMP) IN
PROGRAM OF POPULATION FAMILY PLANNING (KKB)
IN DISTRICT OF KLATEN**

Muhammad Yuniarso
yuniarsos2@gmail.com

Graduate Program
Universitas Terbuka

Indicators of success in the KKB program in Klaten district in recent years have shown stagnation and even decrease, among others, from the contraceptive prevalence rate (CPR) and Total Fertility Rate (TFR). The condition is one of them caused by IMP cadres who have not been able to perform its role optimally. Research The role of IMP cadres in the KKB program in Klaten district aims to describe and analyze the role of IMP cadres and constraints faced in managing the KKB program in Klaten district in accordance with its role. The focus in this research is the role of IMP cadres in the KKB program by taking locations in Kemalang and Klaten Utara subdistricts. Research design using qualitative approach with informants consisting of IMP cadres, head of Population Control Counseling and Mobilization section of DissosP3AKB Klaten district, family planning extension workers, and community members. The results of this study indicate that in terms of 3 (three) aspects consisting of norms, abilities, and interests, the role of meetings, KIE and counseling, service activities, and independence can be done IMP cadres though not optimal. The role of organizing is only done by the cadre PPKBD that is as the cadre coordinator below. The role of mapping and record keeping can be done by the IMP cadres but has not been followed up with the utilization of the results, as well as in terms of recording and reporting by default. Some of the obstacles faced by IMP cadres lead to shortages in terms of: the number of extension workers, the budget allocation of KKB programs from the government, partnerships with community empowerment programs, the number of cadres of activity groups (poktan), and the qualifications and competence of IMP cadres so it is necessary to follow up with the policy to solve it.

Keywords : role of the cadre, cadre of Rural Community Institution (IMP), program of Population Family Planning (KKB).

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Peran Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
dalam Program Kependudukan Keluarga Berencana
di Kabupaten Klaten

Penyusun TAPM : Muhammad Yuniarso

NIM : 500833558

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Menyetujui :

Pembimbing I,



Dr. Sri Suwartiningsih
NIDN. 0616056701

Pembimbing II,



Dr. Liestiyodono Bawono, M.Si
NIP. 19581215 198601 1 009

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Administrasi Publik
Program Magister Administrasi Publik



Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 19591027 198603 1 003

Direktur
Program Pascasarjana



Dr. Liestiyodono Bawono, M.Si
NIP. 19581215 198601 1 009

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Yuniarso
 NIM : 500833558
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Judul TAPM : Peran Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam Program Kependudukan Keluarga Berencana (KKB) di Kabupaten Klaten

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari / Tanggal : Sabtu, 25 Nopember 2017
 Waktu : Pukul 11.00 WIB

dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Nama : Dr. Suparti, M.Pd.

Penguji Ahli

Nama : Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si.

Pembimbing I

Nama : Dr. Sri Suwartiningsih

Pembimbing II

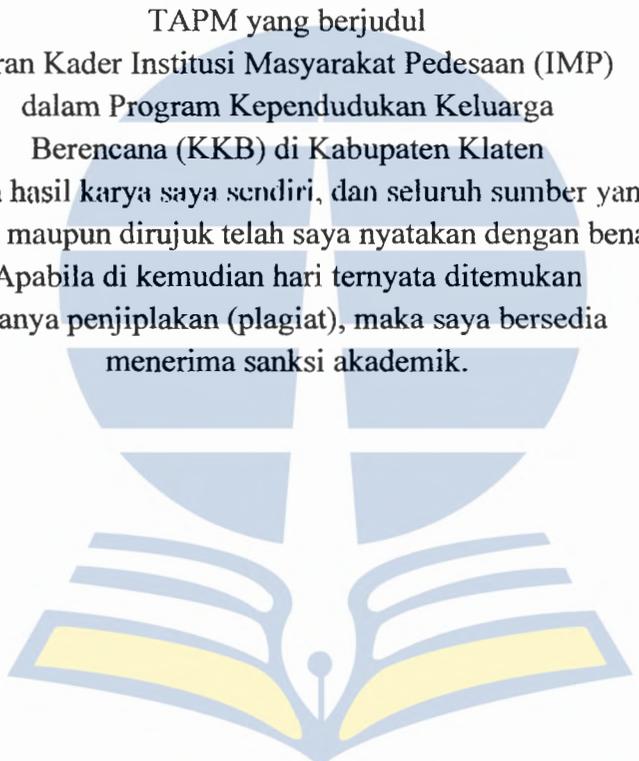
Nama : Dr. Liestyodono Bawono, M.Si.

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul
Peran Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
dalam Program Kependudukan Keluarga
Berencana (KKB) di Kabupaten Klaten
adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang
dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.
Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan
adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia
menerima sanksi akademik.

Semarang, 25 Nopember 2017


Yang Menyatakan

TGL. 20
455AEF804016463

RIBU RUPIAH

(Muhammad Yuniarso)
NIM. 500833558

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT. atas rahmat karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM). TAPM dengan judul Peran Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam Program Kependudukan Keluarga Berencana (KKB) di Kabupaten Klaten ini disusun dalam rangka memenuhi syarat dalam Program Studi Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka di UPBJJ-UT Semarang.

Penulis juga sangat berterima kasih atas bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, dari mulai masa perkuliahan sampai dengan selesainya penyusunan TAPM ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Ibu Dr. Sri Suwartiningsih, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Liestyodono Bawono, M. Si., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan dukungan serta bimbingan dalam penyusunan TAPM ini.
2. Bapak Dr. Liestyodono Bawono, M. Si., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Terbuka, Ibu Dr. Suparti, M.Pd. selaku Kepala UPBJJ-UT Semarang beserta seluruh karyawan karyawan yang telah memberikan fasilitasi dalam proses penyusunan TAPM ini.
3. Seluruh dosen Universitas Terbuka di Semarang yang telah memberikan banyak bekal ilmu kepada penulis sehingga TAPM ini dapat tersusun.
4. Kepala Bappeda dan Kepala DissosP3AKB Kabupaten Klaten beserta aparaturnya Pemerintah Kabupaten Klaten yang telah memberikan kemudahan dalam ijin serta proses pengumpulan data penelitian.
5. Para informan di wilayah penelitian yang telah bersedia untuk memberikan data dan informasi dalam proses pengumpulan data penelitian.
6. Kedua orangtua serta isteri dan anak-anak tercinta yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi, serta doa selama mengikuti perkuliahan di Program Pascasarjana Universitas Terbuka.

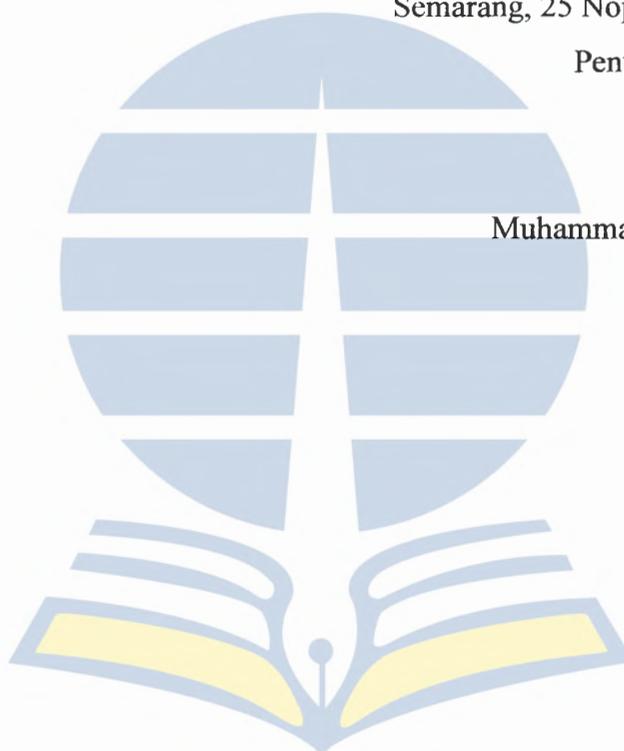
7. Seluruh rekan mahasiswa dan rekan sejawat yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan moral maupun materiil dalam menyelesaikan penyusunan TAPM ini.

Penulis menyadari bahwa TAPM ini masih banyak kekurangan dalam berbagai hal baik mengenai tata bahasa, susunan, maupun substansinya. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan, dengan harapan TAPM ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu khususnya dalam bidang administrasi publik.

Semarang, 25 Nopember 2017

Penulis

Muhammad Yuniarso



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Ciputat 15418
Telp. 021-7415050, Faks. 021-7415588

BIODATA

Nama : Muhammad Yuniarso

NIM : 500833558

Tempat dan Tanggal Lahir : Klaten, 26 Juni 1968

Registrasi Pertama : 2015.2

Riwayat Pendidikan :

Lulus SD di Klaten pada tahun 1980

Lulus SMP di Klaten pada tahun 1983

Lulus SMA di Klaten pada tahun 1986

Lulus S 1 di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang
pada tahun 1992

Riwayat Pekerjaan :

Tahun 1993 s/d 2004 sebagai Penyuluh KB di BKKBN Kabupaten Klaten

Tahun 2004 s/d 2016 sebagai Penyuluh KB di Pemerintah Kabupaten Klaten

Tahun 2016 s/d sekarang sebagai Penyuluh KB di BKKBN Provinsi Jawa Tengah

Alamat Tetap : Pereng Kulon RT 10 / RW 05, Pereng, Prambanan, Klaten.

Telp / HP : 085647568626

Semarang, 27 Nopember 2017

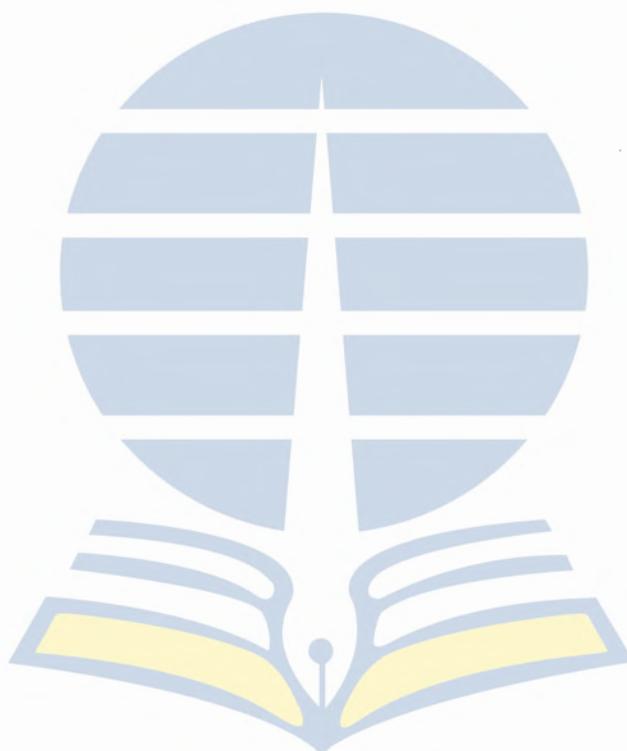
Muhammad Yuniarso
NIM. 500833558

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	ii
<i>Abstract</i>	iii
Lembar Persetujuan	iv
Lembar Pengesahan	v
Lembar Pernyataan	vi
Kata Pengantar	vii
Riwayat Hidup	ix
Daftar Isi	x
Daftar Gambar	xiii
Daftar Tabel	xiv
Daftar Lampiran	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	11
B. Penelitian Terdahulu	43
C. Kerangka Berpikir	46
D. Operasionalisasi Konsep	49

BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Obyek Penelitian	53
B. Desain Penelitian	54
C. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan	54
D. Prosedur Pengumpulan Data	55
E. Metode Analisis Data	57
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Obyek Penelitian	63
1. Gambaran Umum Kader IMP	63
2. Program KKB di Kabupaten Klaten	71
3. Deskripsi Informan	76
4. Pendayagunaan Kader IMP di Kabupaten Klaten	78
5. Respon Kader IMP Terhadap Program KKB	87
B. Peran Kader IMP di Kabupaten Klaten	93
1. Pengorganisasian	94
2. Pertemuan	95
3. KIE dan Konseling	97
4. Pencatatan Pendataan dan Pemetaan Sasaran	99
5. Pelayanan Kegiatan	102
6. Kemandirian	106
C. Pembahasan	108
1. Analisis Peran Kader IMP	108
2. Analisis Kendala Peran Kader IMP	131
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	139
B. Saran	140
DAFTAR PUSTAKA	142
DAFTAR LAMPIRAN	149
Lampiran 1. Pedoman Wawancara	149

Lampiran 2. Transkrip Wawancara	155
Lampiran 3. Hasil Pengamatan	188
Lampiran 4. Ijin Penelitian	196



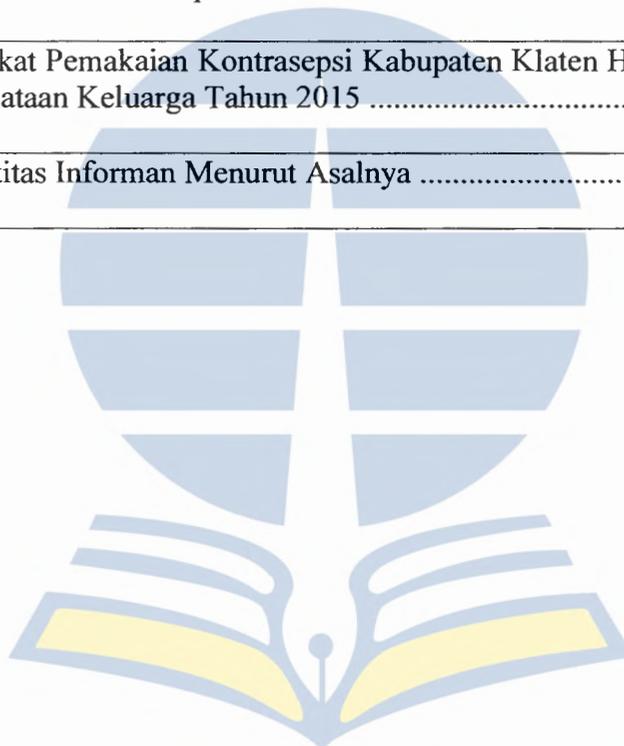
DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Tingkat Pemakaian Kontrasepsi Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016	5
Gambar 2.1	Kerangka Berpikir Penelitian Peran Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam Program Kependudukan Keluarga Berencana (KKB) di Kabupaten Klaten	48
Gambar 3.1	Model Analisis Interaktif Milles dan Hubberman	60
Gambar 4.1	Bagan Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten	72



DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Operasionalisasi Konsep Peran Kader IMP dalam Program KKB di Kabupaten Klaten dengan Pendekatan Teori Peran Levinson	49
Tabel 4.1	Jumlah Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2015	70
Tabel 4.2	Tingkat Pemakaian Kontrasepsi Kabupaten Klaten Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2015	75
Tabel 4.3	Identitas Informan Menurut Asalnya	77



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Pedoman Wawancara	149
Lampiran 2. Transkrip Wawancara	155
Lampiran 3. Hasil Pengamatan	188
Lampiran 4. Ijin Penelitian	196



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan, termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk melaksanakan fungsi mengendalikan penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana di Indonesia. Adapun tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan kebijakan kependudukan guna mendorong terlaksananya pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan kependudukan serta mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelebagaan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Sesuai amanat undang-undang tersebut, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan

bangsa. Dua hal pokok yang perlu diperhatikan dalam membahas integrasi penduduk dan pembangunan, yaitu:

1. Penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai obyek tetapi juga subyek pembangunan. Paradigma penduduk sebagai obyek telah mengeliminir partisipasi penduduk dalam pembangunan,
2. Ketika penduduk memiliki peran sebagai subyek pembangunan, maka diperlukan upaya pemberdayaan untuk menyadarkan hak penduduk dan meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan. Hal ini menyangkut pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas (BKKBN, 2015).

Pada Bab X pasal 58 dalam undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa setiap penduduk mempunyai kesempatan berperan serta dalam pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga. Sebagai tindak lanjut dari konteks yang ada dalam undang-undang tersebut maka penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung pergerakan dan penyuluhan KB tercantum sebagai salah satu fokus arah kebijakan dan strategi program KKB dalam Rencana Strategis BKKBN tahun 2015-2019. Hal ini dapat dipahami karena memang keberhasilan program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) selama ini tidak terlepas dari kerja keras dan peran serta seluruh pengelola dan petugas lapangan program KKB khususnya yang berada di tingkat lini lapangan. Petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) dan institusi masyarakat pedesaan (IMP) adalah ujung tombak program KKB yang sangat besar kontribusinya dalam mengelola program KKB di lini lapangan.

Pada era otonomi daerah program KKB menghadapi berbagai tantangan antara lain berupa asumsi bahwa program KKB bukan lagi sebagai *topical issue* yang menarik bagi media massa. Ketika program KKB membutuhkan dukungan politis saat memasuki otonomi daerah, dukungan dari para pengambil kebijakan di tingkat kabupaten / kota malah menurun. Fakta menunjukkan bahwa hanya 31 kabupaten/kota dari sekitar 440 kabupaten / kota yang membentuk dinas BKKBD secara utuh. Hal ini sangat berkaitan dengan masih adanya beberapa pengambil kebijakan publik yang belum memahami pentingnya program KKB. Di samping itu dengan masa jabatan pengambil keputusan yang sempit, maka fokus pembangunan lebih ke arah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik lainnya. Sedangkan program jangka panjang seperti program KKB sering dikesampingkan atau belum menjadi prioritas utama pembangunan di daerah. Pemerintah daerah belum menjadikan penduduk sebagai titik sentral pembangunan. program KKB belum mendapatkan perhatian yang sama dengan pertumbuhan ekonomi yang seharusnya ada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan perkembangan penduduk. Ditambah lagi permasalahan di daerah yang berkaitan dengan alokasi APBD untuk belanja pegawai yang sangat besar terkait banyaknya PNS (Wilonoyudho, 2014).

Dari uraian di atas dapat dimengerti bahwa era otonomi daerah juga berimbas terhadap berkurangnya jumlah PLKB, bahkan dari tahun ke tahun mengalami penurunan, karena disamping ada yang memasuki masa purna tugas atau mutasi juga tambahan formasi untuk jabatan fungsional PLKB sangat sedikit bahkan tidak ada sama sekali. Pada tahun 2008 Rasio PLKB dibanding jumlah desa sebesar 4 : 1. Padahal rasio yang ideal adalah seorang PLKB melakukan tugas

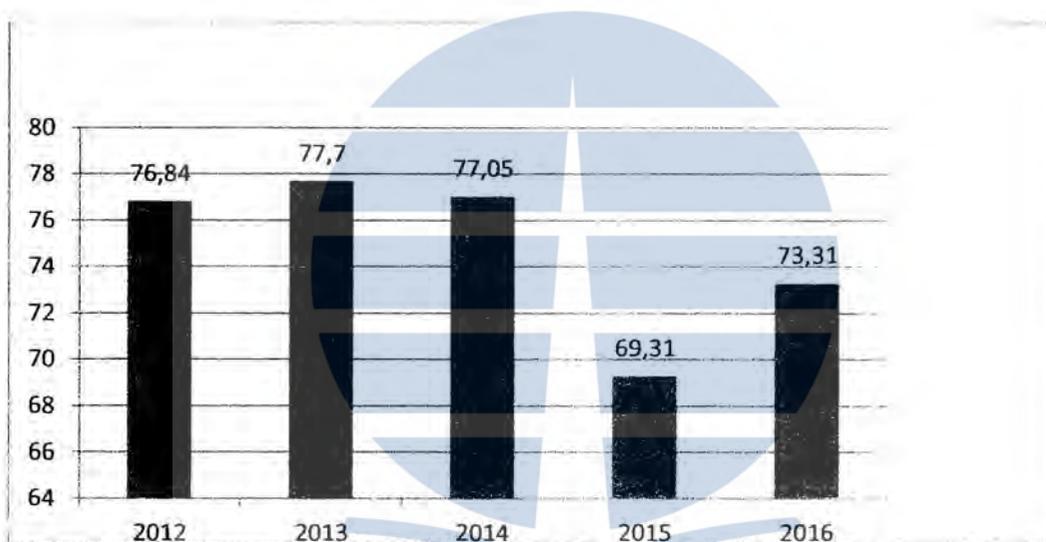
dengan 1 atau 2 desa binaan, sehingga hal ini sangat mempengaruhi kinerja PLKB (Wilonoyudho, 2014). Sedangkan pada tahun 2015, apabila mengacu kepada jumlah desa dan kelurahan di Indonesia diperkirakan kebutuhan tenaga PLKB tidak kurang dari 84 ribu orang. Sementara itu jumlah PLKB saat ini hanya sekitar 15 ribu orang (Jurnal Keluarga, 2015).

Kondisi yang demikian jelas akan berdampak pada menurunnya intensitas pembinaan yang dilakukan oleh PLKB kepada kader IMP yang menjadi binaannya. Sehingga di satu sisi IMP yang terdiri dari pembantu pembina keluarga berencana desa (PPKBD), sub PPKBD, dan kelompok KB sebagai institusi masyarakat yang mandiri perannya dirasakan makin strategis dalam pengelolaan program. Namun pada sisi yang lain, pembinaan PLKB kepada IMP kurang intensif dan kurang maksimal sehingga berakibat terhadap kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat dan operasional program KKB. Ditambah lagi dengan realita bahwa hasil studi tentang Identifikasi Pelaksanaan Peran PLKB dan Peran IMP Tahun 2009 yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Sejahtera dan Peningkatan Kualitas Perempuan (PUSRA) BKKBN menunjukkan bahwa kemampuan manajerial dan teknis PLKB masih terbatas. IMP sebagai institusi masyarakat di lini lapangan belum mampu melaksanakan 6 peran bakti IMP (BKKBN, 2010).

Kabupaten Klaten yang merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah, terdiri dari 26 kecamatan, 401 desa/kelurahan, 3675 rukun warga (RW) serta 9529 rukun tetangga (RT). Berdasarkan Laporan K/O/KAB/13 Kabupaten Klaten Tahun 2016, Potensi yang dimiliki dalam pengelolaan program KKB adalah PLKB berjumlah 60 orang, sedangkan IMP berjumlah 13.605 orang yang

terdiri dari 16 orang kader PPKBD, 3.675 orang kader sub PPKBD, dan 9.529 orang kader kelompok KB. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa dari segi kuantitas kabupaten Klaten memiliki kader IMP di seluruh tingkatan dari desa yang ada.

Namun dalam hal pelaksanaan program KKB di kabupaten Klaten belum dapat dikatakan berhasil. Apabila dilihat dari Perkembangan *Contraceptive Prevalence Rate (CPR)* atau Tingkat Pemakaian Kontrasepsi maka dapat dilihat dalam Gambar 1.1 berikut ini :



Sumber : Pendataan Keluarga 2015 dan Pemutakhiran Basis Data Keluarga 2012-2016

Gambar 1.1
Tingkat Pemakaian Kontrasepsi Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016

Dari Gambar 1.1 dapat diketahui bahwa berdasarkan hasil pemutakhiran basis data keluarga tahun 2012-2016 serta pendataan keluarga 2015, tingkat pemakaian kontrasepsi di kabupaten Klaten yang merupakan salah satu indikator keberhasilan Program KKB ada kecenderungan mengalami stagnasi bahkan penurunan. Penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu pada saat dilaksanakan Pendataan Keluarga pertama kali untuk siklus lima tahunan.

Sedangkan untuk tahun 2012-2014 serta tahun 2016 merupakan data pemutakhiran basis data keluarga.

Di samping itu hasil evaluasi program Kependudukan Keluarga Berencana (KKB) yang dilakukan menggunakan metode Kuadran, oleh BKKBN provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 dengan berdasar pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun 2013 menunjukkan bahwa kabupaten Klaten termasuk dalam kategori Kuadran II yang berarti memiliki TFR yang tinggi (2,36) serta CPR yang rendah (61,6) (BKKBN,2015). Merupakan suatu hal yang realistis bahwa CPR yang rendah menyebabkan TFR yang masih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program KKB di kabupaten Klaten masih jauh dari harapan.

Permasalahan tersebut tentu tidak terlepas dari segenap pemangku kepentingan dalam pengelolaan program KKB. Tidak terkecuali para PLKB (penyuluh KB) dan kader IMP di lini lapangan yang perannya semakin menurun akibat perubahan situasi serta keterbatasan yang ada. Sehingga kebijakan dari pemerintah dari berbagai tingkatan yang dapat mengoptimalkan peran kader IMP sangat dibutuhkan untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan program.

Untuk tingkat kabupaten tugas dan wewenang dalam menjalankan kebijakan penguatan peran kader IMP adalah kepala seksi Pengendalian Kependudukan Penyuluhan dan Penggerakan yang berada dalam organisasi perangkat daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DissosP3AKB). Apabila dibandingkan dengan kondisi sebelum otonomi daerah maka dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala terutama berupa sumberdaya manusia, serta alokasi anggaran yang relatif kecil.

Sedangkan apabila ditinjau dari sisi sasaran kebijakan yaitu para kader IMP maka masih meninggalkan banyak permasalahan terutama dalam pelaksanaan peran baktinya. Kita ketahui bahwa para kader IMP memiliki 6 (enam) peran bakti yang terdiri dari : pengorganisasian, pertemuan, KIE dan konseling, pencatatan pendataan dan pemetaan sasaran, pelayanan kegiatan, serta kemandirian.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 7 April 2016 terhadap ibu Ir. Ida Moernawati, MM., salah satu penyuluh KB kabupaten Klaten sekaligus koordinator penyuluh KB di kecamatan Ceper, maka pada umumnya para kader IMP belum dapat mengoptimalkan peran tersebut. Dari data rekapitulasi K/0/PPKBD/13 dan K/0/Sub-PPKBD/13 tingkat kecamatan Ceper maka dapat diketahui bahwa belum ada IMP yang berklasifikasi mandiri. Dari jumlah PPKBD sebanyak 18, semuanya masih dalam klasifikasi berkembang. Sedangkan untuk Sub PPKBD dari jumlah keseluruhan 166, sebanyak 113 (68,07%) Sub PPKBD masih dalam klasifikasi dasar, sedangkan sisanya juga masih dalam klasifikasi berkembang. Pengelompokan/klasifikasi IMP yang terdiri dari dasar, berkembang, dan mandiri ini didasarkan pada sejumlah peran dari 6 peran bakti IMP yang dapat dilakukan oleh kader IMP.

Selanjutnya dari hasil wawancara diketahui bahwa dalam hal pengorganisasian misalnya, kepengurusan IMP sebagian besar bersifat tunggal sehingga belum ada pembagian tugas. Di samping itu para kader IMP banyak yang belum memiliki surat keputusan dari kepala desa/kelurahan setempat, padahal hal itu penting sebagai pegangan dalam menjalankan tugasnya. Demikian pula peran dalam pertemuan, KIE dan konseling, serta pelayanan kegiatan juga masih menemui

kendala mengingat keterbatasan informasi, pengetahuan dan ketrampilan akibat dari kurangnya bimbingan dan pembinaan dari penyuluh KB.

Pelaksanaan peran dalam pencatatan pendataan dan pemetaan sasaran pada umumnya kader IMP baru sampai melakukan pencatatan dan pendataan yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun, namun tidak ditindaklanjuti dengan pemetaan sasaran serta perkembangannya. Padahal seharusnya kader IMP dapat melakukan kegiatan tersebut secara rutin yang hasilnya dapat bermanfaat bagi kepentingan program KKB. Terakhir peran dalam upaya kemandirian, memang sudah ada upaya untuk meningkatkan kemandirian terutama dalam bentuk kelompok. Namun upaya yang dilakukan biasanya hanya bersifat untuk kepentingan sosial, sedangkan inovasi yang sifatnya upaya untuk pengembangan kelompok kegiatan serta peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga masih kurang.

Hadirnya Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa sebenarnya dapat memberikan kontribusi bagi program penguatan peran kader IMP. Namun sampai saat ini masih jauh dari harapan. Alokasi anggaran baik dari pemerintah pusat (Dana Desa/APBN) maupun dari pemerintah kabupaten (Alokasi Dana Desa/APBD) untuk Program KKB pada umumnya masih kurang. Hal ini dapat disebabkan oleh karena kurangnya perhatian, kepedulian, pemahaman dari para pengambil kebijakan serta kurangnya advokasi yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Harapannya adalah para kader IMP lebih berdaya sehingga dapat meningkatkan kepedulian dan peran serta untuk menjadi pengelola dan pelaksana program KKB yang dinamis dan mandiri. Apabila kita menengok kembali

perjalanan sejarah bahwa Program KKB pernah mengalami masa keemasan. Pada tahun 1992, BKKBN sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap sukses tidaknya program KKB, menerima penghargaan internasional dalam bidang manajemen, berupa '*Management Development Awards*'. Penghargaan manajemen ini sekaligus memberikan pengakuan terhadap kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola gerakan KKB hingga ke tingkat desa dan pedukuhan. Pada waktu itu memang jaringan program KKB terasa sangat kuat sampai ke tingkat yang paling bawah, jaringan itu tak lain adalah para kader IMP.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan kondisi latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran kader IMP dalam program KKB di kabupaten Klaten ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh kader IMP dalam mengelola program KKB di kabupaten Klaten sesuai dengan perannya ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis peran kader IMP dalam program KKB di kabupaten Klaten.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh kader IMP dalam mengelola program KKB di kabupaten Klaten sesuai dengan perannya.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pembahasan mengenai peran kader.
- b. Penelitian ini dapat berguna untuk penambahan referensi terhadap studi tentang peran kader IMP dalam program KKB.

2. Kegunaan Praktis

- a. Menambah wawasan bagi masyarakat serta para pemangku kepentingan dalam rangka mengingatkan kembali tentang pentingnya peran kader IMP dalam program KKB.
- b. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pengelolaan program KKB di kabupaten Klaten, khususnya yang berkaitan dengan peran kader IMP.
- c. Sebagai bahan masukan bagi para pengambil kebijakan agar para kader IMP dapat berperan secara optimal dalam rangka keberhasilan program KKB.
- d. Hasil penelitian ini menambah wawasan pengetahuan serta memberikan pemahaman peneliti mengenai peran IMP dalam program KKB.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Administrasi Publik

Istilah administrasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata yaitu “*ad*” dan “*ministrare*” yang berarti “*to serve*” yang dalam bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi. Sedangkan administrasi dalam bahasa Inggris dikenal dengan *administration*. Istilah ini sering disebut sebagai administrasi dalam arti luas yang berarti apa yang harus dijalankan oleh setiap individu dalam sebuah kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.(Noviyanti, 2015).

Pendapat Dunsire dalam Keban (2008) administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik.

Simon (1997) menyatakan bahwa : “*Administration can be defined as the activities of group cooperating to accomplish common goal.*” Administrasi adalah kegiatan kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan Robbins (1978) menyatakan bahwa : “*Administration is the universal process of efficiently getting activities completed with and through other.*” Administrasi adalah proses yang universal dalam aktivitas pencapaian tujuan secara efisien dengan dan melalui orang lain.

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah proses kegiatan usaha kerjasama antar dua orang atau lebih berdasarkan

rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama secara efisien. Sehingga administrasi memiliki unsur-unsur yaitu adanya : dua manusia atau lebih, tujuan yang hendak dicapai, tugas yang harus dilaksanakan, serta peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas tersebut.

Definisi publik, menurut Syafi'ie dalam Pasolong (2011) adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. Menurut Cutlip (1957) publik adalah kelompok individu yang terikat oleh kepentingan bersama dan berbagi rasa atas dasar kebersamaan. Sementara itu Kimbal Young dalam Syafri (2012) mengemukakan 3 definisi dari istilah publik yaitu :

- a. Orang
- b. Keseluruhan anggota dari suatu komunitas, bangsa, atau masyarakat
- c. Kumpulan individu dengan kepentingan yang sama.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas bahwa definisi publik erat kaitannya dengan kepentingan bersama yang merupakan bagian dari konteks organisasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 3 unsur publik dari pengertian publik di atas, yakni : adanya sejumlah manusia, adanya kepentingan bersama, adanya perasaan bersatu karena ikatan kepentingan tersebut. (Noviyanti, 2015).

Sedangkan Administrasi Publik menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2008) adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Douglas dalam Stillman (1992) mengemukakan : “ *public administration is the produced of good and service designed to serve the need of citizen.*”(Administrasi publik adalah menghasilkan barang dan jasa yang dirancang untuk melayani kebutuhan warga negara).

Pfiffner dan Presthus (1960) mengemukakan sebagai berikut :

"Public Administration involve the implementation of public policy which has been determine by representative political bodies."(administrasi publik meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.)

"Public Administration may be defined as the coodination of individual and group effort to carry out public policy. It mainly occupied with the dayti work of government." (administrasi publik dapat didefenisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.)

"In sum, public administration is process concerned with carryng out public policies, encompassing, innumerable skills and techniques large number of people."(secara ringkas administrasi publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan dan tehnik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.)

Selanjutnya Nigro dan Nigro (1984) mengemukakan sebagai berikut: *"Public Administration is cooperative group effort in public setting."* (Administrasi publik adalah suatu kerja sama kelompok dalam lingkungan pemerintahan.) *"Public Administration covers all three branches,; execitive, legislative and yudicative, and their interrelationships."*(Administrasi publik meliputi ketiga cabang pemerintahan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta hubungan di antara mereka.)

Hal ini sejalan dengan pendapat Rosenbloom (1993) bahwa :*" Public Administration is the use of manajerial, political, and legal theories and processes to fulfill legislative, executive, and judicial governmental mandates for the provision of regulatory and service functions for the society as a whole or for some segments of it."* (Administrasi publik adalah penggunaan dari teori-teori dan proses-proses manajerial, politik, dan hukum untuk memenuhi mandat-mandat kepemerintahan legislatif, eksekutif, yudikatif, demi ketetapan fungsi-fungsi pengatur dan pelayanan bagi masyarakat sebagai keseluruhan atau bagi beberapa elemen masyarakat.)

Selanjutnya Nicholas Henry (2004) memberi batasan bahwa administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan efektifitas,

efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik. Dengan demikian, definisi ini melihat administrasi publik sebagai kombinasi teori dan praktek yang mencampuri proses manajemen dengan pencapaian nilai-nilai normatif dalam masyarakat.

Sementara Keban (2008) menyatakan bahwa istilah administrasi publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah. Ia menekankan pada makna yang bervariasi tentang istilah Administrasi Publik, bahwa administrasi publik memiliki 3 makna yang mendalam berdasarkan perkembangan pengertiannya, yaitu :

- a. *Administration of public*, menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif mengatur dan mengambil keputusan. Dalam hal ini masyarakat diasumsikan sebagai masyarakat yang pasif dan hanya menurut saja.
- b. *Administration for public*, menunjukkan suatu konteks yang lebih maju, dimana pemerintah lebih berperan dalam mengemban misi pemberian pelayanan publik (*service provider*). Pemerintah lebih responsif atau lebih tanggap terhadap apa yang di butuhkan masyarakat dan lebih mengetahui cara terbaik untuk memberi pelayanan publik kepada masyarakat.
- c. *Administration by public*, merupakan suatu konsep yang sangat berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat, lebih mengutamakan kemandirian dan

kemampuan masyarakat. Dalam hal ini, kegiatan pemerintah lebih mengarah kepada yaitu pemerintah berupaya memfasilitasi masyarakat agar mampu mengatur hidupnya tanpa harus sepenuhnya bergantung terus-menerus kepada pemerintah.

Dari semua batasan ini, masih menurut Keban (2008) ada beberapa makna penting yang harus diingat berkenaan dengan hakekat administrasi publik yaitu :

- a. Bidang tersebut lebih berkaitan dengan dunia eksekutif, meskipun juga berkaitan dengan dunia yudikatif dan legislatif.
- b. Bidang tersebut berkenaan dengan formulasi dan implementasi kebijakan publik.
- c. Bidang tersebut juga berkaitan dengan berbagai masalah manusiawi dan usaha kerja sama untuk mengemban tugas-tugas pemerintah.
- d. Meskipun bidang tersebut berbeda dengan administrasi swasta tetapi ia *overlapping* dengan administrasi swasta.
- e. Bidang tersebut diarahkan untuk menghasilkan *public goods* dan *services*.
- f. Bidang ini memiliki dimensi teoritis dan praktis.

Ruang lingkup atau cakupan administrasi publik sangat tergantung dari perkembangan dan kebutuhan atau dinamika masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Chander & Plano (1988) menyebutkan bahwa apabila kehidupan manusia semakin kompleks permasalahannya maka apa yang dikerjakan oleh pemerintah atau administrasi publik juga semakin kompleks. Semakin kompleks permasalahan yang dialami masyarakat untuk mencapai tujuan negaranya maka tanggung jawab pemerintah dalam perumusan dan pelaksanaan berbagai kebijakan dan program juga semakin kompleks. Dan ketika suatu negara mampu

mencapai tujuannya, maka negara tersebut akan berada pada posisi negara kesejahteraan (*welfare state*).

Sebegitu kompleksnya pemahaman dan permasalahan administrasi publik sehingga obyek studi administrasi publik adalah sistem administrasi publik, yang terbentuk karena jalinan hubungan saling mempengaruhi antara administrasi publik dengan kajian ilmu lainnya. Jadi dapat dikatakan bahwa sifat permasalahan yang multidimesi ini akan menentukan ruang lingkup studi administrasi publik.

Dari berbagai definisi di atas, dapat dikatakan bahwa administrasi publik merupakan rangkaian kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik (tujuan negara) secara efisien dan efektif. Dan yang menjadi tugas utama administrasi publik ialah pada dasarnya merencanakan dan merumuskan kebijaksanaan politik, kemudian melaksanakannya. Pembahasan dalam penelitian ini berkaitan dengan dua dimensi penting dalam administrasi publik yaitu kebijakan publik berupa program KKB di satu sisi, serta di sisi yang lain adalah manajemen publik yang merupakan proses penggerakan SDM dalam hal ini kader IMP sesuai perintah kebijakan publik tersebut demi terselenggaranya pelayanan publik dalam program KKB.

2. Kebijakan Publik

Menurut Cooper, et.al. (1998) : "*A policy is an answer to the problem*" (Kebijakan adalah jawaban atas masalah). Cooper, et.al menyatakan bahwa salah satu konsep sentral dalam kebijakan publik adalah 'jawaban atas masalah'. Sebuah pernyataan yang sangat singkat yang tentu saja perlu dielaborasi (diperjelas) sehingga lebih mudah kita pahami. Kebijakan publik apapun bentuk

dan areanya, dibuat tujuannya tidak lain adalah untuk memecahkan masalah tertentu. Dalam proses pembuatan kebijakan publik setidaknya mutlak harus ada dua (2) hal pokok, yaitu masalah dan alternatif pemecahan masalah. Rasanya tidak mungkin kebijakan dibuat tidak dalam rangka memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, setiap pembuat kebijakan publik mempunyai perhatian (konsentrasi) yang sangat tinggi terhadap dua hal pokok tersebut, yaitu masalah dan alternatif pemecahan masalah.

Anderson (1979) mendefinisikan kebijakan publik sebagai berikut : *“A purposive course of action followed by an aktor or set of aktors in dealing with a problem or matter of concern”* (Serangkaian tindakan yang bertujuan dan dilakukan serta diikuti oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah tertentu).

Penjelasan Anderson tersebut menegaskan bahwa definisi kebijakan publik tersebut mempunyai 5 macam implikasi, yaitu:

- a. Setiap kebijakan pasti bertujuan atau mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai.
- b. Kebijakan itu terdiri dari serangkaian tindakan atau pola-pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.
- c. Kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah dan bukanlah apa yang pemerintah berkeinginan melakukan sesuatu atau hendak melakukan sesuatu.
- d. Kebijakan itu bisa berbentuk positif atau negatif.
- e. Kebijakan publik setidaknya-tidaknya dalam bentuknya yang positif didasarkan pada hukum dan karenanya bersifat otoritatif.

Menurut Cochran & Malone (1995) : *“Public policy consists of political decisions for implementing programs to achieve societal goals.....public policy consists of a plan of action or program and a statement of objectives,in other words,a map and a destination”* (Kebijakan publik terdiri dari berbagai keputusan

politik untuk melaksanakan program-program demi tercapainya tujuan-tujuan masyarakat.....kebijakan publik berisi sebuah rencana tindakan atau program dan berupa pernyataan tujuan yang hendak dicapai, atau dengan kata lain, sebuah peta dan sebuah tujuan).

Dari berbagai definisi tersebut terkandung di dalamnya unsur-unsur :

- a. Serangkaian tindakan
- b. Dilakukan oleh seorang aktor (pemerintah) atau sejumlah aktor (pemerintah dan non pemerintah
- c. Adanya situasi problematika tertentu
- d. Mempunyai tujuan tertentu atau senantiasa berorientasi pada kepentingan publik.

3. Manajemen Publik

Menurut Terry dan Rue (2013), manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud nyata. Administrasi lebih luas dan lebih berperan daripada manajemen. Pandangan ini beralaskan manajemen berada di dalam administrasi itu sendiri. Menurut Atmosoedarmo dalam Zainun (1990) ada yang menganggap bahwa administrasi mempunyai dimensi statis dan dinamis. Dianggap sebagai dimensi dinamisnya administrasi adalah manajemen. Sedangkan dimensi statisnya adalah organisasi, terutama jika organisasi tersebut dianggap sebagai wadah.

Pandangan lain menyebutkan manajemen adalah inti dari administrasi. Dikatakan demikian karena dalam pelaksanaan administrasi sendiri dibutuhkan keterampilan atau kemampuan untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya manusianya agar dapat mencapai tujuan. Sehingga dapat dikatakan manajemen itu merupakan alat pelaksana utama daripada administrasi. Pada dasarnya

administrasi berfungsi untuk menentukan tujuan organisasi dan merumuskan kebijaksanaan umum, sedangkan manajemen berfungsi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijaksanaan umum yang telah dirumuskan (Noviyanti, 2015).

Woodrow Wilson dalam Shafritz (1991) mendesak agar ilmu administrasi publik segera mengarahkan perhatiannya pada orientasi yang dianut dunia bisnis, perbaikan kualitas personel dalam tubuh pemerintah, aspek organisasi dan metode-metode pemerintahan. Ia meletakkan empat prinsip dasar bagi studi administrasi publik yang mewarnai manajemen publik sampai sekarang yaitu :

- a. Pemerintah sebagai setting utama organisasi,
- b. Fungsi eksekutif sebagai fokus utama,
- c. Pencarian prinsip-prinsip dan teknik manajemen yang lebih efektif sebagai kunci pengembangan kompetensi administrasi, dan
- d. Metode perbandingan sebagai metode studi dan pengembangan bidang administrasi publik.

Sedangkan definisi manajemen publik yaitu manajemen instansi pemerintah. Overman dalam Terry dan Rue (2013) mengemukakan bahwa manajemen publik bukanlah "*scientific management*" meskipun sangat dipengaruhi oleh "*scientific management*". Manajemen Publik bukanlah "*policy analysis*", bukanlah juga administrasi publik. Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, dan *controlling* di satu sisi dengan SDM, keuangan, fisik, informasi, dan politik di sisi lain.

Berdasarkan pendapat Overman tersebut Shafritz et. al. dalam Keban (2004) mengemukakan bahwa manajemen publik dan kebijakan publik merupakan dua bidang administrasi publik yang tumpang tindih. Tapi untuk membedakan keduanya secara jelas maka dapat dikemukakan bahwa kebijakan publik merefleksikan sistem otak dan syaraf, sementara manajemen publik mempresentasikan sistem jantung dan sirkulasi dalam tubuh manusia. Dengan kata lain manajemen publik merupakan proses penggerak SDM dan non SDM sesuai perintah kebijakan publik.

Selanjutnya Shafritzs et.al. (1992), menyatakan bahwa manajemen publik memfokuskan sebagai sebuah profesi, dan memfokuskan pada manajer publik sebagai praktisi dari profesi tersebut. Menurut mereka, manajemen publik lebih mencurahkan perhatian pada operasi-operasi atau pelaksanaan internal organisasi pemerintah atau organisasi *non-profit* ketimbang pada hubungan dan interaksinya dengan lembaga legislatif, lembaga peradilan, atau organisasi sektor publik lainnya. Secara spesifik, manajemen publik memfokuskan pada bagaimana organisasi publik mengimplementasikan kebijakan publik. Perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan merupakan perangkat utama yang dilakukan oleh manajer publik dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik. Manajemen publik ini ada sebagai konsekuensi adanya kebijakan publik untuk diimplementasikan. Manajemen publik diperlukan untuk mengatur hal tersebut.

Shafritz et. al. (1992) juga mengemukakan bahwa manajemen publik memfokuskan pada alat-alat manajerial, teknik-teknik, ilmu pengetahuan, dan keahlian yang dapat digunakan untuk menerapkan ide-ide dalam kebijakan ke dalam program-program tindakan. Contoh : perencanaan dan manajemen

strategis, sistem klasifikasi jabatan, prosedur seleksi dan perekrutan pegawai, analisis dan formulasi anggaran, keahlian supervisi, evaluasi organisasi dan program, manajemen program/proyek, manajemen kinerja, dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaannya manajemen publik mengadopsi ilmu-ilmu yang ada dalam manajemen bisnis guna menciptakan keefisienan dan keefektifan kinerja. Tetapi dalam hal ini masih membawa tugas mereka sebagai pelayan rakyat.

Jadi kedudukan manajemen publik dalam administrasi publik adalah sebagai bentuk atau cara pengoperasian atau pelaksanaan internal organisasi pemerintah maupun *non-profit* dalam proses pengimplementasian kebijakan terhadap publik. Bukan sebagai analis kebijakan yang menciptakan suatu kebijakan kemudian dievaluasi untuk diperbaiki, tetapi pada teknis atau metode yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan publik agar dapat memaksimalkan efisiensi dan efektifitas dari suatu kebijakan publik agar sesuai dengan tujuan dan solusi dari suatu masalah.

Menurut Hugesh dalam Keban (2008) Manajemen Publik menggambarkan apa yang sebaiknya dilakukan dan kenyataan yang dilakukan oleh manajer publik di instansi pemerintah. Warna manajemen publik dapat dilihat pada masing-masing paradigma, misalnya dalam : Paradigma *pertama*, pemerintah diajak mengembangkan sistem rekrutmen, ujian pegawai, klasifikasi jabatan, promosi, disiplin, dan pensiunan yang baik. Manajemen SDA dan barang atau jasa harus diupayakan akuntabel, agar tujuan Negara dapat dicapai. Paradigma *kedua*, dikembangkan prinsip-prinsip manajemen yang diklaim sebagai prinsip-prinsip universal, yang dikenal sebagai POSDCORB (*planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting*). Paradigma *ketiga*, pada

dasawarsa 1990-an , berkembang model manajemen publik baru (*The New Public Management*) yang telah membawa inspirasi baru bagi perkembangan manajemen publik di berbagai negara. Dalam manajemen publik baru ini pemerintah diajak untuk :

- a. Meninggalkan paradigma administrasi tradisional dan menggantikannya dengan perhatian kinerja atau hasil kerja.
- b. Melepaskan diri dari birokrasi klasik dan membuat situasi dan kondisi organisasi, pegawai dan para pekerja lebih fleksibel.
- c. Menetapkan tujuan dan target organisasi dan personil lebih jelas, sehingga memungkinkan pengukuran hasil melalui indikator yang jelas, lebih memperhatikan evaluasi program yang lebih sistematis, dan mengukur dengan menggunakan indikator ekonomi, efisien, dan efektifitas.
- d. Staf senior lebih berkomitmen secara politis dengan pemerintah sehari-hari.
- e. Fungsi pemerintah adalah memperhatikan pasar, kontrak kerja keluar, yang berarti pemberian pelayanan, tidak selamanya melalui birokrasi saja (melibatkan sektor swasta).
- f. Fungsi pemerintah dikurangi melalui privatisasi, semuanya menggambarkan bahwa *The New Public Management* memusatkan perhatiannya pada hasil dan bukan pada proses lagi

Berdasarkan teori yang telah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen publik berkaitan dengan manajemen pemerintah, dimana berupa kinerja dari pemerintah dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan terhadap pelayanan kepada masyarakat atau publik. Aktor utama dalam manajemen publik adalah pemerintah dan seluruh seluruh pegawainya

untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya sehingga masyarakat merasa puas dan terpenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini kegiatan pelayanan dari pemerintah tidak dilakukan untuk mendapatkan profit atau keuntungan tetapi karena kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga harus memperhatikan manajemen semua aspek yang menjadi penunjang kinerja organisasi. Dan intinya dalam manajemen publik, pemerintah sebagai aktor utama berkewajiban mengatur sumber daya yang ada untuk mencapai keefektifan dan keefisienan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

4. Teori Perilaku

Menurut Caiden dalam Noviyanti (2015) bahwa perilaku manusia merupakan salah satu mazhab dalam administrasi publik. Perilaku manusia tidak dapat dipisahkan dari organisasi baik formal maupun informal. Fenomena yang menjadi cakupan dalam mazhab ini adalah komunikasi, konflik, motivasi, kepemimpinan, status, dan interaksi sosial. Selanjutnya Sharma dalam Sukidin (2011) mengemukakan bahwa manusia adalah penggerak utama aktivitas yang diorganisasikan dengan memahami perilaku manusia melalui *behavioral science* khususnya psikologi. Asumsi mazhab ini adalah usaha individu/ kelompok untuk mencapai tujuan organisasi dapat dicapai jika prinsip-prinsip psikologi diterapkan. Mazhab perilaku manusia mengakui bahwa perilaku manusia dipandang sebagai faktor identik, di sisi lain perilaku manusia juga dipandang sebagai elemen esensial administrasi.

Menurut Ali (2013) Setelah administrasi menjadi ilmu yang mandiri dengan struktur formal atau deskriptif ataupun fungsional serta dipengaruhi oleh pemikiran rasional munculah teori perilaku (*behavior theory*) dalam administrasi

yaitu teori yang melihat kelemahan-kelemahan teori struktural yang mengabaikan dimensi-dimensi dan prinsip-prinsip non hierarkis. Teori perilaku dalam administrasi ini melakukan pengkajian terhadap dimensi-dimensi kemanusiaan, dimensi kebutuhan, dan hasrat manusia dalam administrasi. Selanjutnya teori perilaku mendapat pengaruh dari pemikiran sosiologi, psikologi sosial dan antropologi. Oleh karena itu, dalam teori ini aspek perilaku dan nilai mendapat tempat dalam pemahaman tentang administrasi sekaligus dalam aplikasinya. Aspek perilaku administrasi, organisasi formal dan motivasi pribadi menjadi fokus utama.

Menurut Pasolong (2011) teori perilaku (*behavior theory*) dilandasi pemikiran, bahwa kepemimpinan merupakan interaksi antara pemimpin dengan pengikut, dan dalam interaksi pengikutlah yang menganalisis dan mempersepsi apakah menerima atau menolak pengaruh dari pimpinannya. Pendekatan perilaku menghasilkan dua orientasi perilaku pemimpin yaitu:

- a. Perilaku pemimpin yang berorientasi pada tugas (*task orientation*) atau yang mengutamakan penyelesaian tugas, dan
- b. Perilaku pemimpin yang berorientasi pada orang (*people orientation*) atau yang mengutamakan hubungan kemanusiaan

Menurut Notoatmodjo (1987) perilaku adalah totalitas yang terjadi pada orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, perilaku adalah merupakan keseluruhan (totalitas) pemahaman dan aktifitas seseorang yang merupakan hasil bersama antara faktor internal dan faktor eksternal. Perilaku seseorang adalah sangat kompleks, dan mempunyai bentangan yang sangat luas. Tiap individu adalah unik, dimana mengandung arti bahwa manusia yang satu berbeda dengan manusia

yang lain dan tidak ada dua manusia yang sama persis di muka bumi ini, walaupun ia dilahirkan kembar. Manusia mempunyai ciri-ciri, sifat, watak, tabiat, kepribadian, dan motivasi tersendiri yang membedakannya dari manusia lainnya. Perbedaan pengalaman yang dialami individu pada masa silam dan cita-citanya kelak dikemudian hari, menentukan perilaku individu di masa kini yang berbeda-beda pula.

Maslow (1943), dalam bukunya *Theory of Human Motivation.*, menegaskan bahwa manusia mempunyai lima kebutuhan yaitu:

- a. Kebutuhan fisiologis (sandang/pakaian, pangan/makanan, papan/rumah, dan kebutuhan biologis seperti buang air besar, buang air kecil, bernafas, dan lain kebutuhan yang berhubungan dengan fisik),
- b. Kebutuhan keamanan dan keselamatan (bebas dari penjajahan, bebas dari ancaman, bebas dari rasa sakit, bebas dari teror, dan lain sebagainya),
- c. Kebutuhan sosial (memiliki teman, memiliki keluarga, kebutuhan cinta dari lawan jenis, dan lain-lain),
- d. Kebutuhan penghargaan (pujian, piagam, tanda jasa, hadiah, dan banyak lagi lainnya), serta
- e. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan dan keinginan untuk bertindak sesuai dengan bakat dan minatnya (seperti mengaktualisasikan diri untuk menjadi seorang ahli dalam bidang ilmu tertentu, atau hasrat untuk mengetahui serta memenuhi ketertarikannya akan suatu hal).

Kebutuhan manusia sebagaimana dijelaskan oleh Maslow merupakan kebutuhan yang membentuk tingkatan-tingkatan atau memiliki hierarki dari yang paling penting hingga menurun nilai pentingnya dan dari yang mudah hingga

yang sulit untuk mewujudkannya. Pemenuhan berbagai tingkatan kebutuhan manusia yang diungkapkan oleh Maslow menjadi faktor pendorong munculnya motivasi dan perilaku tertentu. Untuk itu, perilaku anggota organisasi (unsur bawahan maupun atasan) juga dapat dijelaskan dengan mempergunakan pendekatan pemenuhan kebutuhan manusia.

Selain itu Dessier (1980) menegaskan tentang metode membentuk perilaku yang menyatakan bahwa perilaku manusia terbentuk melalui proses dari adanya kebutuhan (*needs*), keinginan (*want*), motivasi, sikap, dan niat. Hersey (1995) juga menyatakan bahwa untuk memahami atau memperkirakan perilaku manusia dapat tercermin atau terlihat melalui aktivitas-aktivitasnya, perlu diketahui motif atau kebutuhan seseorang, yang menimbulkan suatu aktivitas, sedangkan motif adalah ikhwal mengapa berperilaku. Selanjutnya masih menurut Hersey (1995) berpandangan bahwa perilaku manusia pada dasarnya berorientasi pada tujuan. Pandangan ini dapat mengilhami setiap orang yang membacanya bahwa setiap perilaku manusia secara individu maupun sebagai anggota organisasi serta perilaku sosial, selalu diarahkan untuk mencapai atau mewujudkan tujuan yang telah mereka tetapkan sebelumnya.

Lebih lanjut Skinner, seperti yang dikutip oleh Notoatmodjo (1987) menegaskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Mengapa demikian ? karena perilaku itu sendiri terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespons, sehingga teori Skinner ini disebut sebagai teori "S-O-R" atau Stimulus-Organisme-Respon.

Skinner membedakan perilaku menjadi dua, yakni:

- a. Perilaku yang alami (*innate behaviour*), yaitu perilaku yang dibawa sejak organisme dilahirkan yang berupa refleks-refleks dan insting-insting.
- b. Perilaku operan (*operant behaviour*) yaitu perilaku yang dibentuk melalui proses belajar. Khusus perilaku pada manusia maka perilaku operan atau psikologis inilah yang lebih dominan. Sebagian terbesar perilaku ini merupakan perilaku yang dibentuk, perilaku yang diperoleh dan perilaku yang dikendalikan oleh pusat kesadaran atau otak (kognitif).

Dijelaskan lebih lanjut oleh Skinner dalam Notoatmodjo (1987) bahwa ada tiga asumsi yang saling berkaitan mengenai perilaku manusia. *pertama*, perilaku itu disebabkan; *kedua*, perilaku itu digerakan; dan *ketiga*, perilaku itu ditujukan pada sasaran/tujuan. Hal ini bermakna bahwa proses perubahan perilaku mempunyai kesamaan untuk setiap individu, yakni perilaku itu ada penyebabnya, dan terjadinya tidak dengan spontan, dan mengarah kepada suatu sasaran, baik secara eksklusif maupun inklusif. "Secara umum, perilaku berorientasi pada tujuan (*goal oriented*). Dengan perkataan lain, perilaku kita pada umumnya dimotivasi oleh suatu keinginan untuk mencapai tujuan tertentu".

Abcarian dan Masannat (1970) menegaskan bahwa : "*persons of higher socio-economic status (SES), such as businessmen and professionals, are more involved in political opinions. Poor information and no-voting are closely associated with low SES levels, while the converse is true at higher SES levels.*" (Jadi, kondisi sosial ekonomi mempunyai pengaruh besar terhadap sikap dan perilaku seseorang. Selain itu, kelas dan status seseorang sangat ditentukan oleh pekerjaan dan penghasilan.)

Ada pula pandangan bahwa setiap perilaku manusia selalu dilandasi oleh kepentingan-kepentingan. Hal ini bermakna bahwa untuk menggerakkan atau memperoleh dukungan anggota organisasi wajib memahami perilaku anggota

organisasi. Oleh karena itu, mempelajari perilaku organisasi tidak terlepas dari perilaku manusia di dalamnya.

Menurut Green dalam Notoatmodjo (1987) perilaku dipengaruhi oleh 3 faktor utama yaitu :

a. Faktor-faktor predisposisi (*predisposing factor*)

Faktor ini terwujud dalam: pengetahuan, sikap, nilai-nilai, kepercayaan, persepsi.

b. Faktor-faktor pendukung (*enabling faktor*)

Faktor pendukung merupakan faktor pemungkin. Faktor ini bisa sekaligus menjadi penghambat atau mempermudah niat suatu perubahan perilaku dan perubahan lingkungan yang baik. Faktor pendukung (*enabling faktor*) mencakup ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas. Sarana dan fasilitas ini pada hakekatnya mendukung atau memungkinkan terwujudnya suatu perilaku, sehingga disebut sebagai faktor pendukung atau faktor pemungkin.

c. Faktor-faktor pendorong (*reinforcing faktor*)

Faktor-faktor pendorong (*reinforcing faktor*) merupakan penguat terhadap timbulnya sikap dan niat untuk melakukan sesuatu atau berperilaku. Suatu pujian, sanjungan dan penilaian yang baik akan memotivasi, sebaliknya hukuman dan pandangan negatif seseorang akan menjadi hambatan proses terbentuknya perilaku.

Selanjutnya Thoha (2001: 41-46) menegaskan bahwa pendekatan (*approach*) untuk memahami perilaku manusia dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu: kognitif, penguatan (*reinforcement*), dan psikoanalitis. Pendekatan kognitif sama

dengan formula $P=F(I,L)$ (P=Perilaku; F= Fungsi; I=Individu dan L=lingkungan) yang bermakna bahwa perilaku adalah fungsi dari interaksi antara seseorang individu dengan lingkungannya. Jadi, manusia dapat mempengaruhi lingkungan dan lingkungan dapat mempengaruhi manusia. Pendekatan atau hampiran kognitif memfokuskan ide pada kegiatan mental yang sadar seperti berpikir, mengetahui, memahami, menilai, bersikap, kepercayaan dan pengharapan. Pendekatan kognitif percaya bahwa perilaku seseorang timbul karena disebabkan oleh adanya rangsangan (stimulus). Jadi perilaku yang timbul merupakan respon atau jawaban atas rangsangan.

Pendekatan penguatan seperti yang dijelaskan oleh Thoha (2001) merupakan gagasan Pavlov dan Thorndike. Pendekatan ini sebagai pendekatan lanjutan dari kognitif. Inti pemikirannya adalah stimulus yang diberikan untuk mengubah perilaku seseorang. Stimulus dalam hal ini berfungsi sebagai penguat. Terakhir adalah pendekatan psikoanalitis, memiliki gagasan bahwa perilaku manusia dikuasai oleh personalitasnya atau kepribadiannya. Freud dalam Thoha (2001) menegaskan bahwa konsep psikoanalitisnya merangkum 3 (tiga) hal yaitu ide, ego dan superego.

Hasil Penelitian Rogers (1974) menemukan bahwa sebelum orang mengadopsi perilaku baru (berperilaku baru), di dalam diri orang tersebut terjadi proses yang berurutan yaitu pertama, *awareness* (kesadaran) dalam makna orang mulai menyadari arti mengetahui stimulus (obyek) terlebih dahulu. Kedua, *interest* (ketertarikan) di mana orang mulai tertarik kepada stimulus. Ketiga, *evaluation* (evaluasi) yang berkaitan dengan menimbang-nimbang baik dan tidaknya stimulus bagi dirinya. Keempat, *Trial* (mencoba) di mana orang telah mulai mencoba

perilaku baru. Kelima, *Adoption* (menerima) yang bermakna bahwa si subyek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus.

Mengacu pada pandangan Rogers seperti yang telah diungkapkan menegaskan bahwa perubahan perilaku manusia tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan ada prosesnya. Sebagai contoh seorang pejabat negara (pemimpin) akan membangun dan menginternalkan netralitas birokrasi pada setiap diri aparatur negara. Untuk mewujudkan netralitas ini memerlukan waktu dan proses yang tidak mudah. Untuk itu, Notoatmodjo (1987) menegaskan bahwa apabila penerimaan perilaku baru atau adopsi perilaku melalui proses seperti ini didasari oleh pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang positif maka perilaku tersebut akan menjadi kebiasaan atau bersifat langgeng (*long lasting*).

Pemahaman penting berikutnya adalah konsep atau definisi perilaku organisasi. Middleton (2002) dalam bukunya *Organizational Behavior* menyatakan bahwa :

“ Organizational Behavior (OB) is the study of human behavior, attitudes and performance within an organizational setting. OB draws on theory, methods, and principles from such disciplines as psychology, sociology, and cultural anthropology to learn about individual perception, values, learning capabilities, and actions while working with groups and within the total organization. OB also can involve analyzing the external environment's effect on the organization and its learning resources, missions, objectives, and strategies.” (Perilaku Organisasi (OB) adalah studi tentang perilaku, sikap dan kinerja manusia dalam lingkungan organisasi. OB mengacu pada teori, metode, dan prinsip dari disiplin ilmu seperti ilmu psikologi, sosiologi, dan antropologi budaya untuk belajar tentang persepsi, nilai, kemampuan belajar, dan tindakan individual saat bekerja dengan kelompok dan dalam keseluruhan organisasi. OB juga dapat melibatkan analisis pengaruh lingkungan eksternal terhadap organisasi dan sumber pembelajaran, misi, sasaran, dan strategi.)

Pengertian yang ditulis oleh Middleton tentang pengertian perilaku organisasi lebih menekankan pada studi tentang sikap dan kinerja manusia dalam

pengaturan organisasi, dengan mengacu pada teori, metode dan prinsip-prinsip yang disumbangkan oleh disiplin psikologi, sosiologi dan antropologi budaya.

Pandangan yang tidak berbeda tentang perilaku organisasi diungkapkan oleh Davis dan Newstrom (1989) yang menyatakan bahwa perilaku organisasi adalah bidang ilmu yang mempelajari dan mengaplikasikan pengetahuan tentang bagaimana manusia berperilaku atau bertindak di dalam organisasi. Ia juga menegaskan bahwa unsur-unsur pokok perilaku organisasi yaitu orang, struktur, teknologi dan lingkungan tempat organisasi beroperasi. Pendapat Davis dan Newstrom seperti yang telah diungkapkan makin mempertegas bahwa perilaku organisasi tidak dapat melepaskan diri dari perilaku manusia sebagai anggota organisasi atau mereka yang bukan anggota organisasi. Perilaku organisasi dapat mempelajari perilaku perorangan, kelompok, dan struktur.

Demikian juga pandangan Scenmerhorn et. al. dan Robbins. Scenmerhorn et al., (1991) menyatakan bahwa "*organizational behavior is the study of individuals and groups in organizations*", sedangkan Robbins (2003) menegaskan bahwa perilaku organisasi mempelajari tiga determinan perilaku dalam organisasi yaitu perorangan (individu), kelompok, dan struktur. Di samping itu, perilaku organisasi menerapkan pengetahuan yang diperoleh mengenai perorangan, kelompok, dan efek dari struktur pada perilaku, agar organisasi bekerja lebih efektif. Sehingga perilaku organisasi memperhatikan apa yang dilakukan orang-orang dalam suatu organisasi dan bagaimana perilaku tersebut mempengaruhi kinerja organisasi.

Pengertian perilaku organisasi berikutnya adalah menurut Thoha (2001) menyatakan bahwa perilaku manusia yang berada dalam suatu kelompok atau

organisasi adalah awal dari perilaku organisasi. Perilaku organisasi mendasarkan diri pada ilmu perilaku yang dikembangkan dengan pusat perhatian pada tingkah laku manusia dalam suatu organisasi. Pengetahuan ini didukung oleh dua komponen yakni individu-individu yang berperilaku dan organisasi formal sebagai wadah perilaku.

Lebih lanjut Thoha (2001) menegaskan bahwa perilaku organisasi merupakan bidang studi yang berhubungan dengan semua aspek kegiatan manusia di dalam suatu organisasi. Hal seperti ini termasuk pengaruh manusia terhadap organisasi dan pengaruh organisasi terhadap manusia, dengan tujuan praktis untuk menentukan bagaimanakah perilaku manusia dalam suatu organisasi dapat mempengaruhi proses pencapaian tujuan organisasi.

Pembahasan teori perilaku ini sangat diperlukan dalam pembahasan mengenai peran kader IMP, karena IMP merupakan lembaga atau organisasi pengelola program KKB di tingkat yang paling bawah, di mana perilaku kader sebagai individu yang berada dalam organisasi IMP tersebut akan sangat berpengaruh terhadap perannya. Terdapat faktor-faktor yang berpengaruh yang melatarbelakangi perilaku kader IMP di kabupaten Klaten sehingga peran yang dilakukan belum dapat dilakukan secara optimal.

5. Teori Peran

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*). Peran merupakan

aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan sesuatu peran. (Sinaga, 2001).

Menurut Thompson (2001) definisi teori peran adalah sebagai berikut: *“Role theory attempts to explain the interactions between individuals in organizations by focusing on the roles they play. Role behavior is influenced by role expectations for appropriate behavior in that position, and changes in role behavior occur through an iterative process of role sending and role receiving”* (Teori peran mencoba untuk menjelaskan interaksi antara individu dalam organisasi dengan fokus pada peran yang mereka mainkan. Peran perilaku dipengaruhi oleh harapan peran untuk perilaku yang tepat di posisi itu, dan perubahan perilaku peran terjadi melalui proses iteratif pengiriman peran dan penerimaan peran).

Sedangkan Menurut Sarwono (2002) Teori peran (*role theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan antara teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah peran diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi aktor dalam teater (sandiwara) itu kemudian dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dalam teater, posisi orang dalam masyarakat sama dengan posisi aktor dalam teater, yaitu bahwa perilaku yang diharapkan daripadanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitan dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran.

Linton dalam Cahyono (2008), seorang antropolog, telah mengembangkan Teori Peran. Teori Peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama

yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari'. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Mengapa seseorang mengobati orang lain, karena dia adalah seorang dokter. Jadi karena statusnya adalah dokter maka dia harus mengobati pasien yang datang kepadanya. Perilaku ditentukan oleh peran sosial. Begitu juga dengan seorang guru, selain ia sebagai pengajar di sekolah menyampaikan materi pembelajaran, guru juga harus menjadi sosok teladan yang bisa dijadikan contoh oleh muridnya.

Pengertian peran menunjuk pada organisasi tindakan dalam suatu tipe hubungan interaksi khusus. Dua dimensi peran adalah kewajiban dan hak. Tindakan yang diharapkan akan dilaksanakan oleh seseorang merupakan kewajiban suatu peran, tindakan atau respon orang lain merupakan hak. Konsep peran dihubungkan dengan konsep status. Dalam penggunaan ini status hanya menunjuk pada posisi seseorang dalam suatu hubungan interaksi, bukan pada prestise yang terdapat pada seseorang. Sehingga peran status adalah satuan struktural yang paling mendasar sebagai syarat fungsional yang harus dipenuhi (Cholid, 2009).

Selanjutnya menurut Kozier (1995), peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain,

komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi posisi dan pengaruh. Menurut Biddle dan Thomas (1966), peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sanksi dan lain-lain.

Merton dalam Raho (2007) mengatakan bahwa “peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu”. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Menurut Narwoko dan Suyanto (2007), peran (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (*status*). Artinya, seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan suatu peran. Sedangkan Soekanto (2009) mengungkapkan bahwa peran adalah aspek dimana dari kedudukan atau status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya berarti ia menjalankan perannya. Peran lebih menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

Menurut Levinson dalam Soekanto (2009) menyebutkan bahwa suatu peran paling sedikit mencakup tiga hal yaitu :

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

- b. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan ketiga hal di atas, maka dalam peran perlu adanya fasilitas-fasilitas bagi seseorang atau kelompok untuk dapat menjalankan peranannya. Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada merupakan bagian dari masyarakat yang dapat memberikan peluang untuk pelaksanaan peranan seseorang atau kelompok.

Peran yang melekat pada setiap individu dan suatu lembaga memiliki kepentingan dalam hal-hal :

- a. Bahwa peran-peran tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak mempertahankan kelangsungannya.
- b. Peran hendaknya dilekatkan pada individu yang oleh masyarakat dianggap mampu untuk melaksanakannya.
- c. Dalam masyarakat kadang-kadang dijumpai individu yang tidak mampu melaksanakan perannya sebagaimana diharapkan. Oleh karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan yang terlalu banyak artinya kepentingan-kepentingan pribadinya.
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang

bahkan sering kali terlihat masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

Berry (2003) menyatakan bahwa peran yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peran yang dipegangnya. Peran didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peran ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga, dan di dalam peran-peran yang lain.

Di dalam peran terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan perannya atau kewajiban-kewajibannya. Dalam pandangannya peran-peran tersebut dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peran yang saling berhubungan.

Menurut Horton dan Hunt (1993) seseorang mungkin tidak memandang suatu peran dengan cara yang sama sebagaimana orang lain memandangnya. Sifat kepribadian seseorang mempengaruhi bagaimana orang itu merasakan peran tersebut. Tidak semua orang yang mengisi suatu peran merasa sama terikatnya kepada peran tersebut, karena hal ini dapat bertentangan dengan peran lainnya. Semua faktor ini terpadu sedemikian rupa, sehingga tidak ada dua individu yang memerankan satu peran tertentu dengan cara yang benar-benar sama.

Dapat dikatakan seseorang menjalankan suatu peran tertentu dengan cara yang berbeda-beda, dalam hal ini seperti guru matematika dalam melakukan perannya akan sangat terlihat berbeda dengan guru agama dalam melakukan perannya, hal ini menggambarkan bahwa peran itu bersifat status sosial yang dimana seseorang yang mendapatkan status sosial tersebut melakukannya dengan cara yang berbeda-beda.

Adapun faktor-faktor penyesuaian peran yang mempengaruhi dalam menyesuaikan diri dengan peran yang harus dilakukan, yaitu :

- a. Kejelasan perilaku dan pengetahuan yang sesuai dengan peran.
- b. Konsistensi respon orang yang berarti terhadap peran yang dilakukan.
- c. Kesesuaian dan keseimbangan antar peran yang diemban.
- d. Keselarasan budaya dan harapan individu terhadap perilaku peran.
- e. Pemisahan perilaku yang akan menciptakan ketidaksesuaian perilaku peran.
- f. Proses yang umum untuk memperkecil ketegangan peran dan melindungi diri dari rasa bersalah.

Dalam kaitannya dengan peran yang harus dilakukan, tidak semuanya mampu untuk menjalankan peran yang melekat dalam dirinya. Oleh karena itu, tidak jarang terjadi kurangberhasilan dalam menjalankan perannya. Dalam ilmu sosial, ketidakberhasilan ini terwujud dalam *role conflict* dan *role strain*. Setiap orang memainkan sejumlah peran yang berbeda, dan kadang-kadang peran-peran tersebut membawa harapan-harapan yang bertentangan.

Menurut Hendropuspito (1989), konflik peran (*role conflict*) sering terjadi pada orang yang memegang sejumlah peran yang berbeda macamnya, kalau peran-peran itu mempunyai pola kelakuan yang saling berlawanan meski subyek atau

sasaran yang dituju sama. Dengan kata lain, bentrokan peranan terjadi kalau untuk menaati suatu pola, seseorang harus melanggar pola lain. Setidaknya ada dua macam konflik peran. Yakni, konflik antara berbagai peran yang berbeda, dan konflik dalam satu peran tunggal. *Pertama*, satu atau lebih peran (apakah itu peran independen atau bagian-bagian dari seperangkat peran) mungkin menimbulkan kewajiban-kewajiban yang bertentangan bagi seseorang. *Kedua*, dalam peran tunggal mungkin ada konflik *inheren*.

Adanya harapan-harapan yang bertentangan dalam satu peran yang sama ini dinamakan *role strain*. Satu hal yang menyebabkan terjadinya *role strain* adalah karena peran apapun sering menuntut adanya interaksi dengan berbagai status lain yang berbeda. Sampai tingkatan tertentu, masing-masing interaksi ini merumuskan peran yang berbeda, karena membawa harapan-harapan yang berbeda pula. Maka, apa yang tampak sebagai satu peran tunggal mungkin dalam sejumlah aspek sebenarnya adalah beberapa peran. Misalnya, status sebagai karyawan bagian pemasaran (*sales*) eceran di sebuah perusahaan, dalam arti tertentu sebenarnya membawa beberapa peran sebagai bawahan (terhadap atasan di perusahaan itu), sebagai sesama pekerja (terhadap karyawan-karyawan lain di perusahaan itu), dan sebagai penjual (terhadap konsumen dan masyarakat yang ditawari produk perusahaan tersebut).

Selain itu menurut Keliat (1992) posisi di masyarakat dapat merupakan stresor terhadap peran karena struktur sosial yang menimbulkan kesukaran, atau tuntutan posisi yang tidak mungkin dilaksanakan. Stres peran ini dapat berupa :

- a. Konflik peran, dialami jika peran yang diminta konflik dengan sistem individu atau dua peran yang konflik satu sama yang lain.

- b. Peran yang tidak jelas, terjadi jika individu yang diberi peran yang tidak jelas dalam hal perilaku dan penampilan yang diharapkan
- c. Peran yang tidak sesuai, terjadi jika individu dalam proses transisi merubah nilai dan sikap. Misalnya, seseorang yang masuk dalam satu profesi, dimana terdapat konflik antara nilai individu dan profesi.
- d. Peran berlebih, terjadi jika individu menerima banyak peran misalnya, sebagai istri, mahasiswa, perawat, ibu. Individu dituntut melakukan banyak hal tetapi tidak tersedia waktu untuk menyelesaikannya.

Menurut Kahn et al. dalam Ahmad dan Taylor (2009) juga mengenalkan teori peran pada literatur perilaku organisasi. Mereka menyatakan bahwa sebuah lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku peran mereka. Harapan tersebut meliputi norma-norma atau tekanan untuk bertindak dalam cara tertentu. Individu akan menerima pesan tersebut, menginterpretasikannya, dan merespon dalam berbagai cara. Masalah akan muncul ketika pesan yang dikirim tersebut tidak jelas, tidak secara langsung, tidak dapat diinterpretasikan dengan mudah, dan tidak sesuai dengan daya tangkap si penerima pesan. Akibatnya, pesan tersebut dinilai ambigu atau mengandung unsur konflik. Ketika hal itu terjadi, individu akan merespon pesan tersebut dalam cara yang tidak diharapkan oleh si pengirim pesan.

Harapan akan peran tersebut dapat berasal dari peran itu sendiri, individu yang mengendalikan peran tersebut, masyarakat, atau pihak lain yang berkepentingan terhadap peran tersebut. Setiap orang yang memegang kewenangan atas suatu peran akan membentuk harapan tersebut. Individu atau pihak yang berbeda dapat membentuk harapan yang mengandung konflik bagi pemegang peran itu sendiri.

Oleh karena setiap individu dapat menduduki peran sosial ganda, maka dimungkinkan bahwa dari beragam peran tersebut akan menimbulkan persyaratan/harapan peran yang saling bertentangan. Hal tersebut yang dikenal sebagai konflik peran.

Sebagaimana diungkapkan juga oleh Kats dan Kahn dalam Damajanti (2003) bahwa individu akan mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan pada diri individu tersebut. Konflik pada setiap individu disebabkan karena individu tersebut harus menyanggah dua peran yang berbeda dalam waktu yang sama.

Teori peran juga menyatakan bahwa ketika perilaku yang diharapkan oleh individu tidak konsisten, maka mereka dapat mengalami stress, depresi, merasa tidak puas, dan kinerja mereka akan kurang efektif daripada jika pada harapan tersebut tidak mengandung konflik. Jadi, dapat dikatakan bahwa konflik peran dapat memberikan pengaruh negatif terhadap cara berpikir seseorang. Dengan kata lain, konflik peran dapat menurunkan tingkat komitmen independensi seseorang (Ahmad dan Taylor, 2009).

Adapun ambiguitas peran merupakan sebuah konsep yang menjelaskan ketersediaan informasi yang berkaitan dengan peran. Pemegang peran harus mengetahui apakah harapan tersebut benar dan sesuai dengan aktifitas dan tanggung jawab dari posisi mereka. Selain itu, individu juga harus memahami apakah aktifitas tersebut telah dapat memenuhi tanggung jawab dari suatu posisi dan bagaimana aktifitas tersebut dilakukan (Ahmad dan Taylor, 2009).

Sama halnya dengan konflik peran Kahn et al. dalam Ahmad dan Taylor (2009) mengemukakan bahwa ambiguitas peran juga dapat meningkatkan

kemungkinan seseorang menjadi merasa tidak puas dengan perannya, mengalami kecemasan, memutarbalikkan fakta, dan kinerjanya menurun. Selain itu juga dijelaskan bahwa ambiguitas peran dapat meningkat ketika kompleksitas organisasi melebihi rentang pemahaman seseorang.

Berdasarkan berbagai penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam peran terdapat unsur individu atau lembaga sebagai subyek yang melakukan peranan tertentu. Selain itu, dalam peran terdapat pula adanya status atau kedudukan seseorang atau lembaga dalam suatu masyarakat, artinya jika yang bersangkutan memiliki kedudukan (status) maka berarti menjalankan peran tertentu pula. Dengan demikian antara peran dan kedudukan (status) merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Setiap peran yang dijalankan seseorang atau lembaga merupakan gambaran dan konsekuensi dari kedudukan (status) yang dimiliki.

Di samping itu dalam teori tersebut juga dijelaskan bahwa ada kemungkinan seseorang atau lembaga mengalami kendala dan hambatan dalam menjalankan peran sesuai dengan kedudukan (status) yang dimiliki. Kendala dan hambatan tersebut dapat berupa *role conflict* maupun *role strain* yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan menjalankan peran sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

Selanjutnya maksud dari kata peran jika dihubungkan dengan peran IMP dalam program KKB adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh kader IMP dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan (status) yang dimiliki untuk keberhasilan Program KKB. Sedangkan aspek kendala dalam menjalankan peran tidak dapat dilepaskan karena merupakan bagian yang tidak

dapat dipisahkan dari teori peran itu sendiri. Pembahasan peran IMP dalam penelitian ini mengacu kepada teori peran yang dikemukakan oleh Levinson.

B. Penelitian Terdahulu

Walaupun mengalami perkembangan fungsi, pedoman mengenai peran yang harus dilaksanakan oleh IMP masih belum diubah, yaitu 6 peran yang terdiri dari: pengorganisasian, pertemuan, KIE dan konseling, pencatatan pendataan dan pemetaan, pelayanan kegiatan, dan kemandirian. Kajian Herartri (2008) menyimpulkan bahwa belum seluruh PPKBD (Pos Pembantu KB Desa) mampu melaksanakan keenam peran tersebut. Faktor penghambat utamanya adalah minimnya fasilitasi dan dukungan operasional. Tidak ada program pelatihan yang terstruktur, sehingga mereka tidak mempunyai gambaran utuh mengenai peran IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan). Peran yang dilaksanakan hanya sebatas yang diperintahkan oleh PLKB.

Utomo et al., (2006) melalui kajiannya selama tahun 1997-1998 di Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta menemukan besarnya peran kader KB. Mereka bertugas mempromosikan KB, mengadakan pertemuan, menyediakan informasi, mengorganisasi pengumpulan dana, membantu tabungan dan kredit, mengumpulkan data serta membantu aktivitas sosial lainnya.

Tantangan kerja para penyuluh KB dan kader KB semakin berat seiring dengan menurunnya dukungan media massa. Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007 menunjukkan menurunnya peranan berbagai media massa dalam menginformasikan KB. Tahun 2002/2003, terdapat 52,0 persen perempuan pernah kawin yang dalam waktu satu bulan sebelum wawancara

pernah mendengar/melihat pesan KB dari radio/TV/koran/majalah/poster/pamphlet. Adapun pada SDKI 2007, menurun menjadi 33,3 persen (BKKBN *online*, 26 September 2015).

Widiastuti (2006) menemukan bahwa partisipasi kader tidak berhubungan dengan pengetahuan mereka tentang posyandu, lama kerja menjadi kader, jam kerja kader, pemberian insentif, jumlah kader, ketersediaan alat dan bahan, seleksi, pembinaan, ketersediaan alat dan bahan serta frekuensi pertemuan kader.

Puspasari (2002) menyimpulkan bahwa kinerja kader Posyandu dipengaruhi sejumlah faktor seperti : rendahnya tingkat partisipasi pengguna posyandu, terbatasnya dana untuk makanan tambahan bagi balita yang ditimbang, terbatasnya sarana dan prasarana serta tidak adanya imbalan. Faktor lainnya adalah kurangnya supervisi dari petugas kelurahan dan kecamatan.

Wahyu Devita Riyani (2011) menyimpulkan bahwa posisi PPKBD dalam pengelolaan Program KB Nasional sangat menentukan terutama dalam menghadapi perubahan visi, misi, dan grand strategi Program KB Nasional. PPKBD merupakan sasaran yang berpotensi untuk memberikan penyuluhan dan bimbingan mengenai KB kepada masyarakat, karena mereka berasal dari masyarakat setempat di mana program KKB dilaksanakan. peran PPKBD sudah baik namun belum optimal karena masih ada kegiatan yang belum dilakukan oleh PPKBD yaitu kegiatan pertemuan, kemitraan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta dalam hal kemandirian.

Beberapa kajian di atas menunjukkan bahwa peran kader sangat besar dan sangat dibutuhkan dalam program pembangunan. Namun dalam melaksanakan perannya ternyata masih cukup banyak kendala yang dihadapi. Berbagai

penelitian khususnya yang berhubungan dengan peran kader sudah dilakukan dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi para pelaksana program serta pengambil kebijakan agar kader dapat berperan secara optimal demi keberhasilan pembangunan.

Selama lebih dari tiga dasawarsa program KKB telah memberikan hasil yang menggembirakan terutama dalam meletakkan landasan yang kokoh bagi terwujudnya Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS). Selain itu pula program KKB ini telah menghadapi lingkungan strategis yang membawa dinamika perubahan pada organisasi atau lembaga yang menangani. Dinamika tersebut antara lain melalui hadirnya UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, era otonomi daerah, hadirnya UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal itu sedikit banyak berdampak pada dinamika kader IMP dalam menjalankan perannya sebagai agen program KKB di lini lapangan.

Berdasarkan kondisi tersebut serta masih minimnya kajian mengenai peran kader IMP dan program KKB maka penelitian mengenai peran yang dilakukan oleh kader IMP dalam program KKB serta kendala yang dihadapi, sangat penting untuk dilakukan. Dengan harapan penelitian ini memberikan gambaran tentang peran kader IMP dalam program KKB sesuai kondisi lingkungan yang dihadapi saat ini serta memberikan kontribusi positif bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

C. Kerangka Berpikir

Kebijakan publik merupakan salah satu dimensi administrasi publik. Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan (formulasi, implementasi, dan evaluasi).

Program KKB Nasional merupakan salah satu kebijakan publik yang bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan kebijakan kependudukan guna mendorong terlaksananya pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan kependudukan serta mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas melalui pelebagaan keluarga kecil bahagia sejahtera. Tujuan ini dapat dicapai melalui proses sinergi berbagai hal yaitu sumberdaya manusia, sarana, maupun prasarana.

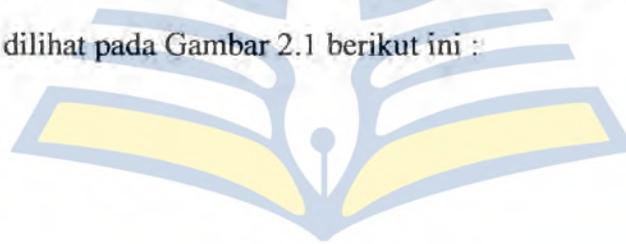
Hal ini memiliki makna bahwa untuk mencapai tujuan tersebut memerlukan dimensi administrasi publik yang lain yaitu manajemen publik. Manajemen publik merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing* dan *controlling* di satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik di sisi lain. Dengan kata lain manajemen publik juga merupakan proses menggerakkan SDM dan *non* SDM sesuai perintah kebijakan publik untuk mewujudkan terselenggaranya pelayanan publik secara efisien dan efektif.

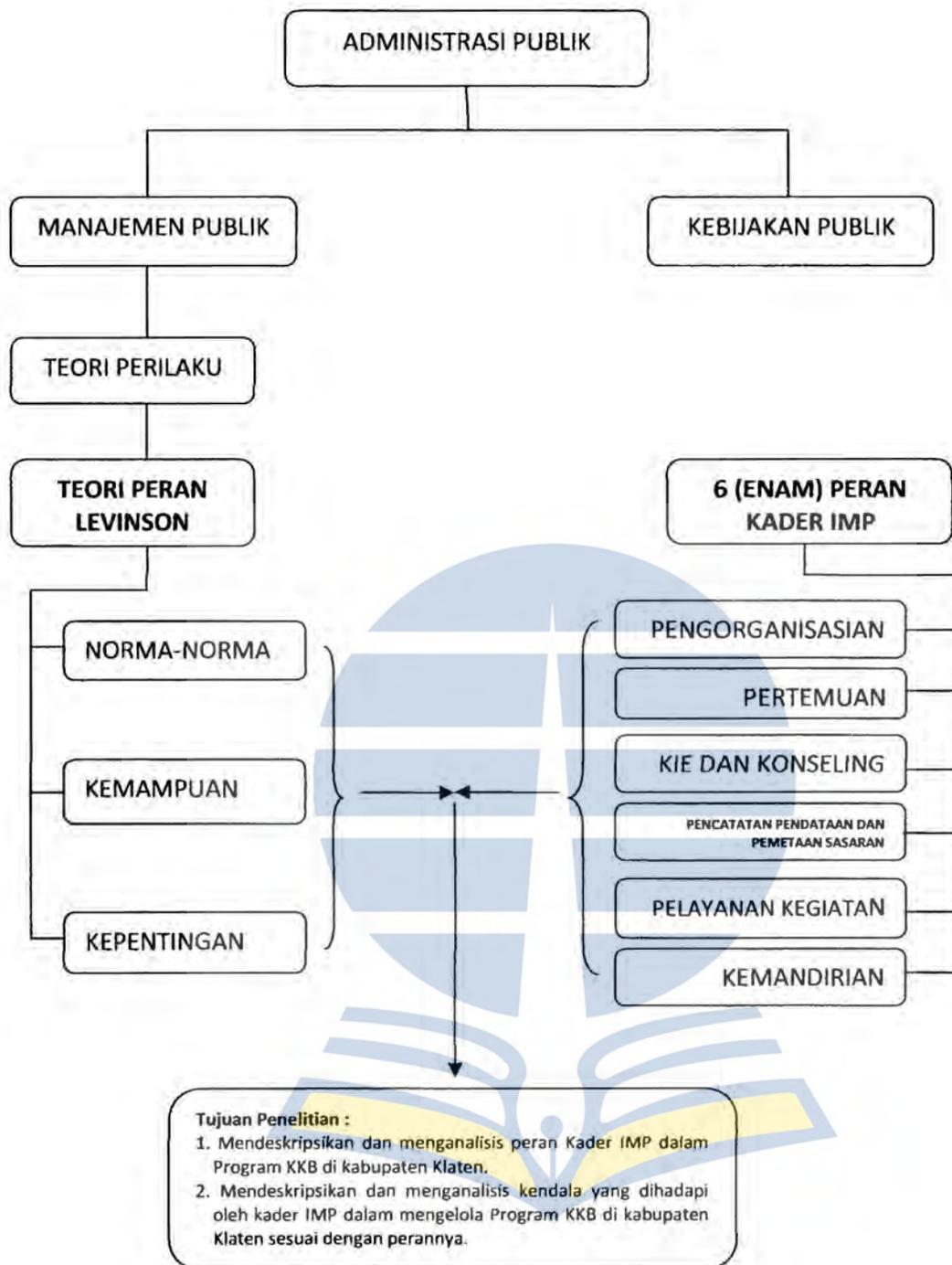
Kader IMP memiliki kontribusi yang besar dalam rangka pencapaian tujuan program KKB. Sebagai pengelola di tingkat lini lapangan yang berhadapan langsung dengan keluarga dan masyarakat, kader IMP diharapkan dapat melakukan penyuluhan dan pelayanan melalui 6 peran baktinya. Berdasarkan pada indikator yang ada, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan program KKB

di kabupaten Klaten masih jauh dari harapan. Hal itu antara lain disebabkan oleh kurang optimalnya IMP dalam menjalankan perannya sebagai kader program KKB.

Kajian mengenai peran kader IMP dalam program KKB merupakan domain manajemen publik yang berhubungan dengan sumberdaya manusia. Oleh karena itu diperlukan dasar teori yang berhubungan dengan peran kader IMP. IMP merupakan organisasi/lembaga pengelolaan program KKB yang terdiri dari para kader dari tingkat desa, RW, dan RT. Sedangkan peran kader IMP merupakan bagian dan sangat dipengaruhi oleh perilaku baik secara individu maupun kelembagaan. Sehingga pengetahuan mengenai teori perilaku termasuk perilaku organisasi sangat diperlukan.

Selanjutnya dengan menggunakan pendekatan teori peran yang dikemukakan oleh Levinson dalam Sukanto (2009), peneliti berupaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai pelaksanaan peran kader IMP dalam program KKB di kabupaten Klaten serta kendala yang dihadapi. Sedangkan kerangka berpikir penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini :





Gambar 2.1
Kerangka Berpikir Penelitian Peran Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam Program Kependudukan Keluarga Berencana (KKB) di Kabupaten Klaten.

D. Operasionalisasi Konsep

Peran IMP dalam program KKB meliputi 6 pokok peran kader IMP yang meliputi : pengorganisasian, pertemuan, KIE dan konseling, pencatatan pendataan dan pemetaan sasaran, pelayanan kegiatan, dan kemandirian. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran kader IMP dalam program KKB di kabupaten Klaten menggunakan pendekatan teori peran yang dikemukakan oleh Levinson yang secara garis besar mencakup 3 aspek yaitu : norma-norma, kemampuan, dan kepentingan. Untuk selanjutnya penelitian dan pembahasan dari peran kader IMP tersebut dilakukan dengan operasionalisasi konsep sebagai berikut :

Tabel 2.1
Operasionalisasi Konsep Peran Kader IMP dalam Program KKB di Kabupaten Klaten dengan Pendekatan Teori Peran Levinson

No.	KONSEP		OPERASIONALISASI
	Varibel (Peran Kader IMP)	Aspek (Teori Peran Levinson)	Indikator
1	Pengorganisasian	Norma-norma	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan IMP dilakukan secara bertahap didahului dengan penyuluh kb melakukan konsultasi dengan kepala desa/kelurahan - Ada pengukuhan dan pemberian SK
		Kemampuan	<ul style="list-style-type: none"> - Kader IMP mampu untuk membentuk kepengurusan serta pembagian kerja - Kader IMP mampu menggerakkan kelompok kerja teknis dan kelompok kegiatan
		Kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengorganisasian sangat penting bagi kader IMP dalam pengelolaan program KKB
2	Pertemuan	Norma-norma	<ul style="list-style-type: none"> - Kader IMP melakukan pemberitahuan dan pengumuman tentang adanya pertemuan - Pertemuan dan konsultasi kepada penyuluh KB dan petugas lain dilaksanakan secara rutin oleh kader IMP secara berkala dan berjenjang

		Kemampuan	<ul style="list-style-type: none"> - Kader IMP mampu menyelenggarakan pertemuan secara rutin - Kader IMP mampu memanfaatkan pertemuan untuk menyampaikan informasi, pembinaan, evaluasi, pemecahan masalah, serta perencanaan kegiatan
		Kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan sangat penting bagi kader IMP dalam pengelolaan program KKB
3	KIE dan Konseling	Norma-norma	<ul style="list-style-type: none"> - KIE program KKB dilakukan dengan menghormati hak asasi manusia - Konseling dilakukan dengan langkah-langkah yang benar serta menjaga kerahasiaan klien/konseli - Melakukan konsultasi dan rujukan terhadap permasalahan KIE dan konseling kepada penyuluh KB dan petugas lain yang terkait
		Kemampuan	<ul style="list-style-type: none"> - Kader IMP mampu melakukan KIE dan konseling perorangan, dalam hal : keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, 8 fungsi keluarga, BKB, BKR, BKL, dan UPPKS - Kader IMP mampu melakukan KIE kelompok dan massa, dalam hal : keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, 8 fungsi keluarga, BKB, BKR, BKL, dan UPPKS - Kader IMP mampu melakukan konsultasi dan rujukan terhadap permasalahan KIE dan konseling - Kader IMP mampu menjalin kerjasama dengan tokoh masyarakat setempat
		Kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> - KIE dan konseling sangat penting bagi keberhasilan program KKB
4	Pencatatan Pendataan dan Pemetaan Sasaran	Norma-norma	<ul style="list-style-type: none"> - Pencatatan dan pelaporan dilakukan dengan menggunakan formulir yang baku dan dilaporkan secara rutin setiap bulan - Pendataan dan pemetaan dilakukan dengan kunjungan rumah (<i>door to door</i>) - Pendataan dan pemetaan di dahului dengan pelatihan di tingkat kecamatan dan desa - Hasil Pendataan Keluarga dilaporkan kepada pemerintahan desa dan penyuluh KB secara berjenjang
		Kemampuan	<ul style="list-style-type: none"> - Kader IMP mampu melakukan

			<p> pencatatan dan pelaporan secara baku dan rutin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kader IMP mampu melaksanakan pendataan keluarga, rekapitulasi, membuat peta keluarga dan melaporkan hasil pendataan keluarga secara berjenjang - Kader IMP mampu memanfaatkan hasil pendataan dan pemetaan sasaran
		Kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pendataan dan pemetaan serta hasilnya sangat penting bagi kader IMP untuk melakukan intervensi kegiatan-kegiatan program KKB
5	Pelayanan Kegiatan	Norma-norma	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan terhadap calon peserta KB dilakukan dengan prosedur yang baku - Pelayanan kegiatan secara perseorangan maupun kelompok kegiatan dilakukan dengan materi yang baku
		Kemampuan	<ul style="list-style-type: none"> - Kader IMP mampu melakukan pembinaan, pendampingan, dan rujukan baik secara perorangan maupun kelompok dalam hal : pendewasaan usia perkawinan, kesehatan reproduksi, penanggulangan HIV/AIDS, PMS dan penyalahgunaan NAPZA, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, serta pemberdayaan ekonomi keluarga
		Kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> - Peran pelayanan kegiatan sangat penting bagi masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan terhadap pelayanan program KKB
6	Kemandirian	Norma-norma	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya kemandirian yang dilakukan oleh kader IMP dilakukan melalui iuran, jimpitan, dan penjualan produk setempat yang tidak memberatkan anggotanya serta warga masyarakat
		Kemampuan	<ul style="list-style-type: none"> - Kader IMP mampu meningkatkan kemandirian kelompok serta mengkoordinir upaya kemandirian melalui iuran, jimpitan, dan penjualan produk setempat - Kader IMP mampu untuk meningkatkan kemandirian dalam penyuluhan dan pelayanan program KKB - Kader IMP mampu untuk memanfaatkan peluang usaha

			ekonomi produktif melalui program pemberdayaan ekonomi
		Kepentingan	- Upaya kemandirian yang dilakukan kader IMP sangat penting bagi warga masyarakat dalam upaya peningkatan kemandirian kelompok dan peningkatan kesejahteraan keluarga



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Obyek Penelitian

Obyek penelitian pada dasarnya adalah hal yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, obyek penelitian juga dapat disebut sebagai fokus penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah peran kader IMP dalam program KKB. Peran kader IMP yang lebih dikenal dengan 6 Pokok Peran Bakti Kader IMP terdiri dari : pengorganisasian, pertemuan, KIE dan konseling, pencatatan pendataan dan pemetaan sasaran, pelayanan kegiatan, dan kemandirian.

Sedangkan lokasi penelitian merupakan obyek penelitian di mana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Klaten serta mengambil sampel yang terdiri dari 2 kecamatan yaitu kecamatan Kemalang dan Klaten Utara.

Pemilihan kecamatan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa meskipun secara umum kondisi kader relatif homogen, namun menurut data hasil pendataan keluarga tahun 2015 salah satu indikator program KKB yaitu tingkat pemakaian kontrasepsi di kecamatan Kemalang adalah yang tertinggi serta berada di wilayah pedesaan, sedangkan kecamatan Klaten Utara adalah yang terendah serta di berada wilayah perkotaan. Dengan metode tersebut diharapkan dapat diperoleh data yang representatif sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi yang obyektif mengenai peran kader IMP dalam program KKB di kabupaten Klaten.

B. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah bagian dari metode penelitian yang berisikan uraian mengenai pendekatan penelitian yang dipilih. Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian peran kader IMP dalam program KKB di kabupaten Klaten, yang lebih mengutamakan pada masalah proses dan makna, maka pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni pendekatan penelitian yang berkaitan dengan tujuan penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara secara mendalam (*in-depth interview*).

C. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

Untuk mengetahui dari mana data diperoleh, maka perlu ditentukan sumber data penelitian sesuai dengan tujuan diadakannya penelitian. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh (Arikunto, 2002).

Sumber Data dalam penelitian ini berupa :

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yaitu orang yang dipandang mempunyai pengetahuan atau informasi mengenai suatu hal atau peristiwa tertentu. Kualifikasi tersebut dimiliki oleh orang yang bersangkutan baik karena kedudukannya sebagai orang yang berwenang pada jabatan tertentu maupun karena kegiatannya dalam proses di bidang yang bersangkutan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kader IMP, kepala seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DissosP3AKB) kabupaten Klaten, koordinator dan penyuluh KB, dan warga masyarakat di kecamatan Kemalang dan Klaten Utara. Penentuan informan dilakukan dengan cara *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Di samping itu data primer dalam penelitian ini juga diperoleh melalui observasi (pengamatan) terhadap pelaksanaan peran kader IMP dalam program KKB di kabupaten Klaten.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui telaah buku pegangan kader IMP, pencatatan dan pelaporan kegiatan yang berhubungan dengan peran kader IMP, serta dokumentasi pelaksanaan peran bakti IMP di kecamatan Kemalang dan Klaten Utara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumen resmi mengenai kebijakan yang berhubungan dengan peran kader IMP yang diperoleh dari DissosP3AKB Kabupaten Klaten serta dokumen dari Badan Pusat Statistik kabupaten Klaten.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dimana pedoman wawancaranya telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu mempersiapkan garis besar pertanyaan yang menyangkut hal-hal pokok sebagai pedoman pelaksanaan. Selain itu, sebelum menentukan pedoman wawancara yang akan digunakan

peneliti terlebih dahulu mengujikan instrumennya. Dari hasil uji instrumen yang telah dilakukan, maka ada beberapa pedoman yang harus diubah yaitu ada penambahan dan pengurangan di dalamnya.

2. Observasi

Menurut Cresswell (2010) bahwa observasi dalam penelitian kualitatif merupakan observasi yang di dalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan partisipasi moderat dan terus terang yang berarti peneliti memelihara suatu keseimbangan antara menjadi orang dalam dan orang luar, serta menyatakan dengan terus terang kepada pihak yang diamati bahwa ia melakukan pengamatan dalam kaitannya dengan penelitian yang dilakukan. Pengamatan dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan lokasi penelitian. Hal-hal yang di observasi dalam penelitian ini adalah pelaksanaan peran kader IMP dalam program KKB di kabupaten Klaten.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dilakukan yaitu untuk memperoleh data sekunder guna melengkapi data yang belum diperoleh melalui teknik wawancara dan observasi. Hasil dokumentasi ini disusun menjadi data sekunder yang digunakan untuk melengkapi data primer hasil wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan buku pegangan kader IMP, pencatatan dan pelaporan kegiatan yang berhubungan dengan peran kader IMP, dokumentasi pelaksanaan peran kader IMP di kecamatan Kemalang dan Klaten Utara. Peneliti juga menggunakan dokumen resmi mengenai kebijakan yang berhubungan dengan

peran kader IMP yang diperoleh dari DissosP3AKB Kabupaten Klaten serta dokumen dari Badan Pusat Statistik kabupaten Klaten.

E. Metode Analisis Data

Sebagai rangkaian suatu kegiatan penelitian, tahap analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan langkah yang berisikan kegiatan sistematis untuk membangun kaitan antar data penelitian dalam upaya membentuk makna yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, analisis data akan bermula dari kegiatan pemrosesan atau pengkristalisasi data agar paling tidak terbangun dua, hal, yakni tersedianya data yang relevan dan mudahnya untuk menginterpretasikan makna dari data yang tersedia.

1. Validitas Data

Untuk menjamin validitas data yang akan dikumpulkan, peneliti menggunakan teknik *informant review* atau umpan balik dari informan. Selain itu peneliti juga menggunakan teknik triangulasi untuk lebih memvalidkan data. Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi teori. *Pertama*, triangulasi sumber, yakni mengumpulkan data sejenis dari beberapa sumber data yang berbeda. Dalam hal ini, untuk memperoleh data tentang persepsi masyarakat terhadap peran kader IMP, dikumpulkan dari hasil wawancara dengan informan. *Kedua*, triangulasi metode, yakni mengumpulkan data yang sejenis dengan menggunakan teknik atau pengumpulan data yang berbeda. Dalam hal ini untuk memperoleh data, maka digunakan beberapa sumber dari hasil wawancara dan observasi. *Ketiga*, triangulasi teori untuk menginterpretasikan data yang sejenis yang diperoleh dari penelitian terdahulu.

2. Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2007), analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dengan berbagai sumber yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari hasil perolehan data, maka hasil penelitian dianalisis secara tepat dengan harapan agar kesimpulan yang diperoleh tepat pula.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Dalam model analisis ini, tiga komponen analisis yang berupa kondensasi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu proses yang berlanjut, berulang, dan terus-menerus hingga membentuk sebuah siklus. Dalam proses ini aktivitas peneliti bergerak di antara komponen analisis dengan pengumpulan data selama proses ini masih berlangsung. Selanjutnya peneliti hanya bergerak diantara tiga komponen analisis tersebut.

Menurut Miles dan Huberman (2014) di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga unsur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Dalam penelitian ini tiga unsur tersebut yang menjadi rujukan peneliti dalam melakukan analisis data, yaitu:

a. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati

keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya. Kondensasi data berlangsung selama penelitian berlangsung. Kondensasi data merupakan bagian dari analisis. Dengan demikian kondensasi data merupakan bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, menajamkan, membuang hal-hal yang tidak perlu dengan cara yang sedemikian rupa, sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Penyajian data (*Data Display*)

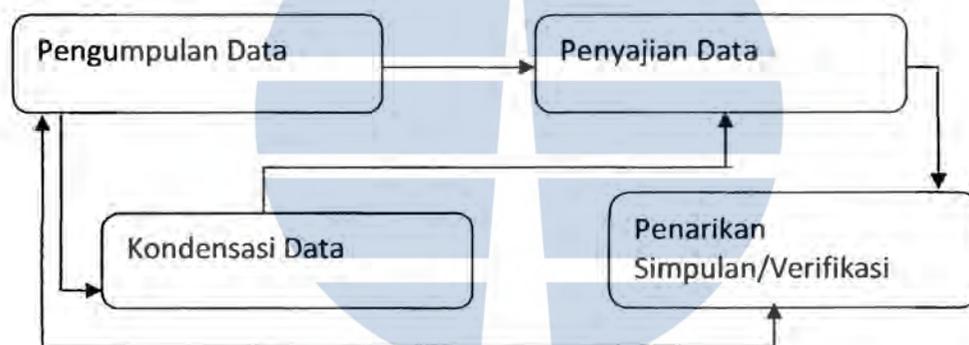
Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman. Selanjutnya, guna memberikan gambaran yang jelas dalam sajian data, maka perlu disusun dalam satu sajian yang baik dan jelas sistematikanya.

c. Penarikan Simpulan / Verifikasi.

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Simpulan akhir dalam proses analisis kualitatif ini akan ditarik setelah proses pengumpulan data berakhir. Simpulan yang ditarik akan diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali data yang diperoleh agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat. Sehingga kesimpulan yang diperoleh akan tepat.

Dengan demikian, model analisis interaktif dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut : Setelah dilakukan pengumpulan data, peneliti membuat kondensasi data dan sajian data sampai penyusunan kesimpulan. Artinya

data yang sudah didapat di lapangan ditindaklanjuti dengan menyusun pemahaman arti segala peristiwa yang ada dan diikuti penyusunan data yang berupa narasi secara sistematis. kondensasi dan sajian data ini disusun pada saat peneliti mendapatkan unit data yang diperlukan dalam penelitian. Setelah pengumpulan data berakhir, peneliti mulai melakukan usaha menarik kesimpulan dengan menarik verifikasi berdasarkan kondensasi dan sajian data. Jika permasalahan yang diteliti belum terjawab dan atau belum lengkap, maka peneliti akan melengkapi kekurangan tersebut di lapangan. Secara skematis proses analisis interaktif ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.1
Model Analisis Interaktif Milles dan Hubberman

Langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dengan metode tersebut adalah sebagai berikut :

1. Langkah pertama mengumpulkan data sesuai dengan tema, pengumpulan data ini yaitu mengenai peran kader IMP. Data tersebut diambil dari data kader IMP, DissosP3AKB, penyuluh KB, dan warga masyarakat. Pengumpulan data ini dilakukan dengan wawancara, observasi, serta dokumentasi.

2. Langkah kedua adalah kondensasi data, pada tahap ini peneliti memusatkan perhatian pada catatan lapangan yang terkumpul yaitu hal-hal yang berkaitan dengan penelitian peran kader IMP. Selanjutnya data yang terpilih disederhanakan dengan mengklarifikasikan data atas dasar tema-tema, memadukan data yang tersebar, menelusuri tema untuk merekomendasikan data tambahan, kemudian peneliti melakukan abstraksi kasar tersebut menjadi uraian singkat atau ringkasan.

Dalam tahap ini peneliti memisah-misahkan informasi dari subyek satu dengan lainnya, yaitu data yang diperoleh dari para informan. Di samping itu peneliti juga memisah-misahkan informasi tentang semua hal yang menyangkut aspek-aspek yang terdapat dalam peran kader IMP tersebut.

3. Langkah ketiga adalah penyajian data dari hasil penelitian yang dilakukan. Pada tahap ini peneliti melakukan penyajian informasi dari data, melalui bentuk naratif agar diperoleh penyajian data lengkap dari hasil pengumpulan data yang dilakukan. Dalam hal ini peneliti membuat teks naratif mengenai informasi yang diberikan informan. Informan terdiri dari kader IMP, kepala seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan DissosP3AKB kabupaten Klaten, koordinator dan penyuluh KB, serta warga masyarakat di Kecamatan Kemalang dan Klaten Selatan.

4. Langkah keempat adalah tahap kesimpulan, pada tahap ini peneliti melakukan uji kebenaran pada setiap data yang muncul dari data yang diperoleh dari para informan. Kesimpulan ini dibuat berdasarkan pada pemahaman terhadap data yang telah disajikan dan dibuat dalam pernyataan

singkat dan mudah dipahami dengan menguji pada pokok permasalahan yang diteliti.

5. Dalam penelitian ini empat tahap tersebut berlangsung secara bertahap dalam waktu yang sama. Sebagai bagian dari penerapan triangulasi maka penyesuaian hasil penelitian ini terpaksa dilakukan jika ditemukan fakta atau pemahaman baru yang lebih akurat. Data yang dipandang tidak memiliki relevansi dengan maksud penelitian akan dikesampingkan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum Kader IMP

Maaly Guimei (2001) memberikan identifikasi kader dengan istilah *community workers* (pekerja masyarakat). Dalam Jurnal Internasional “*Community Workers as Extension of Nursing Personnel*” disebutkan :

Community workers are the principal workers who provide community-based services. A community worker is a woman who is a volunteer leader selected from the village, is offered suitable training, serves as a link between the people and health services, conducts health education in family affairs and family planning, and mobilizes community development activities for the communities she serves. In Arabic, the word for community worker is Raidat Rifiat. The roles of community workers in health promotion overlap with some aspects of nursing roles, particularly in relation to providing information and raising people's awareness about health. Dijelaskan bahwa : “pekerja masyarakat adalah para pekerja utama yang menyediakan layanan berbasis masyarakat. Pekerja masyarakat adalah seorang wanita sebagai seorang pemimpin sukarelawan yang dipilih dari desa, ditawarkan pelatihan yang sesuai, berfungsi sebagai jaringan antara masyarakat dan layanan kesehatan, melakukan pendidikan kesehatan dalam urusan keluarga dan keluarga berencana, dan memobilisasi kegiatan pengembangan masyarakat untuk komunitas yang dia layani. Dalam bahasa Arab, kata untuk pekerja masyarakat adalah *Raidat Rifiat*. Peran pekerja masyarakat di promosi kesehatan tumpang tindih dengan beberapa aspek peran keperawatan, khususnya terkait dengan memberi informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan.”

Gunawan dan Sutejo (1980) memberikan batasan tentang kader kesehatan bahwa kader kesehatan dinamakan juga promotor kesehatan desa (prokes) adalah tenaga sukarela yang dipilih oleh dari masyarakat dan bertugas mengembangkan masyarakat. Secara umum istilah kader kesehatan yaitu kader-kader yang dipilih oleh masyarakat menjadi penyelenggara posyandu. Selanjutnya Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Depkes (1995) memberikan batasan kader sebagai berikut,

kader adalah warga masyarakat setempat yang dipilih dan ditunjuk oleh masyarakat dan dapat bekerja secara sukarela.

Sedangkan BKKBN (2013) memberikan batasan bahwa kader adalah orang dewasa, baik pria maupun wanita yang dipandang sebagai orang-orang yang memiliki kelebihan di masyarakat sekitarnya. Kelebihan itu dapat berupa keberhasilan dalam kegiatan, keluwesan dalam hubungan kemanusiaan, status sosial ekonomi dan lain sebagainya.. Proses pemilihan kader hendaknya melalui musyawarah melalui masyarakat dan para pamong desa harus juga mendukung, persyaratan umum yang harus di pertimbangkan untuk pemilihan kader antara lain dapat baca, tulis dengan bahasa Indonesia, secara fisik dapat melaksanakan tugas sebagai kader, mempunyai penghasilan sendiri, aktif dalam kegiatan sosial maupun pembangunan desanya, dikenal masyarakat dan dapat bekerja sama dengan masyarakat, berwibawa, sanggup membina paling sedikit 10 kepala keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Zulkifli (2003) memberikan batasan bahwa kader adalah peran serta masyarakat setempat yang dipilih dan ditinjau oleh masyarakat dan dapat bekerja secara sukarela. Selanjutnya untuk dapat menjadi kader persyaratannya adalah dapat membaca dan menulis dengan bahasa Indonesia, secara fisik dapat melaksanakan tugas-tugas sebagai kader, berwibawa, mempunyai penghasilan sendiri dan tinggal tetap di desa yang bersangkutan. Selain itu kader yang dipilih adalah orang-orang yang aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial maupun pembangunan desanya, serta dikenal masyarakat dan dapat bekerjasama dengan masyarakat serta kader lainnya.

Pendapat lain dikemukakan oleh Mantra (1997), mengenai persyaratan menjadi seorang kader antara lain berasal dari masyarakat setempat, tinggal di desa tersebut, tidak sering meninggalkan tempat untuk waktu yang lama, diterima oleh masyarakat setempat, masih cukup waktu bekerja untuk masyarakat di samping mencari nafkah, sebaiknya yang bisa baca tulis.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kader adalah tenaga yang berasal dari masyarakat, dipilih oleh masyarakat itu sendiri dan bekerja secara sukarela untuk membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kriteria pemilihan kader antara lain adalah sanggup bekerja secara sukarela, mendapat kepercayaan dari masyarakat, mempunyai kredibilitas yang baik dimana perilakunya menjadi panutan masyarakat, memiliki jiwa pengabdian yang tinggi, mempunyai penghasilan yang tetap, pandai baca tulis, dan sanggup membina masyarakat.

Sedangkan definisi institusi masyarakat pedesaan (IMP) adalah wadah pengorganisasian dan pembinaan keluarga serta wadah pengelolaan dan pembinaan Program KB Nasional di tingkat desa kebawah. Wadah tersebut secara nasional disebut PPKBD di tingkat desa/kelurahan, sub PPKBD di tingkat dusun/RW, dan kelompok KB di tingkat RT (BKKBN, 2014).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran kader institusi masyarakat pedesaan (IMP) merupakan status (kedudukan) seseorang dalam institusi/masyarakat yang dengan sukarela melakukan pengelolaan dan pembinaan program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) di tingkat desa ke bawah.

Untuk membantu pelaksanaan berbagai kegiatan dalam program KKB, institusi masyarakat pedesaan (PPKBD, sub PPKBD, Kelompok KB) mempunyai 6 (enam) peran (BKKBN, 2014). Peran tersebut sering disebut dengan peran bantu atau peran bakti IMP meliputi:

a. Pengorganisasian

IMP sebagai wadah berbagai kegiatan di tingkat Desa/Kelurahan dibawah memerlukan kepengurusan. Kepengurusan IMP diupayakan dikembangkan dari kepengurusan tunggal menjadi kepengurusan kolektif. Kepengurusan kolektif dimaksudkan dalam rangka pembentukan kepengurusan dan pembagian kerja dalam menjalankan peran baktinya. Dalam kepengurusan tunggal biasanya berfungsi sebagai koordinator, hal ini hanya dapat dilakukan pada institusi PPKBD sesuai kondisi wilayah. Untuk sub PPKBD dan kelompok KB diharapkan kepengurusan bersifat kolektif antara lain terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi, dan anggota.

Mengingat kemampuan IMP dalam mengelola program KKB, maka perlu mengintegrasikan kegiatan-kegiatan tersebut ke dalam 10 seksi di LKMD dan dilengkapi dengan tokoh-tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh ekonomi, dan lain-lain) bersama petugas lapangan keluarga berencana (penyuluh KB/PLKB) untuk menggerakkan kelompok kerja teknis (pokjanis) dan kelompok kerja kegiatan (poktan).

b. Pertemuan

Pertemuan rutin yang dilaksanakan IMP baik antar pengurus institusi, konsultasi pengurus dengan penyuluh KB/PLKB maupun dengan petugas lain

yang terkait, secara berkala dan berjenjang. Pertemuan ini merupakan wadah untuk penyampaian informasi/data, bimbingan pembinaan, evaluasi, pemecahan masalah, dan perencanaan kegiatan program KKB di tingkat lini lapangan.

c. KIE dan Konseling

IMP melakukan kegiatan penyuluhan, motivasi, dan konseling program KKB untuk :

- 1) Mendorong peningkatan kesertaan masyarakat dalam ber KB yang semakin mandiri dan lestari.
- 2) Mendorong peran serta dan kepedulian masyarakat untuk memberikan perhatian kepada kesehatan dan keselamatan ibu dan keluarganya.
- 3) Meningkatkan kesadaran dan kepedulian keluarga terhadap kesehatan reproduksi dalam rangka membina keharmonisan keluarga.
- 4) Meningkatkan ketahanan keluarga yang meliputi aspek keagamaan, pendidikan, social budaya, cinta kasih, dan kepedulian dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang bahagia sejahtera.
- 5) Meningkatkan kesadaran keluarga tentang perlunya menerapkan pola asuh anak dengan memperhatikan tumbuh kembang anak balita secara optimal.
- 6) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan keluarga lansia dan keluarga yang memiliki anggota keluarga berusia 60 tahun ke atas dalam pengembangan, pengasuhan, perawatan, dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya.

- 7) Meningkatkan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan orang tua dan anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang anak dan remaja secara seimbang melalui komunikasi efektif antara orang tua dan anak remaja.
- 8) Mendorong keluarga agar mau dan mampu meningkatkan pendapatan keluarga melalui pemberdayaan ekonomi keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera.

d. Pencatatan Pendataan dan Pemetaan Sasaran

yaitu:

- 1) IMP melakukan pencatatan kegiatan secara rutin dan ikut melaksanakan pendataan keluarga yang dilakukan satu tahun sekali.
- 2) Bersama penyuluh KB/PLKB membuat dan melakukan pemetaan sasaran (demografi, tahapan KS, PUS, dan lain sebagainya).
- 3) IMP juga diharapkan mampu memanfaatkan hasil pendataan dan peta sasaran bagi kepentingan pembinaan di tingkat wilayahnya dan menuangkan ke dalam peta PUS yang dibuat.
- 4) Melakukan intervensi kegiatan-kegiatan di desanya berdasarkan peta PUS yang dibuat.

e. Pelayanan Kegiatan

berkaitan dengan :

- 1) Pendewasaan usia perkawinan, antara lain usia ideal bagi pria dan wanita untuk menikah (25 dan 21 tahun), kesehatan reproduksi, penanggulangan HIV/AIDS dan penyakit seksual menular lainnya, penyalahgunaan NAPZA dan lain sebagainya.

- 2) Pengaturan kelahiran antara lain, pemakaian alat kontrasepsi sesuai umur dan kondisi kesehatan ibu, jumlah anak, jarak kelahiran, dan umur anak terkecil.
- 3) Pembinaan ketahanan keluarga, antara lain melalui BKB, BKR, dan BKL.
- 4) Peningkatan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan ekonomi keluarga melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) atau kegiatan ekonomi produktif lainnya.

f. Kemandirian

Upaya-upaya kemandirian yang dilakukan oleh IMP meliputi kemandirian dalam pengelolaan kegiatan antara lain :

- 1) Mengupayakan penyediaan alat kontrasepsi ulang (kondom dan pil).
- 2) Pendanaan kelompok melalui iuran, jimpitan dan penjualan produk setempat.
- 3) Mendorong kemandirian kelompok kegiatan (poktan) dalam memfasilitasi pelayanan KB.

Kader IMP terdiri dari PPKBD (SKD/sub klinik desa/tingkat desa) , sub PPKBD (PKB RW/tingkat RW), dan kelompok KB (PKB RT/tingkat RT).

Jumlah kader IMP se kabupaten Klaten dapat dilihat dalam Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Jumlah Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Menurut Kecamatan
di Kabupaten Klaten Tahun 2015

No	Kecamatan	PPKBD	SUB PPKBD	KELOMPOK KB
1	Prambanan	16	133	352
2	Gantiwarno	16	127	307
3	Wedi	19	189	443
4	Bayat	18	161	451
5	Cawas	20	207	500
6	Trucuk	18	197	488
7	Kalikotes	7	94	290
8	Kebonarum	7	70	170
9	Jogonalan	18	106	447
10	Manisrenggo	16	171	432
11	Karangnongko	14	142	332
12	Ngawen	13	125	332
13	Ceper	18	166	470
14	Pedan	14	142	406
15	Karangdowo	19	151	377
16	Juwiring	19	145	386
17	Wonosari	18	137	373
18	Delanggu	16	110	338
19	Polanharjo	18	109	252
20	Karanganom	19	137	292
21	Tulung	18	142	356
22	Jatinom	18	181	488
23	Kemalang	13	108	289
24	Klaten Selatan	12	131	337
25	Klaten Tengah	9	99	329
26	Klaten Utara	8	95	289
	Jumlah	401	3.675	9.529

Sumber : Klaten Dalam Angka Tahun 2016, BPS Kabupaten Klaten.

Dari tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa apabila dibandingkan dengan jumlah desa, RW, dan RT yang ada. Maka dapat dikatakan bahwa dari seluruh desa, RW, dan RT yang ada sudah memiliki kader IMP. Hal ini merupakan potensi bagi keberhasilan program KKB di kabupaten Klaten.

2. Program KKB di Kabupaten Klaten

a. Pengelolaan Program KKB di Kabupaten Klaten.

Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) yaitu Program yang bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan kebijakan kependudukan guna mendorong terlaksananya pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan kependudukan serta mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelebagaan keluarga kecil bahagia sejahtera. (BKKBN, 2013).

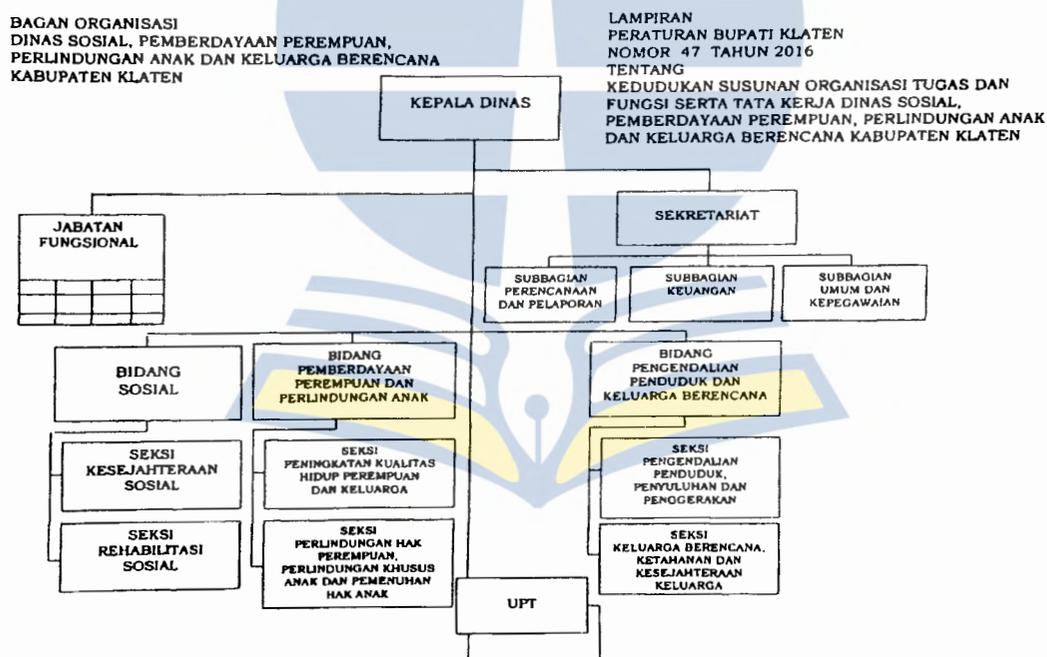
Era otonomi daerah telah membawa perubahan pada kelembagaan/ organisasi yang menangani program KKB di tingkat kabupaten dan kota. Bentuk dan nama kelembagaannya pun berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Ada yang berbentuk Dinas, Badan dan Kantor.

Di kabupaten Klaten berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Klaten Nomor 29 Tahun 2008, organisasi yang menangani program KKB bernama Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Kantor PP dan KB). Sedangkan mengenai tugas fungsi dan tata kerjanya diatur dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 60 Tahun 2008.

Perubahan tersebut juga berakibat pada perubahan struktur organisasi tingkat kecamatan di kabupaten Klaten. Kalau sebelumnya organisasi yang menangani program KKB di tingkat kecamatan terdiri dari pengawas petugas lapangan keluarga berencana (PPLKB), staf PPLKB, dan penyuluh KB/PLKB berubah menjadi hanya kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari beberapa orang penyuluh KB yang dalam menjalankan tugasnya secara struktural bertanggung jawab langsung kepada kepala Kantor PP dan KB. Dari beberapa

penyuluh KB ditunjuk satu orang diberikan tugas sebagai koordinator penyuluh KB di tingkat kecamatan.

Seiring dengan perjalanan waktu, terjadi perubahan organisasi perangkat daerah (OPD) di kabupaten Klaten. Pada tanggal 5 Desember 2016 pemerintah kabupaten Klaten menerbitkan Peraturan Bupati Klaten No. 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten. Maka sejak saat itu pengelolaan Progam KKB secara teknis ditangani oleh dinas tersebut. Berikut ini adalah susunan organisasinya :



Sumber : Peraturan Bupati Klaten No. 47 Tahun 2016

Gambar 4.1

Bagan Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

Dari Gambar 4.1 dapat dijelaskan bahwa pengelolaan program KKB lebih khusus berada di bawah koordinasi dari dari bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang memiliki 2 seksi yaitu seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan serta seksi Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga.

Di samping itu dari bagan struktur di atas dapat diketahui pula bahwa sebenarnya ada unit pelaksana teknis (UPT) yang merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, namun sampai sekarang belum terbentuk. Dijelaskan dalam peraturan bupati tersebut bahwa ketentuan mengenai UPT akan diatur dan ditetapkan dengan peraturan bupati tersendiri.

Dengan demikian pengelolaan program KKB di tingkat kecamatan ke bawah dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional yang tidak lain adalah para penyuluh KB. Dari penyuluh KB yang ada di kecamatan ditunjuk seorang penyuluh KB senior sebagai koordinator penyuluh KB. Hal ini berarti pengelolaan program KKB di tingkat kecamatan tidak ada perubahan berkaitan dengan terbitnya peraturan bupati tersebut.

Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat penyuluh KB, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi, dan pengembangan Keluarga Berencana Nasional. (BKKBN,2008). Sedangkan dalam melaksanakan tugas tersebut diperinci melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang terangkum dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang dibuat setiap tahun.

Saat ini jumlah PKB yang terdiri dari koordinator Penyuluh KB dan penyuluh KB di kabupaten Klaten sebanyak 60 orang, yang diberikan tugas dalam pengelolaan program KKB di 26 kecamatan yang terdiri dari 401 desa/kelurahan. Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya di tingkat desa ke bawah penyuluh KB dibantu oleh para kader IMP yang memiliki peran dalam membantu keberhasilan program KKB yang lebih dikenal dengan 6 peran bakti IMP yang terdiri dari : pengorganisasian, pertemuan, KIE dan konseling, pencatatan pendataan dan pemetaan sasaran, pelayanan kegiatan, dan kemandirian.

b. Pencapaian Program KKB di Kabupaten Klaten.

Berdasarkan hasil pendataan keluarga Tahun 2015 diketahui tingkat pemakaian kontrasepsi/*contraceptive prevalence rate* (CPR). Dari jumlah pasangan usia subur (PUS) yang ada sebanyak 200.353 yang menjadi peserta KB Aktif sebanyak 138.859 peserta atau CPR mencapai 69,31 %. Data tersebut apabila dibandingkan dengan hasil pemutakhiran data keluarga Tahun 2014 yang mencapai 77,05 %, maka dapat diketahui bahwa tingkat pemakaian kontrasepsi mengalami penurunan sebesar 7,74%. Tingkat pemakaian kontrasepsi pada tiap kecamatan di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2
Tingkat Pemakaian Kontrasepsi Kabupaten Klaten
Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah PUS	Jumlah Peserta KB Aktif	CPR
1	Prambanan	8.183	6.030	73.69
2	Gantiwarno	6.178	4.338	70.22
3	Wedi	7.544	4.777	63.32
4	Bayat	10.474	7.171	68.46
5	Cawas	9.067	6.243	68.85
6	Trucuk	12.070	7.450	61.72
7	Kalikotes	5.830	3.937	67.53
8	Kebonarum	2.677	1.859	69.44
9	Jogonalan	9.377	6.323	67.43
10	Manisrenggo	7.284	5.045	69.26
11	Karangnongko	5.548	4.014	72.35
12	Ngawen	7.185	4.883	67.96
13	Ceper	10.287	6.959	67.65
14	Pedan	7.300	5.240	71.78
15	Karangdowo	7.105	5.019	70.64
16	Juwiring	9.599	6.593	68.68
17	Wonosari	10.268	7.405	72.12
18	Delanggu	6.591	4.914	74.56
19	Polanharjo	6.379	4.706	73.77
20	Karanganom	7.105	5.050	71.08
21	Tulung	8.815	6.084	74.33
22	Jatinom	10.031	7.423	74.00
23	Kemalang	6.615	5.213	78.81
24	Klaten Selatan	6.546	4.231	64.63
25	Klaten Tengah	5.637	3.546	62.91
26	Klaten Utara	7.288	4.406	60.46
	Jumlah	200.353	1387.859	69.31

Sumber : Analisis Pendataan Keluarga Tahun 2015 Kabupaten Klaten,
Kantor PP dan KB Kabupaten Klaten.

Selain itu dari pendataan tersebut diketahui bahwa jumlah jiwa dalam keluarga sebanyak 1.194.237 orang, terdiri laki-laki berjumlah 593.901 orang (49,73 %) dan perempuan sebanyak 600.336 orang (50,27 %). Sedangkan

jumlah kepala keluarga yang ada dan di data sebanyak 385.960 KK, hal ini berarti besarnya rata-rata jiwa dalam keluarga sebanyak 3,094 atau 3 sampai 4 orang tiap keluarga. Namun berdasarkan analisis dampak program KKB dalam laporan tahunan Kantor PP dan KB Tahun 2016 dapat diketahui bahwa *Total Fertility Rate* (TFR) masih menunjukkan angka 2,3. TFR menunjukkan tingkat kemampuan seorang ibu untuk melahirkan dalam masa reproduksinya. Jadi TFR 2,3 dapat dikatakan masih cukup tinggi bila dibandingkan dengan target TFR Program KKB secara nasional yang sebesar 2,1. Sesuatu yang masih perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan program KKB di kabupaten Klaten.

3. Deskripsi Informan

Sesuai dengan fokus dalam penelitian ini yaitu mengenai peran kader IMP dalam Program KKB maka peneliti berusaha menggali dari beberapa informan yang berhubungan dengan peran kader IMP. Informasi yang didapat dari pengumpulan data akan sangat membantu peneliti dalam melakukan analisis.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan informan yang berasal dari dua kecamatan yaitu Klaten Utara dan Kemalang serta informan dari DissosP3AKB Kabupaten Klaten untuk dijadikan sampel yang dianggap representatif dari populasi yang ada. Jumlah informan sebanyak 15 orang. Data informan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Identitas Informan Menurut Asalnya

Informan dari Kader IMP				
No	Nama	Usia (Tahun)	Pendidikan	Jabatan
1	Muryati	66	D III	PPKBD Kelurahan Gergunung, Kecamatan Klaten Utara
2	Sunarni	54	SLTA	PPKBD Desa Kemalang, Kecamatan Kemalang
3	Warsini	45	SD	Sub PPKBD RW 09 Kelurahan Gergunung
4	Itawati	42	SLTA	Sub PPKBD RW 04 Desa Kemalang
5	Ratna	50	SLTA	Kelompok KB RT 03 RW 09 Kelurahan Gergunung
6	Suratmi	39	SLTP	Kelompok KB RT 14 RW 04 Desa Kemalang
Informan dari DissosP3AKB				
1	Nuryanti, SKM.	50	S 1	Kasi Pengendalian Penduduk penyuluhan dan Penggerakan DissosP3AKB Kabupaten Klaten
Informan dari Koordinator dan Penyuluh KB				
1	Drs. Wagino, MM.	50	S 2	Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Klaten Utara
2	Dra. Suryatmi	50	S 1	Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Kemalang
3	Nisa Nursita, SE	37	S 1	Penyuluh KB Kecamatan Klaten Utara
4	Supatmi	57	SLTA	Penyuluh KB Kecamatan Kemalang
Informan dari Warga Masyarakat				
1	Sumiyati	38	SLTA	Warga Masyarakat Dk. Gergunung RT 03 RW 09 Kelurahan Gergunung
2	Dwi Sriyani	46	SLTA	Warga Masyarakat Dk. Gergunung RT 03 RW 09 Kelurahan Gergunung
3	Sumini	34	SLTA	Warga Masyarakat Dk. Randuawar RT 13 RW 04 Desa Kemalang
4	Susi Susanti	22	SLTP	Warga Masyarakat Dk. Randuawar RT 12 RW 04 Desa Kemalang

Sumber : Data Primer yang diolah

Peneliti mengumpulkan data dari hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap beberapa pihak yang terlibat dalam penelitian tersebut. Melalui informasi yang didapatkan itu peneliti akan menemukan beberapa hal yang akan menjadi kajian dalam proses penelitian. Selanjutnya informasi akan didukung dengan data-data yang diperoleh di lapangan baik melalui observasi maupun dokumentasi.

4. Pendayagunaan Kader IMP di Kabupaten Klaten

a. Tingkat Kabupaten.

Pendayagunaan Kader IMP di kabupaten Klaten merupakan bagian dari Program KKB yang pengelolaannya di bawah koordinasi dari DissosP3AKB Kabupaten Klaten yang diberikan tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dalam melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana meliputi pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan serta keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dilaksanakan oleh kepala bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang memiliki 2 (dua) seksi yaitu seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan serta seksi Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Demikian juga dalam hal pendayagunaan kader IMP untuk tingkat kabupaten merupakan tugas dari bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan lebih khusus lagi pada seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan. Sedangkan untuk tingkat kecamatan adalah para penyuluh KB.

Agar kader IMP lebih berdayaguna maka salah satu langkah yang diambil adalah dengan melakukan pembinaan. Pembinaan terhadap kader IMP bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan para kader. Dan yang lebih penting hal ini merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap para kader IMP agar para kader IMP lebih peduli dan bersemangat lagi dalam

program KKB. Selain itu agar para kader IMP lebih aktif dan intensif lagi memberikan KIE bahkan sampai ke tingkat desa wisma sehingga dapat membantu masyarakat dalam memperoleh informasi khususnya dalam pelayanan KB.

Meskipun ada keterbatasan sumberdaya manusia dan anggaran namun DissosP3AKB berusaha mengoptimalkan pembinaan terhadap kader IMP di kabupaten Klaten. Berikut pernyataan dari ibu Nuryanti, SKM (kasi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan DissosP3AKB Kabupaten Klaten) :

Begini...karena kita ada keterbatasan SDM dan anggaran maka pembinaan dengan jalan mengumpulkan PPKBD se kabupaten Klaten kita laksanakan sebanyak 2 kali dalam se tahun, yang dikemas dalam acara Jambore / Temu Kader PPKBD serta refreshing dalam rangka hari Keluarga Nasional (Harganas) di tingkat kabupaten. Sedangkan bentuk pembinaan lainnya adalah dengan cara mengunjungi pertemuan PPKBD yang diselenggarakan di tingkat eks kawedanan, kemudian rapat koordinasi di tingkat kecamatan yang diikuti oleh kader PPKBD. Mendatangi kecamatan rata-rata dua kali setiap bulannya. Jadi pembinaan terhadap para kader IMP dari kabupaten memang baru menjangkau PPKBD. Di samping itu setiap tahun kita adakan lomba kader IMP dari kader PPKBD, sub PPKBD, dan PKB RT, kemudian juga mengirimkan kader IMP baik itu dalam acara jambore/temu kader di tingkat provinsi maupun eks karesidenan. (*Wawancara, tanggal 10 Mei 2017*).

Bentuk pendayagunaan kader lainnya adalah berupa pelatihan, namun hanya sebagian kecil saja kader yang dilatih, itupun biasanya terbatas bagi kader PPKBD serta kader kelompok kegiatan. Demikian juga dengan fasilitasi yang lain berupa blangko untuk pencatatan dan pelaporan, kemudian materi KIE yang berupa buku pedoman kader, poster, leaflet, KIE kit, BKB kit. Semuanya sudah ada namun jumlahnya sangat terbatas dan masih sangat kurang. Hal itu disebabkan oleh dukungan anggaran yang masih sangat kurang,

Dalam hal kemitraan, meskipun masih dalam bentuk kemitraan program KKB secara umum, namun sangat berkaitan dan sangat mendukung dalam upaya pendayagunaan kader IMP. DissosP3AKB selalu melakukan advokasi dan koordinasi. Advokasi dilakukan baik dengan pemerintah kabupaten, DPRD, dinas terkait, maupun organisasi dan tokoh masyarakat. Koordinasi dan komunikasi terus dilakukan bahkan jalinan kemitraan dengan mitra kerja serta sudah ada MoU (berlaku 3 tahun ke depan). Di samping itu sudah terbentuk Tim Pokja KB Kabupaten yang dikukuhkan dengan surat keputusan bupati Klaten.

Demikian juga bahwa dalam rangka penguatan program KKB di tingkat provinsi dan kabupaten di Jawa Tengah, Klaten merupakan salah satu kabupaten yang dipilih sebagai ajang program *My Choice* yang diselenggarakan atas kerjasama antara BKKBN dengan *John Hopkins Bloomberg School of Public Health* dan *Bill & Melinda Gates Foundation*. Kerjasama dilaksanakan dalam jangka waktu 3 tahun (Oktober 2014 s/d Oktober 2017). Program *My Choice* terdiri dari 5 konsorsium yaitu : *Demand Creation/Demand Generation* (John Hopkins), Penguatan Faskes untuk KB (JH Piego), Penguatan Distribusi Alkon (JSI), Penguatan Peran Swasta (DKT), Desentralisasi Monitoring dan Evaluasi (PMK-UGM), yang sangat berkaitan dengan pendayagunaan kader IMP, antara lain dengan penyelenggaraan pelatihan-pelatihan diikuti oleh kader IMP.

Namun, di sisi lain dukungan dari pemerintah desa dengan hadirnya Undang-undang No. 6 tentang Desa ternyata masih jauh dari harapan, karena sebagian besar belum optimal dalam mengakomodir terhadap program KKB.

Walupun sudah berusaha keras dengan jalan melakukan advokasi tapi hasilnya belum seperti yang diharapkan. Advokasi yang dilakukan melalui Dispermades, para camat, para pendamping desa, serta dibantu oleh program *My Choice* dengan menyusun pedoman alokasi anggaran program KKB dalam APBDesa. Namun hasilnya sampai saat ini sebagian besar desa masih kecil dukungannya untuk mengalokasikan anggaran APBDesa untuk program KKB.

Dalam hal peran kader IMP secara umum, berdasarkan wawancara dengan Ibu Nuryanti, SKM bahwa para kader IMP mempunyai semangat dan respon yang tinggi terhadap program KKB, namun dalam pelaksanaan peran kader IMP dinilai sedang-sedang saja. Berikut ini petikan wawancara :

Peran Kader IMP sangat bagus, mereka begitu responsif terhadap program. Pada saat pelaksanaan pelayanan KB serta pameran-pameran pada even-even tertentu, dapat kita lihat bahwa kader IMP begitu antusias dan bersemangat dalam mensukseskan program KKB. Disamping itu mereka memiliki rasa ingin tahu yang besar dari program-program yang kita sampaikan.” (*Wawancara, tanggal 10 Mei 2017*). Namun dalam pelaksanaan perannya :

Secara umum kami menilainya sedang-sedang saja, bahkan ada banyak yang masih kurang, mereka melaksanakan perannya hanya sekedar yang ia tahu. Kami pun maklum karena kader IMP ada beberapa yang usianya sudah lanjut, semangat ada namun kemampuannya sangat terbatas. (*Wawancara, tanggal 10 Mei 2017*).

Beberapa faktor yang mendukung dalam upaya pendayagunaan kader IMP antara lain : Tingginya komitmen Pemerintah dalam Program KKB antara lain melalui terbitnya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, adanya jalinan kerjasama dan kesepakatan baik dengan lintas sektoral maupun dengan mitra kerja/swasta, kapabilitas pelaksana pembinaan yang cukup baik, jumlah kader yang banyak dari tingkat desa sampai dengan RT, serta semangat kader yang tinggi.

Sedangkan beberapa kendala yang ada berupa : Jumlah sumberdaya manusia yang masih kurang, baik yang berada di tingkat kabupaten maupun penyuluh KB, keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana dan prasarana, bentuk organisasi perangkat daerah (OPD), kemampuan kader yang masih kurang dan banyak kader terutama kader sub PPKBD dan kelompok KB yang kurang aktif, serta dukungan pemihakan alokasi anggaran APBDesa yang masih kurang.

Berdasarkan dokumen yang ada bahwa baik tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan jumlah SDM nya sangat kurang, karena harus membina kader IMP yang jumlahnya relatif besar. Untuk saat ini seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan DissosP3AKB kabupaten Klaten hanya berjumlah 4 personel. Sedangkan penyuluh KB yang tersebar di 26 kecamatan berjumlah 60 penyuluh yang harus membina 401 desa.

Dengan struktur OPD yang ada sekarang ini satu dinas urusannya lebih banyak yaitu meliputi sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta keluarga berencana sehingga program KKB menjadi kurang fokus. Semula memang ada harapan bahwa Program KKB dapat menjadi OPD tersendiri, namun karena kebijakan otonomi daerah berkaitan dengan anggaran yang kurang memadai maka harus bergabung dengan bidang yang lain. Sehingga di tingkat kecamatan pun masih tidak ada perkembangan. Pernah juga diusulkan ada UPT KB pada tiap eks kawedanan namun tidak disetujui.

Berbagai upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala dalam rangka pendayagunaan kader IMP antara lain dengan mengusulkan tambahan

penyuluh KB baru, penambahan anggaran, pemenuhan sarana dan prasarana, tambahan frekuensi pelatihan, advokasi yang lebih intensif.

b. Tingkat Kecamatan.

Sebagaimana pendayagunaan kader IMP yang dilakukan oleh DissosP3AKB di tingkat kabupaten, maka di tingkat kecamatan tugas tersebut dilakukan oleh koordinator penyuluh KB dan penyuluh KB. Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan terhadap koordinator penyuluh KB dan penyuluh KB di kecamatan Klaten Utara dan Kemalang, maka Pendayagunaan yang dilakukan antara lain melalui pembinaan, advokasi, pengiriman kader, dan fasilitasi. Bapak Drs. Wagino, MM (koordinator penyuluh KB kecamatan Klaten Utara) menyampaikan :

Pembinaan dilakukan secara rutin setiap bulan bersamaan dengan pertemuan bulanan di tingkat kecamatan. Di samping kegiatan posdaya dimana ada simpan pinjam, tabungan, sosial. Pembinaan juga dilakukan dengan memanfaatkan pertemuan kader di tingkat desa/kelurahan dan kelompok kegiatan. Di samping itu untuk kegiatan pembinaan dan pelatihan di tingkat kabupaten, eks karesidenan, dan provinsi kami selalu mengirimkan. (*Wawancara, tanggal 3 Mei 2017*).

Demikian pula ibu Supatmi (PKB Kecamatan Kemalang) bahwa :

Pembinaan dilakukan baik di kecamatan maupun desa, juga saya lakukan advokasi kepada kepala desa agar ada honor bagi kader PPKBD. Pembinaan ke desa lewat PPKBD, PKB RW, PKB RT, serta pendekatan kepada ibu kepala desa (ketua TP PKK). (*Wawancara, tanggal 8 Mei 2017*).

Pembinaan terhadap PPKBD dilakukan setiap bulan di tingkat kecamatan melalui pertemuan rutin kader PPKBD se kecamatan. Pembinaan juga dilakukan dengan memanfaatkan pertemuan kader di tingkat desa baik kader PKK maupun kader posyandu dan kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, dan posyandu). Setiap tahun sekali ada pelatihan pendataan keluarga di tingkat kecamatan yang diikuti kader PPKBD.

Advokasi merupakan langkah penting untuk memperoleh dukungan dari pengambil kebijakan. Advokasi dilakukan oleh penyuluh KB dilakukan terhadap camat dan kepala desa agar kader IMP dapat memperoleh pemihakan berupa honor dari pemerintah desa. Di samping langkah tersebut juga melakukan pendekatan dan kemitraan dengan TP PKK desa serta bidan desa setempat. Sampai saat ini yang memperoleh honor baru kader PPKBD.

Kegiatan pengiriman kader untuk mengikuti pembinaan dan pelatihan dilakukan apabila ada perintah permintaan dari DissosP3AKB untuk mengirimkan kader. Pembinaan biasanya dilaksanakan di tingkat kabupaten, sedangkan pelatihan di tingkat provinsi yang memerlukan waktu yang lebih lama, sekitar 3-5 hari. Peserta pelatihan dari kader biasanya hanya PPKBD.

Dalam kondisi saat ini di mana jumlah penyuluh terbatas, maka peran kader terutama PPKBD sangat membantu dalam pelaksanaan tugas penyuluh KB. Mereka sekaligus menjadi pembina terhadap kader-kader di bawahnya yaitu kader PKB RW dan kelompok KB. Hasil yang diperoleh dari pembinaan di tingkat kecamatan akan disampaikan oleh kader PPKBD di tingkat desa melalui forum pertemuan kader, demikian juga kalau ada informasi-informasi di tingkat kecamatan.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan ibu Dra. Suryatmi (koordinator penyuluh KB kecamatan Kemalang) :

Dengan personil kami yang hanya berjumlah dua orang memang kami sangat membutuhkan para kader untuk mensukseskan program KB di kecamatan kemalang. Peran kader terutama PPKBD sangat membantu kami dalam menjalankan tugas-tugas kami terutama dalam mengajak calon peserta KB dan dalam pendataan keluarga. (*Wawancara, tanggal 8 Mei 2017*).

Dalam hal ini bapak Drs. Wagino, MM juga menyampaikan :

Setiap desa/kelurahan ada PPKBD sebagai koordinator kader yang ada di desa/kelurahan anggotanya terdiri dari kader PKB RW dan PKB RT serta kader-kader posyandu di wilayah setempat. Sebagai koordinator di desanya PPKBD melakukan tugas penyampaian informasi pembinaan juga melakukan koordinasi dan advokasi kepada kepala desa/kelurahan dan TP PKK desa. Sebagai ketua paguyuban PPKBD di kecamatan Klaten Utara adalah PPKBD kelurahan Gergunung. Dia mengkoordinir anggotanya yang berkaitan dengan program KB. Antara lain dalam koordinasi kader yang akan mengikuti pelatihan, bila ada pelayanan baik rutin maupun serentak. Pada tiap bulan saat pertemuan kader PPKBD, dia melaporkan baik secara lisan maupun tertulis. (*Wawancara, tanggal 3 Mei 2017*).

Sedangkan mengenai pelaksanaan 6 pokok peran IMP, bahwa beberapa peran sudah dilaksanakan oleh para kader IMP namun belum sesuai dengan yang diharapkan. Seperti hasil wawancara dengan ibu Dra. Suryatmi sebagai berikut :

Kader IMP belum memiliki SK dari kepala desa. Mereka dulu hanya ditunjuk untuk menjadi kader KB. Jadi belum ada susunan pengurus dan pembagian tugas. Sebagian PPKBD sudah melakukan pertemuan di tingkat desa dibarengkan dengan pertemuan PKK dan kader posyandu. Bila ada informasi yang berasal dari kecamatan disampaikan dalam forum pertemuan tersebut. Di samping itu PPKBD mendatangi pertemuan di tingkat RW dan RT. Biasanya dilaksanakan pada sore hari. Untuk KIE dan konseling dilakukan oleh baik kader PPKBD, sub PPKBD, maupun PKB RT. KIE baik kelompok maupun perorangan biasanya dilakukan pada saat posyandu (dalam KMS dituliskan KB nya apa ?). sedangkan kunjungan rumah jarang dilakukan. Untuk pendataan keluarga dilaksanakan oleh PPKBD, kader PKK, kader Posyandu, PKB RW, dan PKB RT. Prosesnya dilakukan sosialisasi dulu di tingkat kecamatan kemudian ditindaklanjuti di tingkat desa. Setelah selesai maka dibuat peta namun hanya sebagian yang membuat itu pun belum lengkap. Hasil pendataan dikumpulkan kepada PPKBD kemudian kepada penyuluh KB. Disamping itu hasil pendataan juga dilaporkan dan disosialisasikan di tingkat desa. Dalam hal pelayanan KB, pelayanan rujukan untuk kecamatan Kemalang hanya dilakukan pada calon akseptor KB MOP dan MOW, sedangkan untuk KB Implan dan IUD cukup dilaksanakan di KKB Puskesmas Kemalang dan KKB Sejahtera Tlogowatu. Sedangkan dalam kemandirian memang ada beberapa kelompok UPPKS namun masih terbatas pada usaha penjualan produk-produk usaha rumah tangga. (*Wawancara, tanggal 8 Mei 2017*).

Hal senada juga disampaikan oleh ibu Nisa Nursita, SE (penyuluh KB kecamatan Klaten Utara) :

Untuk wilayah binaan saya belum diberi SK dari Desa. Seluruhnya berbentuk perorangan. Pertemuan rutin dilakukan setiap bulan. KIE dan konseling dilakukan pada saat posyandu dan pertemuan kader. Seringkali ada kunjungan rumah kepada akseptor baik pra maupun pasca pelayanan. Untuk data basis pasangan usia subur diperoleh dari pendataan keluarga. Namun saat ini hasil pendataan keluarga dikumpulkan di tingkat kecamatan, sehingga kader tidak memegang data sasaran program KB. Pendataan dilakukan oleh para kader, semua kader dari tingkat desa sampai dengan RT terlibat. Untuk pelayanan KB pil dan kondom memang PPKBD ada yang melakukan. Untuk KB pil biasanya dikonsultasikan dengan bidan desa setempat, sedangkan untuk KB kondom bisa diberikan secara langsung. Dalam pelayanan rujukan yang melakukan adalah PPKBD. Penyuluhan hanya dilakukan oleh PPKBD, sedangkan PKB RW dan PKB RT belum melakukan penyuluhan. Dalam pembinaan poktan bina keluarga baik PPKBD maupun PKB RW dan PKB RT semuanya terlibat dalam pembinaan. Dalam pertemuan kader biasanya dilakukan iuran dan jimpitan. (*Wawancara, tanggal 3 Mei 2017*).

Pembinaan kader IMP di kecamatan dimaksudkan agar kader mempunyai rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diembannya sehingga target terpenuhi, bersemangat, pengetahuan dan ketrampilan meningkat, dapat meneruskan ke tingkat yang lebih bawah, dan yang lebih penting agar kader merasa lebih diperhatikan.

Beberapa faktor pendukung dalam pendayagunaan IMP di tingkat kecamatan antara lain respon dan komitmen dukungan yang bagus dari DissosP3AKB, pemerintah kecamatan dan desa, para pelaksana pembinaan termasuk kader PPKBD memiliki semangat yang tinggi, jalinan kerjasama kemitraan dan komunikasi lintas sektoral yang baik, jumlah kader yang banyak, serta perhatian dari pemerintah desa melalui alokasi anggaran yang berupa honor PPKBD.

Sedangkan beberapa kendala yang dihadapi antara lain berupa jumlah penyuluh KB yang masih kurang, Jumlah honor PPKBD yang masih bervariasi/belum seragam, ada beberapa desa yang jumlah honorinya sudah cukup namun ada yang honorinya masih kurang, beberapa kader PKB RW dan PKB RT kurang aktif, kurangnya jumlah kader kelompok kegiatan, kemampuan kader IMP yang masih kurang karena rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya pembinaan dan pelatihan terhadap kader, sarana dan prasarana KIE masih kurang, alokasi anggaran dari pemerintah desa untuk program KKB masih kurang termasuk belum adanya honor kader PKB RW dan PKB RT , serta data program yang kurang lengkap.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh koordinator penyuluh KB dan penyuluh KB yang berada di tingkat kecamatan, antara lain melalui pertemuan pembinaan yang diintegrasikan dengan pertemuan kader TP PKK dan posyandu, mengoptimalkan pembinaan kepada kader IMP melalui pertemuan PPKBD, jalinan kerjasama dengan TP PKK kecamatan maupun TP PKK desa agar ada integrasi dalam pembinaan, kerjasama kemitraan dengan tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta fasilitas kesehatan yang ada di tingkat kecamatan, adanya pendampingan terhadap kader IMP yang kemampuannya masih kurang mampu, advokasi kepada pemerintahan desa melalui forum paguyuban kepala desa, advokasi alokasi anggaran APBDesa untuk pengadaan APE, serta usulan penambahan penyuluh KB.

5. Respon Kader IMP Terhadap Program KKB

Upaya pendayagunaan Kader IMP yang berupa pembinaan dilakukan baik oleh DissosP3AKB maupun penyuluh KB diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas

kader IMP dalam melaksanakan perannya. Selain itu hal tersebut dapat meningkatkan semangat para kader karena mereka merasa diperhatikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kader bahwa Pembinaan yang dilakukan oleh DissosP3AKB bagus dan sangat bermanfaat namun frekuensinya masih sangat kurang, itupun hampir semuanya hanya diikuti oleh PPKBD. Pembinaan biasanya hanya dilakukan 2 kali dalam satu tahun yaitu dalam acara temu kader dan dalam rangka memperingati hari Keluarga Nasional (Harganas). Di samping meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, even ini juga dimanfaatkan oleh para kader untuk *sharing/saling* berbagi dengan kader IMP dari lain kecamatan.

Sedangkan Pembinaan yang dilakukan oleh penyuluh KB untuk tingkat kecamatan sudah cukup baik. Pembinaan dilakukan melalui pertemuan pembinaan PPKBD yang dilaksanakan setiap bulan. Dalam forum tersebut dilakukan evaluasi pencapaian, rencana kerja, pembinaan kader, penyampaian informasi. Pembinaan melalui kunjungan rumah terhadap kader PPKBD dilakukan apabila ada informasi mendesak yang segera untuk disampaikan termasuk dalam penyampaian fasilitasi.

Pembinaan oleh penyuluh KB di tingkat desa dilakukan dengan cara mengunjungi pertemuan kader posyandu dan pertemuan kader TP PKK. Di samping melalui pertemuan kader, penyuluh KB juga seringkali langsung mengunjungi kelompok kegiatan posyandu maupun BKB dan BKL yang dipadukan dengan kegiatan posyandu untuk melakukan pendampingan, penyampaian informasi, penyuluhan, serta mengajak untuk ikut menjadi peserta KB kepada PUS yang belum KB.

Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan terhadap ibu Muryati (PPKBD kelurahan Gergunung) mengenai pembinaan yang dilakukan oleh Penyuluh KB :

Sudah cukup baik, tiap bulan melalui forum pertemuan PPKBD biasanya anjongsana bersama bidan desa (perwakilan bidan desa), untuk akhir-akhir ini setelah ada balai penyuluhan KB dilaksanakan di balai penyuluhan KB. Kalau ada informasi penting dan mendesak penyuluh KB melakukan kunjungan rumah kepada PPKBD untuk menyampaikannya, termasuk penyampaian fasilitasi. (*Wawancara, tanggal 5 Mei 2017*).

Demikian pula yang disampaikan oleh ibu Sunarni (PPKBD Desa Kemalang) :

Bagus, tiap bulan ada pembinaan PPKBD di kecamatan kemalang, karena bu Sur (Dra. Suryatmi) konsekuen, saya biasanya *leda-lede* (tidak serius) tapi kalau pekerjaan dari bu Sur saya tepati. Penyuluh KB juga mendatangi posyandu-posyandu memberikan pengarahan dan mencari akseptor. Kemudian juga mendatangi pada pertemuan PKK setiap tanggal 25 dan pertemuan kader posyandu setiap tanggal 15 setiap bulan, juga melakukan pembinaan BKB dan BKL yang dipadukan dengan kegiatan posyandu. (*Wawancara, tanggal 8 Mei 2017*).

Fasilitasi baik yang diberikan oleh DissosP3AKB, penyuluh KB, maupun dari pemerintah desa menurut para kader masih kurang. Beberapa fasilitasi yang berupa buku-buku pedoman, leaflet, APE masih kurang. Demikian juga untuk pengajuan bantuan modal UPPKS sampai sekarang tidak dapat turun karena terbit aturan baru yaitu harus berbadan hukum. Untuk honorarium PPKBD sudah ada pemihakan dari pemerintah kelurahan/desa namun jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan saat mendapat honorarium dari pemerintah kabupaten dahulu (sebelum tahun 2016). Saat ini PPKBD hanya menerima honorarium Rp. 500.000,- s/d Rp.600.000,- per tahun, padahal sebelumnya mendapat honorarium Rp. 1000.000,- per tahun. Demikian pula dalam hal pengiriman akseptor KB juga belum ada pemihakan dari pemerintah desa.

Beberapa dukungan fasilitasi yang dianggap sudah cukup berupa bantuan terhadap kelompok kegiatan posyandu sudah mendapat alokasi yang cukup dari

pemerintah desa serta bantuan operasional pertemuan pembinaan dari penyuluh KB. Hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa kader IMP mengenai fasilitasi dan dukungan yang diberikan oleh DissosP3AKB, koordinator PKB, penyuluh KB, dan pemerintah desa sebagai berikut :

Menurut ibu Muryati :

Masih kurang terutama untuk buku-buku pedoman, leaflet, APE, namun dalam hal pembinaan cukup. Yang dari desa belum ada fasilitasi untuk pengiriman akseptor, sedangkan honorarium untuk PPKBD malah menurun dibandingkan saat ada dari kabupaten dulu yaitu Rp. 500.000,- per tahun. (*Wawancara, tanggal 5 Mei 2017*).

sedangkan menurut ibu Sunarni :

Ada dana dari kabupaten tapi masih kurang. Pernah ada bantuan 1.000.000,-, tidak mengembalikan, pinjaman 5.000.000,- dengan mengangsur dan sekarang sudah lunas. Dari penyuluh KB dapat bantuan, materi juga dapat. Dari pemerintah desa dapat, ada honor tiap tahun 600.000, sudah dua tahun ini posyandu mendapat bantuan 2.000.000 dipotong pajak. Namun tidak ada dana pembinaan untuk kelompok kegiatan dari pemerintah desa Jadi memang masih minim. (*Wawancara, tanggal 8 Mei 2017*).

dan ibu Itawati (sub PPKBD desa Kemalang) menyampaikan :

Ada..APE/BKB Kit, Pil, kondom. Dari pemerintah desa berupa bantuan posyandu. Pernah mengajukan proposal bantuan untuk modal UPPKS tapi tidak turun karena harus berbadan hukum. (*Wawancara, tanggal 9 Mei 2017*).

Fasilitasi yang berupa pembinaan dan pelatihan juga masih kurang. Kader menilai bahwa sebenarnya pembinaan dan pelatihan cukup baik, dapat dipahami serta bermanfaat bagi kader, namun frekuensi dan kuotanya yang masih kurang. Selain itu pada setiap pembinaan dan pelatihan biasanya waktunya kurang. Seperti apa yang disampaikan oleh ibu Muryati :

Pembinaan dan pelatihan baik namun biasanya waktunya kurang. Di samping penyampaian materi seharusnya ada praktek sehingga waktu agar diperpanjang misalnya 2 hari atau 3 hari. (*Wawancara, tanggal 5 Mei 2017*).

Respon kader IMP terhadap program KKB pada umumnya sangat bagus, mereka sangat mendukung dan bangga dapat menjadi kader KB. Mereka berusaha

untuk menjadi contoh masyarakat sekitar dengan menjadi peserta KB, dan yakin bahwa program KKB dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan keluarga.

Apabila dibandingkan dengan pada saat awal-awal adanya program Keluarga Berencana, maka tugas kader saat sekarang dapat dikatakan lebih mudah karena pada umumnya masyarakat sudah sadar akan pentingnya ikut KB serta jumlah kader KB yang lebih banyak. Berikut petikan hasil wawancara terhadap ibu Muryati :

Program KB bagus sekali, karena memang sejak dari dulu saya menjadi kader KB. Perbedaan dengan yang dulu, dulu saya harus kunjungan rumah, sekarang cukup dalam pertemuan kader posyandu, sekarang lebih mudah karena ada kader RW. (*Wawancara, tanggal 5 Mei 2017*).

Sebagian kader IMP tidak mengetahui tentang pengertian IMP serta 6 pokok peran bantu IMP. Mereka hanya mengerti sebagai kader KB. Sehingga wajar apabila ada beberapa peran yang telah dilakukan namun mereka tidak mengetahui bahwa hal itu merupakan salah satu peran dari kader IMP, atau mereka tidak mengetahui bahwa ada beberapa peran belum dilaksanakan oleh para kader IMP yang sebenarnya menjadi tugasnya.

Pada era awal program KKB dicanangkan yakni sekitar tahun 1980-an, kader IMP banyak menemui kendala untuk mengajak masyarakat mensukseskan program KB dengan menjadi peserta KB. Namun sekarang, seiring berjalannya waktu, masyarakat sudah sadar bahwa menjadi peserta KB merupakan suatu kebutuhan dan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Seperti diketahui bahwa menjadi seorang kader di desa biasanya bukan hanya sebagai kader dalam bidang tertentu. Demikian pula kader IMP, disamping mereka menjadi kader IMP biasanya juga merangkap sebagai kader bidang-bidang

yang lain, misalnya kader posyandu, kader PKK, kader gizi, kader PAUD, kader TB. Namun hal tersebut biasanya tidak menjadi masalah karena mereka dapat membagi waktu dalam menjalankan tugasnya.

Beberapa kendala yang saat ini dihadapi para kader IMP dalam menjalankan perannya. Berdasarkan wawancara dengan beberapa kader IMP kendala tersebut antara lain berupa :

- a. Masih ada keengganan masyarakat untuk mengikuti kelompok kegiatan dengan alasan' *jer metu kumpal-kumpul wae bu'* (terlalu banyak keluar rumah untuk mengikuti pertemuan).
- b. Jumlah kader untuk kelompok kegiatan yang masih kurang.
- c. Bila ada yang mau steril (MOW) bagi yang tidak mampu, belum ada kepedulian dari pemerintah kelurahan/desa.
- d. Suami tidak mengizinkan untuk KB terutama KB MOW.
- e. PUS masih enggan ikut KB karena merasa takut, serta adanya rumor tentang alkon implan dan IUD.
- f. Ada kader yang masih baru, yang masih kurang memperoleh pembinaan dan belum pernah dilatih sehingga masih kesulitan dalam memberikan penyuluhan.
- g. Buku panduan penyuluhan yang masih kurang.

Sejauh ini para kader IMP sudah berusaha untuk mencari jalan keluar dari beberapa kendala tersebut anatara lain melalui :

- a. Berusaha melakukan pendekatan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya kelompok kegiatan.
- b. Penyebaran undangan.

- c. Adanya pemberian makanan tambahan (PMT).
- d. Mencari metode dalam pelaksanaan kegiatan agar lebih menarik dengan waktu yang lebih efektif dan efisien (tidak terlalu lama).
- e. Melakukan KIE melalui forum pertemuan PKK tingkat kelurahan/Desa maupun lewat pertemuan PKK RW.
- f. Meminta dukungan dari pemerintah desa untuk memberikan fasilitasi pengiriman calon peserta KB MOW.
- g. Melakukan KIE tentang alat kontrasepsi MOW bahwa sekarang ada MOW dengan tidak memotong saluran tuba.
- h. Minta tolong kepada penyuluh KB dan bidan desa untuk menjelaskan rumor alat kontrasepsi.

B. Peran Kader IMP di Kabupaten Klaten

Pada bagian ini disajikan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan kader IMP. Untuk mendukung data yang diperoleh dari informan utama yaitu dari kader IMP data primer juga diperoleh melalui observasi lapangan. Observasi dilakukan terhadap beberapa kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan yang merupakan peran dari kader IMP.

Selain itu peneliti juga mengumpulkan data sekunder berupa dokumentasi dalam membantu menjelaskan hasil wawancara dan observasi terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban informan seperti data-data berupa dokumen, arsip dan referensi lainnya yang diperoleh dari DissosP3AKB kabupaten Klaten, penyuluh KB, dan kader IMP itu sendiri.

Data-data yang diperoleh tersebut akan dideskripsikan secara sistematis sesuai dengan sifat metode penelitian deskriptif kualitatif. Dengan demikian akan diperoleh gambaran yang jelas mengenai peran yang dilakukan oleh kader IMP, untuk selanjutnya dilakukan analisis dan dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan penelitian tentang peran kader IMP dalam program KKB di kabupaten Klaten. Bagian berikut merupakan penyajian hasil penelitian.

1. Pengorganisasian

Pembentukan IMP baik PPKBD, sub PPKBD maupun kelompok KB dilakukan dengan penunjukan untuk menjadi kader IMP dan kepengurusan bersifat tunggal (hanya 1 orang) sebagai ketua, tidak ada susunan pengurus dan tidak ada pembagian tugas. Kepengurusan yang ada adalah dalam insitusi PKK baik tingkat desa/kelurahan maupun RW. Seperti apa yang disampaikan ibu Itawati : “Sudah ada kepengurusan namun tidak aktif, dan tidak ada pembagian tugas. Pembentukan pengurus lewat PKK RW susunan pengurus ketua, sekretaris, bendahara” (*Wawancara, tanggal 9 Mei 2017*).

Dalam hal fasilitasi dari pemerintahan desa/kelurahan bahwa sebagian PPKBD sudah memiliki Surat Keputusan dari kepala desa/lurah namun untuk sub PPKBD dan kelompok KB belum ada yang memiliki. Demikian juga untuk honorarium hanya PPKBD yang memperoleh honorarium dari pemerintah desa/kelurahan sebesar Rp. 500.000,- s/d Rp. 600.000,-.

Namun dengan sistem pengorganisasian tersebut ternyata bukan menjadi kendala bagi para kader IMP dalam menjalankan perannya, seperti apa yang disampaikan oleh ibu Muryati : “Tidak Ada Kendala, karena tidak ada

pengaruhnya apabila di bentuk pengurus, karena sudah ada pertemuan PKK”

(*Wawancara, tanggal 5 Mei 2017*).

Demikian juga yang disampaikan oleh ibu Sunarni :

Saya kira sudah cukup, tidak ada kendala meskipun sendiri dan belum terbentuk pengurus namun kader PKB RW dan PKB RT sangat membantu, saya tinggal memantau. Di samping itu apabila terlalu banyak kepengurusan, saya takut kalau ada permintaan berupa seragam, piknik, dan sebagainya. (*Wawancara, tanggal 8 Mei 2017*).

Dalam penyampaian informasi dan penyuluhan dilakukan oleh kader IMP melalui forum pertemuan PKK, kader posyandu dari tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat RT. Apabila menemui kendala mereka akan langsung berkonsultasi dengan penyuluh KB, bidan desa (puskesmas). Menurutnya untuk tingkat RW dan RT kepengurusan akan digabung dengan PKK RW maupun PKK RT.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan kader IMP bahwa kondisi pengorganisasian untuk saat ini sudah cukup. PPPKBD mampu berperan sebagai koordinator bagi kader di bawahnya. Untuk tingkat RW, pengorganisasian bergabung dengan kepengurusan PKK RW demikian juga untuk tingkat RT. Namun, peran pengorganisasian ini tetap penting karena dengan adanya peran ini kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

2. Pertemuan

Persiapan yang dilakukan dalam melaksanakan pertemuan adalah dengan cara menyampaikan undangan terlebih dahulu kecuali yang satu minggu sekali karena sudah ditentukan setiap hari minggu maka tidak memerlukan undangan. Sedangkan tempat yang dijadikan ajang pertemuan adalah balai desa/kelurahan, rumah kader, serta anjangsana di rumah-rumah kader secara bergiliran.

Dalam pelaksanaan pertemuan dimanfaatkan kader untuk berkonsultasi baik dengan pemerintah desa, bidan desa, maupun dengan penyuluh KB seperti apa yang disampaikan Ibu Sunarni : “Kalau diperlukan saya selalu berkonsultasi baik dengan pemerintah desa, penyuluh KB, maupun bidan desa, apalagi bu Sur kan sering menghadiri pertemuan kader jadi konsultasi dapat dilakukan saat pertemuan” (Wawancara, tanggal 8 Mei 2017).

Pertemuan oleh kader IMP dilakukan secara rutin dengan cara integrasi/digabungkan dengan pertemuan kader PKK, kader posyandu, serta pertemuan RW dan RT dengan frekuensi tiap bulannya 1-4 kali pertemuan. Namun ada juga yang tidak melakukan pertemuan dengan alasan tertentu. Seperti yang disampaikan oleh ibu Itawati sebagai berikut :

Setiap RT sudah ada pertemuan, nanti kalau pertemuan terus-menerus akan memberatkan warga..... untuk saat sekarang masih belum bisa, ibu RW sudah sepuh, usia sekitar 80 tahun sehingga ada kesulitan. (Wawancara, tanggal 9 Mei 2017).

Pelaksanaan pertemuan kader IMP yang digabungkan dengan pertemuan kader PKK dan kader posyandu di tingkat desa. Sesuai dengan pengamatan yang dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 di aula balai desa Kemalang serta wawancara yang dilakukan maka proses pertemuan adalah sebagai berikut : pembukaan (berdoa), pembacaan notulen, sambutan pengarahan oleh perangkat desa, isian-isian (penyuluh KB, bidan desa, PPKBD), lain-lain, penutupan. Sekretaris posyandu menyiapkan daftar hadir serta melakukan pencatatan/notulensi serta membacakan hasil-hasil pertemuan termasuk informasi serta rencana kerja pada acara lain-lain.

Untuk pertemuan kader di tingkat desa umumnya berjalan dengan lancar, hanya kadang-kadang pada tanggal yang sudah menjadi agenda rutin pertemuan,

berbarengan dengan kegiatan lain yang juga penting, namun hal tersebut dapat diatasi dengan cara mengubah waktu pertemuan baik dimajukan maupun dimundurkan tanggalnya. Sedangkan pertemuan di tingkat RW dan RT kadang-kadang menemui kendala berupa kekosongan isian serta ada beberapa ibu-ibu tidak hadir dalam pertemuan. Untuk itu kader IMP berusaha mencari bahan/materi isian dari buku-buku maupun *browsing* internet yang bermanfaat serta berusaha untuk mengajak dengan cara menghampiri ibu-ibu untuk datang dalam pertemuan.

Menurut para kader bahwa pertemuan ini penting untuk dilaksanakan. Pertemuan dimanfaatkan untuk penyampaian informasi program KB dan program lainnya serta menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilakukan. Pertemuan juga dinilai penting karena dapat sebagai sarana silaturahmi yang dapat menambah keakraban anggota dan warga masyarakat.

3. KIE dan Konseling

Berdasarkan wawancara bahwa kader IMP dalam KIE dan konseling kepada warga masyarakat dilaksanakan dengan sabar dan sopan serta tidak memaksakan kehendaknya apabila ada warga yang tidak setuju dengan ajakannya. Kader IMP secara umum juga dapat menjaga kerahasiaan atas keluhan dari warga yang sifatnya rahasia. Di samping itu kader selalu berkonsultasi dengan petugas yang berkompeten.

KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) dan Konseling yang dilakukan oleh Kader IMP dilaksanakan baik secara perorangan maupun kelompok. KIE dan konseling perorangan dilakukan melalui posyandu dan kunjungan rumah terhadap calon peserta KB steril dan keluarga yang baru saja melahirkan. Bahkan ada

yang dilakukan melalui pendekatan perorangan melalui kelompok non formal seperti yang dilakukan oleh ibu Sunarni :

Saya lakukan dengan berhati-hati tidak terlalu formal, misalnya saat ada orang kumpul-kumpul, saya kira ini lebih efektif, hemat, dan tidak tersinggung. (*Wawancara, tanggal 8 Mei 2017*).

Juga yang dilakukan oleh ibu Itawati : “Wawancara saling berhadapan lewat posyandu, saat belanja bersama.” (*Wawancara, tanggal 9 Mei 2017*).

Untuk KIE dan konseling secara kelompok dilakukan melalui pertemuan kader posyandu, dan kelompok kegiatan posyandu, BKB, BKR, BKL, dan UPPKS serta melalui forum pertemuan PKK desa/kelurahan, PKK RW, dan PKK RT. Sedangkan KIE massa dilakukan saat even tertentu, seperti yang dilakukan oleh ibu Muryati :

Melalui pertemuan kader posyandu kelurahan dan posyandu Nusa Indah VII. Untuk posyandu yang lain dilakukan oleh kader posyandu yang lain. KIE massa saya lakukan saat acara tirakatan 17 Agustus dan halal bi halal. (*Wawancara, tanggal 5 Mei 2017*).

Namun cara ini masih jarang dilakukan oleh para kader. Dari enam kader IMP yang diwawancarai hanya satu orang yang pernah melakukan KIE massa.

Mengenai persiapan dalam kegiatan KIE dan konseling, dari wawancara yang dilakukan, para kader terlebih dahulu menentukan sasaran KIE terutama PUS yang habis melahirkan, menyiapkan materi KIE, serta ada yang hanya spontanitas dan tidak memerlukan persiapan. Menurut para kader bahwa sarana yang berupa buku panduan KIE dan konseling, brosur, leaflet, dan alat peraga masih kurang bahkan ada yang belum memiliki. Seperti yang disampaikan oleh ibu Muryati :

Untuk buku, brosur, leaflet, petunjuk KIE dan konseling belum pernah mendapat, saya hanya dapat papan tentang alat kontrasepsi tapi warga juga tidak dapat. (*Wawancara, tanggal 5 Mei 2017*).

Untuk menunjang keberhasilan dalam kegiatan KIE dan konseling ini para kader melakukan konsultasi serta koordinasi dengan pihak terkait. Konsultasi yang dilakukan PPKBD kepada penyuluh KB sebanyak 1 sampai dengan 4 kali setiap bulannya. Untuk kader sub PPKBD dan kelompok KB masih jarang, bahkan belum pernah berkonsultasi dengan penyuluh KB. Hal ini disebabkan oleh karena jarang ketemu dengan penyuluh KB, di samping itu karena sub PPKBD dan kelompok KB biasanya berkonsultasi kepada PPKBD. Dalam hal kerjasama, kader IMP sudah melakukan kerjasama yang baik dengan pemerintah desa serta tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat.

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap kader IMP bahwa peran KIE dan konseling sangat penting karena dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap program KB, meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta dapat membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan program KB. Disamping itu secara umum peran ini sangat mendukung bagi keberhasilan program KB.

Beberapa kendala yang dihadapi para kader dalam melakukan KIE dan konseling yaitu berupa kurangnya sarana dan prasarana KIE dan konseling serta pembinaan dari penyuluh KB yang juga masih kurang. Dalam mengatasi kendala ini PPKBD melakukan konsultasi kepada penyuluh KB serta meneruskannya kepada kader IMP di bawahnya.

4. Pencatatan Pendataan dan Pemetaan Sasaran

Dalam hal kegiatan pencatatan dan pelaporan, kader hanya melakukan catatan hasil pertemuan berupa notulen, sedangkan mengenai kegiatan yang dilakukan kader yang seharusnya dicatat dan dilaporkan, kader tidak melakukannya. Laporan yang dilakukan oleh kader PPKBD kepada penyuluh KB belum dibuat

dengan pedoman R/R yang baku dan hanya melaporkan perolehan akseptor baru. Sedangkan kader sub PPKBD dan kelompok KB tidak membuat laporan. Demikian yang disampaikan ibu Muryati : “Tidak, kalau pertemuan ada catatannya. Laporan kepada penyuluh KB hanya akseptor baru, nama dan alamat, dan AB yang habis melahirkan di RSI dan RSIA” (*Wawancara, tanggal 5 Mei 2017*).

Dalam proses pelaksanaan pendataan keluarga, meskipun hampir sama yaitu melalui pelatihan di tingkat kecamatan dan tingkat desa dilanjutkan pendataan dengan kunjungan rumah (*door to door*), namun berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap informan di dua kecamatan tersebut ternyata memiliki perbedaan petugas yang mendata. Di kecamatan Klaten Utara pendataan keluarga melibatkan seluruh kader IMP yang ada baik PPKBD, sub PPKBD, serta kelompok KB. Seperti apa yang disampaikan oleh ibu Muryati berikut ini :

Saya ikut pelatihan di tingkat kecamatan dilanjutkan pelatihan di tingkat kelurahan dengan peserta kader pendata tingkat RW dan RT. (*Wawancara, tanggal 5 Mei 2017*).

Sedangkan di kecamatan Kemalang dilakukan oleh PPKBD, kader posyandu dan perangkat desa , sedangkan sub PPKBD dan kelompok KB belum pernah ikut dalam pendataan keluarga. seperti yang disampaikan oleh ibu Sunarni :

Didahului pelatihan di tingkat kecamatan, untuk tingkat desa pelatihan kepada kader posyandu bersama-sama pak kadus (kepala dusun) kemudian saya membetulkan dan merekapitulasi, tapi untuk tahun 2016 saya hanya minta perkembangannya saja serta minta data dari desa. (*Wawancara, tanggal 8 Mei 2017*).

Dalam pendataan keluarga tahun 2015 juga diikuti dengan pembuatan peta keluarga yang dibuat tiap-tiap RT namun hanya dikumpulkan kepada PPKBD, dan tidak ditindaklanjuti perkembangannya.

Rekapitulasi pendataan keluarga dilakukan oleh PPKBD selanjutnya dilaporkan kepada kepala desa/kelurahan dan penyuluh KB dan ditindaklanjuti dengan sosialisasi hasil pendataan keluarga tingkat desa/kelurahan. Sedangkan sosialisasi untuk tingkat RW dan RT tidak dilakukan karena hasil pendataan masih dikumpulkan di PPKBD dan penyuluh KB.

Peran pencatatan pendataan dan pemetaan menurut para kader IMP penting untuk dilakukan karena dapat untuk mengetahui pencapaian program KB di wilayahnya dan hasilnya dapat dijadikan sebagai data dasar serta pegangan yang mempermudah para kader dalam melakukan intervensi kegiatan terutama kunjungan rumah bagi PUS yang belum KB.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh para kader untuk menjalankan perannya dalam pencatatan, pendataan, dan pemetaan sasaran yaitu : kegiatan ini menyita waktu, sulit menemui keluarga di perumahan/perkotaan, kader tidak memiliki arsip data hasil pendataan keluarga, serta belum ada pembinaan dari penyuluh KB dan PPKBD.

Berikut hasil wawancara dengan ibu Warsini (sub PPKBD kelurahan Gergunung) : “Yang susah di perumahan, dikira minta bantuan, dan perlu bolak-balik untuk ketemu.” (*Wawancara, tanggal 5 Mei 2017*). Dan ibu Itawati : “Saya tidak punya datanya karena belum dikasih blangko dan belum ada pembinaan dari penyuluh KB dan PPKBD.” (*Wawancara, tanggal 9 Mei 2017*).

Upaya yang telah dilakukan oleh para kader dalam mengatasi kendala tersebut yaitu dengan : menyisihkan waktu untuk laporan, PPKBD memberikan buku catatan bagi tiap-tiap kader sub PPKBD, meminta bantuan kepada penyuluh KB

untuk mendampingi, melakukan kunjungan sampai ketemu, menggunakan SIP dari puskesmas.

5. Pelayanan Kegiatan

Pelaksanaan peran kader yang berupa pelayanan kegiatan meliputi pelayanan ulang KB pil dan kondom, melakukan rujukan pelayanan KB, melakukan penyuluhan tentang ibu menyusui, ibu hamil, kesehatan reproduksi remaja, pendewasaan usia perkawinan (PUP) , penanggulangan HIV/AIDS, penanggulangan NAPZA, penanggulangan penyakit menular seksual (PMS), penyuluhan tentang pengaturan kelahiran (alkon rasional, jumlah anak, jarak kelahiran), dan pembinaan yang dilakukan terhadap kelompok kegiatan (BKB, BKR, dan BKL, dan UPPKS).

Pelayanan ulang KB pil dan kondom dilakukan oleh kader bersamaan dengan kegiatan posyandu. Biasanya kader menyerahkannya langsung kepada akseptor yang membutuhkan, karena KB ulang tidak perlu *advise* dari bu bidan/tenaga kesehatan. Namun pelayanan KB ulang oleh kader ini tidak dilakukan oleh kader IMP di kelurahan gergunung kecamatan Klaten Utara seperti penuturan ibu Muryanti : “Tidak, karena tidak ada yang minat...kalau ada yang butuh pil dan kondom saya suruh beli”. (*Wawancara, tanggal 5 Mei 2017*).

Dalam memperoleh pelayanan KB, calon akseptor yang mampu biasanya sudah mengikuti program KB Mandiri yaitu dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan KB (BPS/DPS). Sedangkan bagi calon akseptor yang memiliki kartu BPJS bisa dilayani di KKB Puskesmas setempat, dalam hal ini untuk KB implan, IUD, dan kondom dengan membawa persyaratan fotokopi KTP, KK, dan kartu BPJS. Bagi keluarga yang tidak memiliki kartu BPJS, dalam pelayanan KB

implan, IUD, dan MOW/MOP biasanya memerlukan rujukan. Agar calon akseptor dapat memperoleh pelayanan secara gratis maka memerlukan rujukan ke tempat pelayanan/KKB rujukan, yang sudah ada kesepakatan (MoU) dengan Dissos P3AKB Kabupaten Klaten.

Rujukan pelayanan KB biasanya dilakukan oleh penyuluh KB dan PPKBD. Klinik tempat rujukan bagi kedua kecamatan tersebut dalam pelayanan KB IUD dan implan adalah klinik Sang Timur Kalikotes dan klinik Sejahtera Kemalang. Sedangkan untuk pelayanan KB MOW/MOP biasanya dilaksanakan di klinik Griya Raharja Klaten dan klinik PKBI Klaten.

Proses dalam rujukan pelayanan KB dimulai dari warga mendaftar kepada kader atau bu bidan, kemudian PPKBD menindaklanjuti dan melaporkan kepada penyuluh KB, dan diteruskan ke DissosP3AKB kabupaten Klaten. Untuk selanjutnya diberikan surat pengantar dari DissosP3AKB, kemudian PPKBD memberitahu waktu pelaksanaan kepada akseptor serta mengantar dan mendampingi pada saat pelayanan.

Dalam pelayanan KB serentak, Kader IMP melakukan pendaftaran terhadap PUS calon peserta KB. Kader IMP membantu persiapan calon peserta KB dalam pengisian kartu KB beserta lembar persetujuan yang harus ditandatangani suami, seperti apa yang disampaikan ibu Sunarni sebagai berikut : “...Untuk KB safari, saya daftar dulu yang mau ikut KB kemudian saya siapkan kartu KB nya beserta lembar persetujuan yang harus ditandatangani suami supaya nanti pas pelaksanaan dapat berjalan lancar. Kemudian saya antar ke tempat pelayanan” (*Wawancara, tanggal 8 Mei 2017*).

Pelayanan Kegiatan yang berupa penyuluhan meliputi penyuluhan tentang ibu menyusui, ibu hamil, kesehatan reproduksi remaja, pendewasaan usia perkawinan (PUP) , penanggulangan HIV/AIDS, penanggulangan NAPZA, penanggulangan penyakit menular seksual (PMS), serta penyuluhan tentang pengaturan kelahiran (alkon rasional, jumlah anak, jarak kelahiran). Semuanya pernah dilakukan oleh PPKBD maupun oleh kader sub PPKBD. Mereka melakukannya melalui forum pertemuan kader posyandu, kader PKK desa/RW/RT, kelompok kegiatan posyandu, kelompok BKR, maupun kunjungan rumah secara langsung.

Dalam pembinaan kelompok kegiatan (poktan) yang terdiri dari BKB, BKR, BKL, dan UPPKS. PPKBD dan sub PPKBD sudah membentuk dan memiliki poktan tersebut. Sedang untuk kelompok KB belum bisa membentuk karena cakupannya terlalu kecil sehingga ikut kegiatan di tingkat RW. Pembinaan secara umum yang dilakukan oleh PPKBD adalah melalui forum pertemuan (kader posyandu dan PKK) di tingkat desa/kelurahan untuk dapat disampaikan kepada kelompoknya masing-masing di tingkat yang lebih bawah. PPKBD juga membina poktan namun hanya yang berada di wilayah RW tempat tinggalnya, di luar itu maka sudah diserahkan kepada kader-kader sub PPKBD di wilayahnya masing-masing.

Pembinaan poktan sering diintegrasikan dengan pelaksanaan posyandu, seperti apa yang dilakukan BKB NUSA Indah 7 di Gergunung Klaten Utara serta BKB Mawar dan BKL Mawar di Kemalang Kemalang yang pelaksanaannya bersamaan dengan posyandu. Hal ini dimaksudkan agar waktu lebih efisien serta dengan harapan agar peserta poktan lebih banyak yang hadir dalam kegiatan. Namun

untuk kelompok UPPKS dan BKR di dua kecamatan tersebut, pelaksanaan kegiatannya dilakukan dengan jadwal tersendiri.

Untuk mempermudah dalam melakukan pelayanan kegiatan baik itu pelayanan KB, penyuluhan, maupun pembinaan poktan diperlukan dukungan data yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Selama ini kader sub PPKBD dan kelompok KB tidak memiliki data pendukung. Sedangkan PPKBD memiliki data poktan untuk tingkat desa/kelurahan, selain itu juga memiliki data pasangan usia subur (PUS) namun belum siap dan agak susah untuk digunakan dikarenakan masih berwujud data mentah dari pendataan keluarga tahun yang lalu (tahun 2015) dan sebagian sudah tidak valid (kadaluwarsa).

Ditinjau dari aspek kepentingan, berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap kader IMP bahwa peran pelayanan kegiatan ini penting karena dapat membantu masyarakat yang membutuhkan informasi dari pelayanan program KB serta dengan peran ini kelompok kegiatan (poktan) dapat aktif berjalan.

Beberapa kendala yang dialami kader dalam rangka pelayanan kegiatan adalah berupa : keterbatasan materi pembinaan (buku pedoman, alat peraga kurang) ,belum ada bantuan dari pemerintah desa kalau merujuk akseptor MOW, kurangnya kader untuk kelompok kegiatan terutama BKB, bantuan modal UPPKS yang belum ada, ada dari anggota yang tidak lancar dalam pengembalian pinjaman, pelatihan ketrampilan, pembinaan yang kurang, jalinan kemitraan dalam UPPKS juga belum ada.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut antara lain :

- a. Rencana kerjasama/kemitraan dengan penilik non formal (UPTD Pendidikan) dalam hal penjualan produk UPPKS.
- b. Mengundang bidan desa dan penyuluh KB pada saat melakukan penyuluhan.
- c. Berusaha mencari peluang untuk tambahan modal.
- d. Menggiatkan iuran dalam perkumpulan.

6. Kemandirian

Dengan peran kemandirian dimaksudkan agar kegiatan kelompok-kelompok pertemuan maupun kelompok kegiatan dapat berjalan secara mandiri serta dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga di wilayahnya. Berdasarkan wawancara dengan kader IMP bahwa upaya kemandirian yang dilakukan melalui iuran dan jimpitan tidak memberatkan anggota serta warga masyarakat setempat.

Upaya kemandirian yang dilakukan oleh kader IMP pada umumnya berupa iuran, jimpitan, serta penjualan produk setempat. Karena bentuk kelembagaan yang bersifat tunggal, maka iuran dan jimpitan dikoordinir oleh kelompok yang dijadikan ajang pertemuan yaitu pertemuan kader posyandu, kader PKK dari tingkat desa/kelurahan, RW, maupun RT dan poktan. Demikian juga dalam penjualan produk setempat yang berupa produk olahan makanan/industri rumah tangga, hanya dilakukan secara perseorangan dan tidak ada koordinasi di tingkat kelompok pertemuan.

Beberapa kelompok kegiatan dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri seperti yang dialami oleh kelompok BKL Ngudi Waras di kelurahan Gergunung kecamatan Klaten Utara. Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan

bahwa poktan tersebut sudah memiliki peralatan untuk pemeriksaan kesehatan lansia yang diperoleh secara mandiri.

Sedangkan kelompok UPPKS juga dimanfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga. Meskipun secara langsung kelompok kegiatan yang ada belum dirasakan manfaatnya dalam menunjang pelayanan program KB, namun dengan adanya perkembangan kelompok kegiatan UPPKS telah menambah semangat para kader. Demikian seperti apa yang dikatakan oleh ibu Muryati yang juga pengurus kelompok UPPKS Nusa Indah 7 kelurahan Gergunung : “Secara langsung belum, namun kelompok UPPKS sudah ada perkembangan dan menambah semangat para kader.” (*Wawancara, tanggal 5 Mei 2017*).

Menurut kader IMP bahwa peran kemandirian para anggota sangat penting karena dapat meningkatkan semangat para anggota, meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta dapat secara mandiri memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kepentingan kegiatan.

Kelompok kegiatan yang dapat berjalan secara rutin, dapat dijadikan sebagai wahana dalam menyampaikan berbagai program terutama program Kependudukan dan Keluarga Berencana. Dari hasil wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa kendala yang dihadapi para kader IMP dalam melakukan perannya dalam upaya kemandirian ini adalah terutama masalah permodalan.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh para kader IMP untuk mengatasi kendala tersebut antara lain : dengan mengaktifkan dan menambah iuran dan jimpitan, mengadakan simpan pinjam kelompok, pengajuan bantuan modal,

mengembangkan produk dari limbah/barang bekas dan produk makanan yang hanya membutuhkan modal yang relatif kecil.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran kader IMP dalam program KKB di kabupaten Klaten yang telah dipaparkan di depan, bahwa kader IMP belum dapat menjalankan 6 pokok peran bantunya seperti yang diharapkan oleh program. Bahkan ada beberapa bagian peran yang belum dapat dijalankan yaitu pengorganisasian dan pencatatan dan pelaporan. Dengan menggunakan Teori Peran yang dikemukakan Levinson, Berikut ini akan dibahas mengenai dinamika peran kader IMP tersebut beserta analisis terhadap berbagai kendala yang dihadapi.

1. Analisis Peran Kader IMP

a. Pengorganisasian.

Menurut Dessler (2010) Pengorganisasian merupakan sebuah proses yang diawali dengan (1) melakukan pembagian kerja atau spesialisasi pekerjaan, kemudian (2) mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan itu ke dalam beberapa kelompok (departementalisasi) yang dapat berdasarkan produk, fungsi, proses, pelanggan, dan atau geografis, (3) penentuan rantai komando : siapa atau siapa-siapa melapor atau bertanggung jawab kepada siapa, (4) penentuan rentang kendali : jumlah bawahan di dalam setiap kelompok yang dapat diarahkan secara tepat oleh seorang atasan, (5) penentuan apakah keputusan dapat diambil sendiri (desentralisasi) atau terpusat (sentralisasi), dan (6) penentuan formalisasi : banyak aturan dan peraturan yang digunakan untuk mengarahkan karyawan dan manajer. Ini berarti di dalam pengorganisasian ditetapkan tugas-

tugas yang harus dikerjakan, bagaimana tugas-tugas itu dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab kepada siapa, dan di mana keputusan dapat diambil.

Menurut BKKBN (2013) bahwa proses pembentukan IMP sebaiknya tidak dilakukan melalui pendekatan dari atas berupa penunjukan IMP oleh Kepala Desa/Kelurahan, namun dilakukan secara bertahap melalui :

- 1) Penyuluh KB melakukan konsultasi dengan kepala desa/kelurahan.
- 2) Inventarisasi tokoh-tokoh masyarakat yang memenuhi persyaratan menjadi IMP.
- 3) Pendekatan kepada tokoh informal calon IMP.
- 4) Penetapan dan pengukuhan IMP.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa berdasarkan norma-norma tersebut peran pengorganisasian belum dilaksanakan oleh kader IMP. Peran ini lebih dijalankan oleh kepala desa/kelurahan. Kader IMP dibentuk dengan cara penunjukan langsung. Dari kader IMP yang ada, hanya PPKBD yang sudah memiliki surat keputusan (SK) dari kepala desa/kelurahan. Demikian juga mengenai insentif/honorarium. Padahal keberadaan SK dan insentif/honorarium ini dirasa sangat penting untuk meningkatkan peran kader IMP.

IMP sebagai wadah berbagai kegiatan di tingkat desa/kelurahan ke bawah memerlukan kepengurusan. Kepengurusan IMP diupayakan dikembangkan dari kepengurusan tunggal menjadi kepengurusan kolektif. Kepengurusan kolektif dimaksudkan dalam rangka pembentukan kepengurusan dan pembagian kerja dalam menjalankan peran baktinya. Dalam kepengurusan tunggal biasanya berfungsi sebagai koordinator, hal ini hanya dapat dilakukan

pada institusi PPKBD sesuai kondisi wilayah. Untuk sub PPKBD dan kelompok KB diharapkan kepengurusan bersifat kolektif antara lain terdiri dari (ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi dan anggota). Mengingat peran IMP yang cukup strategis dalam mengelola program KKB, maka perlu mengintegrasikan kegiatan-kegiatan tersebut ke dalam 10 Seksi di BPD/LPMD/LPMK dan mendapat dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidikan, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh ekonomi dan lain-lain bersama PKB/PLKB untuk menggerakkan kelompok kerja teknis (pokjanis) dan kelompok kegiatan (poktan) (BKKBN, 2015).

Dari penunjukan terhadap kader IMP belum ditindaklanjuti dengan pembentukan kepengurusan secara kolektif sehingga kepengurusan masih bersifat tunggal dan belum ada pembagian tugas. Dalam hal ini PPKBD berperan sebagai koordinator bagi kader IMP di bawahnya yaitu Sub PPKBD dan Kelompok KB. Sedangkan yang berhubungan dengan upaya penggerakan kelompok kerja teknis dan kelompok kegiatan juga belum dilakukan oleh kader IMP.

Meskipun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa dengan bentuk kepengurusan PPKBD yang masih bersifat tunggal mereka merasa tidak ada permasalahan, namun dalam kenyataannya masih ditemukan bahwa ada beberapa peran yang belum dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga pemerintah desa dan penyuluh KB sangat perlu untuk memberikan fasilitasi, pembinaan, dan pendampingan.

Keberadaan SK dapat menjadi pegangan kader dalam menjalankan perannya. Sedangkan insentif/honorarium merupakan bentuk kepedulian dari

pemerintah desa sehingga kader akan merasa lebih diperhatikan. Disamping itu para kader IMP lebih termotivasi dan memiliki tanggung jawab dalam mensukseskan program KKB.

Di sini juga perlu menjadi bahan pertimbangan bahwa pemberian insentif /honorarium kepada kader IMP juga harus memperhatikan kader yang lain (di luar Kader IMP), misalnya : kader posyandu, kader PKK, kader PAUD, kader gizi, kader TB, dan lain-lain. Mengingat persoalan seperti ini sangat sensitif di tingkat desa. Diupayakan agar menghindari ‘kecemburuan’ antara kader yang satu dengan kader yang lain. Bisa jadi pemberian perhatian yang lebih terhadap kader salah satu program akan melemahkan motivasi bagi kader program yang lain. Jika memungkinkan seluruh kader di tingkat desa dilibatkan dalam kepengurusan sebagai kader IMP. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak kontribusi yang besar terhadap keberhasilan Program KKB.

Menurut Amirullah dan Budiyono (2004) bahwa organisasi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat antara lain organisasi dapat mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik serta organisasi sebagai sarana pencapaian tujuan, dengan pengorganisasian pencapaian tujuan menjadi lebih mudah. Demikian pula yang dilakukan oleh kader IMP pengorganisasian adalah penting, dengan peran pengorganisasian kegiatan dapat berjalan lancar sehingga sangat mendukung bagi keberhasilan tujuan dari program KB.

b. Pertemuan.

Kader IMP sebagai sebuah institusi diharapkan dapat berperan untuk membentuk suatu kelompok dan melakukan pertemuan secara rutin. Menurut Mulyana (2005) kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan

bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Kelompok ini misalnya adalah keluarga, kelompok diskusi, kelompok pemecahan masalah, atau suatu komite yang tengah berapat untuk mengambil suatu keputusan.

Dalam pertemuan rutin yang dilaksanakan IMP baik antar pengurus institusi, konsultasi pengurus dengan PKB/PLKB maupun dengan petugas lain yang terkait diagendakan secara berkala dan berjenjang. Pertemuan ini merupakan wadah untuk penyampaian informasi/data, bimbingan/pembinaan, evaluasi, pemecahan masalah dan perencanaan kegiatan Program KKB di tingkat lini lapangan. (BKKBN, 2015).

Kader IMP dalam melaksanakan peran pertemuan sudah sesuai dengan norma-norma yang ada. Persiapan pertemuan sudah direncanakan sebelumnya dengan memberikan undangan maupun tanpa undangan karena sudah merupakan agenda resmi yang telah ditentukan waktunya. Pertemuan dapat dilaksanakan secara anjaksanaan/bergiliran dan di tempat yang menetap di balai kelurahan/desa. Dalam rangka pertemuan ini baik sebelum, pada saat, maupun pasca pertemuan dalam kondisi tertentu (saat diperlukan) kader IMP selalu melakukan konsultasi dengan petugas yang berkompeten antara lain berasal dari pemerintah desa, TP PKK desa, penyuluh KB, dan bidan desa.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam hal pertemuan kader IMP memanfaatkan pertemuan rutin yang ada sesuai dengan jenjangnya. Untuk tingkat desa/kelurahan (PPKBD) dengan memanfaatkan pertemuan kader TP PKK dan kader posyandu tingkat desa/kelurahan. Sedangkan kader Sub

PPKBD dan Kelompok KB memanfaatkan pertemuan warga RW dan RT. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada tanggal 15 Mei 2017 terhadap pertemuan kader Posyandu di desa Kemalang kecamatan Kemalang, PPKBD tidak dapat fokus dalam menjalankan fungsinya untuk menyampaikan kepentingan programnya terutama yang berkaitan dengan program KKB. Kesempatan yang ada hanya sebatas penyampaian informasi. Sedangkan untuk kepentingan pembinaan, evaluasi program, pemecahan permasalahan dan perencanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena terbatasnya waktu sehubungan dengan alokasi waktu yang digunakan untuk kepentingan penyampaian informasi dan pembinaan bagi program pembangunan yang lain.

Dengan demikian akan lebih efektif apabila untuk tingkat desa/kelurahan kader IMP dapat membentuk kelompok dan mengadakan pertemuan sendiri terpisah dari pertemuan kader PKK dan kader posyandu dengan PPKBD sebagai koordinatornya. Peserta dalam pertemuan tersebut adalah hanya para kader IMP, sehingga pertemuan dapat lebih fokus membahas program KKB. Selain itu pertemuan ini dapat sebagai ajang untuk melakukan konsultasi dengan penyuluh KB selaku pembina KB tingkat desa serta petugas lain yang terkait misalnya bidan desa.

Sedangkan untuk tingkat RW dan RT, mengingat kondisi yang ada saat ini, di mana jumlah penyuluh KB terbatas, sarana dan prasarana yang masih kurang, serta pesertanya adalah warga masyarakat secara langsung, maka akan lebih tepat apabila masih memanfaatkan pertemuan RW dan RT yang ada sebagai wadah untuk penyampaian program sekaligus KIE dan konseling. Dalam even tertentu misalnya ada rencana pembentukan poktan (BKB, BKR,

BKL, dan UPPKS), kader sub PPKBD dan kelompok KB dapat menemui dan menghadirkan penyuluh KB dan PPKBD untuk memberikan fasilitasi dan pembinaan.

Menurut Cooley dalam Narwoko dan Suyanto (2007) kelompok ditandai dengan adanya hubungan yang erat di mana anggota-anggotanya saling mengenal dan seringkali berkomunikasi secara langsung berhadapan muka (*face to face*) serta terdapat kerjasama yang bersifat pribadi atau adanya ikatan psikologis yang erat. Dari ikatan-ikatan psikologis dan hubungan yang bersifat pribadi inilah, maka akan terjadi peleburan-peleburan daripada individu-individu dalam satu kelompok, sehingga tujuan-tujuan juga menjadi tujuan kelompoknya. Dengan demikian pertemuan yang dilakukan dalam kelompok sangat bermanfaat dalam penyampaian program pembangunan.

Dalam hal ini kader IMP menyampaikan bahwa pertemuan penting untuk dilakukan. Pertemuan sangat bermanfaat sebagai sarana penyampaian informasi mengenai program KB dan program lainnya, serta dapat sebagai ajang silaturahmi yang dapat menambah keakraban warga masyarakat.

c. KIE dan Konseling.

Menurut Nasution dalam BKKBN (2013) Istilah Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) identik dengan program Kependudukan dan KB. Secara historis konsep *contraceptive social marketing* merupakan asal muasal dan dasar pengembangan KIE. Rogers (1973) memberikan batasan pengertian komunikasi sebagai berikut :

“Communication is the process by which an idea is transferred from a source to a receiver with the intent to change his behavior.”
(komunikasi adalah suatu proses untuk menyampaikan ide/gagasan

atau informasi dari pemberi kepada penerima dalam rangka untuk merubah sikap dan perilaku sasaran).

Komunikasi adalah proses yang direncanakan bertujuan untuk memotivasi orang untuk mengadopsi sikap atau perilaku baru, atau untuk memanfaatkan layanan yang sudah ada. Hal ini didasarkan pada kekhawatiran masyarakat, kebutuhan yang dirasakan, kepercayaan dan arus praktek, mempromosikan dialog (biasa disebut juga dengan komunikasi dua arah), umpan balik dan meningkatkan pemahaman. Proses ini paling efektif jika melibatkan kombinasi strategis media massa, dan komunikasi antar pribadi (*face to face*) yang didukung dengan media cetak dan alat bantu audiovisual lainnya.

Informasi berarti penyebaran informasi umum dan teknis, fakta dan isu, untuk menciptakan kesadaran antara pembuat kebijakan, administrator, akademisi, dan masyarakat umum tentang perkembangan penting situasi program Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Edukasi mengacu pada proses memfasilitasi belajar yang memungkinkan sasaran untuk membuat keputusan dan alasan rasional, dan mempengaruhi perilaku mereka dalam jangka panjang. Edukasi dapat dilakukan melalui sektor pendidikan formal, atau melalui saluran non formal seperti jaringan sosial, kelompok belajar (kejar) dan kelas melek huruf, koperasi dan asosiasi pekerja.

KIE pada dasarnya merupakan proses pembelajaran masyarakat (sosial) yang dilakukan melalui metode komunikasi yang efektif yang diikuti dengan kemasan isi pesan sesuai dengan kemampuan sasaran. KIE mengacu pada intervensi program yang komprehensif, yakni merupakan bagian integral dari program pembangunan suatu negara yang bertujuan untuk mencapai

perubahan. KIE menggunakan kombinasi teknologi komunikasi, pendekatan dan proses secara fleksibel dan partisipatif. Titik awal KIE adalah untuk memberikan kontribusi dalam pemecahan suatu masalah atau membangun dukungan dari sasaran terhadap sebuah isu yang terkait dengan sebuah program. sasaran dimaksud termasuk pembuat kebijakan, penyedia layanan, agen perubahan, masyarakat dan atau pengguna jasa.

Bentuk KIE pada umumnya ada 3, yaitu:

1) KIE Individu

Teknik pelaksanaannya untuk perseorangan dilakukan secara tatap muka satu sama lain. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui tanya jawab, diskusi, konsultasi, bimbingan dan pendalaman terhadap salah satu materi yang dianggap perlu untuk dibahas (dibicarakan). KIE Individu biasanya dilakukan untuk pemuka agama, adat, masyarakat, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) atau seseorang yang memerlukan penjelasan khusus.

2) KIE Kelompok

Teknik pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk kelompok atau kumpulan orang yang memiliki kesamaan (jenis kelamin, latar belakang sosial budaya dan lain-lain). Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui ceramah, diskusi/dialogis, sosialisasi/orientasi, dan lain-lain dalam membahas sesuai masalah yang dianggap penting bagi kehidupan bersama sekarang dan yang akan datang. KIE kelompok yang paling banyak dilakukan dalam pelaksanaan program KB adalah mengajak pasangan untuk KB.

3) KIE Massa

Teknik pelaksanaannya dilakukan kepada masyarakat umum yang dapat dijangkau oleh media massa atau khalayak umum yang berkumpul di suatu tempat tertentu. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui ceramah umum dan sosialisasi massa atau menggunakan media massa (elektronik seperti radio, TV, wayang, pentas panggung dan sarana dunia maya). KIE massa tidak mudah untuk berdiskusi dan tanya jawab kecuali radio dan TV bisa tersedia komunikasi interaktif. KIE massa memiliki pengaruh cukup besar terhadap penerimaan oleh masyarakat terutama yang suka dengan penyajian tersebut. (BKKBN, 2013).

Sedangkan konseling adalah proses pemberian bantuan (berupa nasihat, bimbingan, atau arahan) dalam rangka menolong seseorang atau sekelompok orang, untuk memutuskan sesuatu atau memecahkan masalahnya, agar tercipta kondisi kesehatan dan kesejahteraan mental yang lebih baik di masa mendatang. Di dalam proses konseling perlu memiliki ketrampilan berkomunikasi yang memadai, baik verbal maupun non verbal, agar terjalin relasi yang baik di antara konselor dengan mereka yang membutuhkan konseling (konseli), yang pada akhirnya tujuan konseling dapat dicapai secara memuaskan. (BKKBN, 2013)

Dalam Program KKB, konseling atau juga dikenal dengan komunikasi interpersonal digunakan dalam membantu klien (pasangan usia subur) mengambil keputusan tentang pilihan metode kontrasepsi yang akan digunakan. Komunikasi ini memiliki peran strategis dan menentukan apakah klien akan menggunakan kontrasepsi atau tidak. Dari perspektif klien, memilih

menggunakan metode kontrasepsi termasuk keputusan yang kompleks. Selain banyak rumor yang negatif tentang efek kontrasepsi, juga karena kondisi awal mereka yang sehat sehingga ada ketakutan setelah menggunakannya malah menjadi tidak sehat. (BKKBN, 2013).

Apabila ditinjau dari dari aspek norma-norma mengenai KIE dan konseling, apa yang dilakukan oleh kader IMP dalam melakukan KIE dan konseling sudah sesuai dengan etika yang ada. Kader IMP telah berusaha menghormati hak asasi manusia dengan tidak memaksakan kehendak untuk mengikuti ajakannya. Kader IMP juga dapat menjaga kerahasiaan klien. Disamping itu Kader IMP juga selalu berkonsultasi dengan petugas yang berkompeten apabila tidak dapat menjawab dan mengatasi permasalahan klien.

Dalam pelaksanaan peran KIE dan Konseling beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh kader IMP adalah :

- 1) Mendorong peningkatan kesertaan masyarakat dalam ber KB yang semakin mandiri dan lestari.
- 2) Mendorong peran serta dan kepedulian masyarakat untuk memberikan perhatian terhadap kesehatan dan keselamatan ibu dan keluarganya.
- 3) Meningkatkan kesadaran dan kepedulian keluarga terhadap kesehatan reproduksi dalam rangka membina keharmonisan keluarga.
- 4) Meningkatkan ketahanan keluarga yang meliputi aspek keagamaan, pendidikan, sosial budaya, cinta kasih dan perlindungan dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.
- 5) Meningkatkan kesadaran keluarga tentang perlunya menerapkan pola asuh anak dengan memperhatikan tumbuh kembang anak balita secara optimal.

- 6) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga lansia dan keluarga yang memiliki anggota keluarga berusia di atas 60 tahun ke atas dalam pengembangan, pengasuhan, perawatan dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya.
- 7) Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lain dan membina tumbuh kembang anak dan remaja secara seimbang melalui komunikasi efektif antara orang tua dan anak remaja.
- 8) Mendorong keluarga agar mau dan mampu meningkatkan pendapatan keluarga melalui pemberdayaan ekonomi keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera.

Berdasarkan hasil penelitian, peran-peran tersebut sudah dilakukan kader IMP melalui KIE perorangan, KIE kelompok, maupun KIE massa. Meskipun dengan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan yang relatif terbatas, para kader IMP berusaha untuk melakukan kegiatan penyuluhan, motivasi dan konseling kepada masyarakat melalui media tersebut. Sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh para kader IMP agar dapat menjalankan perannya dalam KIE dan konseling adalah fasilitasi berupa pembinaan dan pelatihan serta pendampingan dari penyuluh KB yang saat ini masih sangat kurang.

Menurut Zajonc dalam BKKBN (2013) menjelaskan bahwa kehadiran orang lain dianggap menimbulkan efek pembangkit energi pada perilaku individu. Efek ini terjadi pada berbagai situasi sosial, bukan hanya di depan orang yang menggairahkan kita. Energi yang meningkat akan mempertinggi kemungkinan dikeluarkannya respon yang dominan. Respon dominan adalah perilaku yang kita kuasai. Bila respon yang dominan itu

adalah yang benar, terjadi peningkatan prestasi. Bila respon dominan itu adalah yang salah, terjadi penurunan prestasi. Untuk pekerjaan yang mudah, respon yang dominan adalah respon yang benar, karena itu peneliti-peneliti melihat kelompok mempertinggi kualitas kerja individu.

Dengan demikian dengan hadirnya penyuluh KB maupun petugas lain yang terkait dalam mendampingi kader IMP diharapkan dapat menambah semangat dan kualitas kader IMP dan menjalankan peran KIE dan konseling. Namun dengan kondisi jumlah penyuluh KB yang terbatas, upaya pendampingan ini belum dapat berjalan secara efektif.

Tujuan dilaksanakannya KIE, yaitu untuk mendorong terjadinya proses perubahan perilaku kearah yang positif, peningkatan pengetahuan, sikap dan praktik masyarakat (klien) secara wajar sehingga masyarakat melaksanakannya secara mantap sebagai perilaku yang sehat dan bertanggung jawab (BKKBN, 2013). Sedangkan konseling perorangan menurut Prayitno dan Amti (2004) adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (disebut konselor) kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah (disebut klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien.

Demikian pula dengan apa yang disampaikan oleh para kader IMP bahwa KIE dan Konseling penting karena dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat serta membantu masyarakat dalam hal pemenuhan pelayanan program KB.

d. Pencatatan Pendataan dan Pemetaan Sasaran.

Pencatatan dan pelaporan yang dilakukan oleh kader IMP merupakan kegiatan dari sistem pencatatan dan pelaporan program KKB. Sistem pencatatan dan pelaporan menyediakan data secara teratur dan terus-menerus tentang jalannya pelaksanaan program KKB. Sistem pencatatan dan pelaporan program KKB diharapkan dapat menyediakan berbagai informasi program KKB di seluruh wilayah sampai ke tingkat kecamatan dan desa (BKKBN, 2013).

Data dan informasi hasil pencatatan dan pelaporan program KKB diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan, perencanaan, pemantauan dan penilaian, serta pengendalian program. Oleh karena itu data dan informasi yang dihasilkan harus akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Salah satu ujung tombak dari keberhasilan program KKB adalah terletak pada bagusnya pencatatan dan pelaporan program tersebut.

Menurut BKKBN (2013) kegiatan pencatatan dan pelaporan di tingkat desa yang seharusnya dapat dilakukan oleh kader IMP terdiri dari :

- 1) Kartu Data Potensi PPKBD (K/0/PPKBD/15).
- 2) Kartu Data Potensi Sub PPKBD (K/0/Sub PPKBD/15).
- 3) Kartu Data Potensi Kelompok KB (K/0/POK-KB/15).
- 4) Register Pembinaan PUS dan Peserta KB (R/1/PUS/15).
- 5) Laporan Bulanan Pengendalian Lapangan Tingkat Desa/Kelurahan (F/1/Dal/15).

Sedangkan pendataan keluarga adalah kegiatan pengumpulan data primer tentang data demografi, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan data

individu anggota keluarga yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah (Pemda dan BKKBN) secara serentak pada waktu yang telah ditentukan (Juli-September) setiap tahun melalui kunjungan ke keluarga dari rumah ke rumah dengan wawancara dan observasi. Pemutakhiran data keluarga adalah kegiatan pendataan keluarga dengan cara memperbaiki, merubah, dan menambah data keluarga serta individu anggota keluarga yang terhimpun dalam *database* keluarga yang mutakhir, setiap periode waktu pendataan keluarga (BKKBN, 2013).

Secara umum, tujuan pendataan keluarga adalah diperolehnya *database* keluarga dan anggota keluarga yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran secara tepat dan menyeluruh mengenai keadaan di lapangan sampai ke tingkat keluarga tentang hasil-hasil pelaksanaan program KKB. Selanjutnya, *database* ini dapat digunakan untuk kepentingan operasional langsung di lapangan serta untuk kepentingan penetapan kebijakan, perencanaan, pengendalian, dan penilaian oleh pengelola dan pelaksana di semua tingkatan. Lebih spesifik, pendataan keluarga bertujuan untuk menghasilkan data dan informasi tentang data demografi, keluarga berencana, tahapan keluarga sejahtera, dan anggota keluarga (BKKBN, 2013).

Menurut BKKBN (2013) langkah-langkah pelaksanaan pendataan keluarga, pemutakhiran data keluarga dan pemetaan PUS dilakukan sebagai berikut :

- 1) Pendataan dilakukan secara lengkap meliputi seluruh keluarga dan penduduk yang berdiam di suatu wilayah kerja sub PPKBD, dusun/RW atau RT (rukun tetangga).

- 2) Pengisian Register Pendataan Keluarga (R/I/KS) atau Formulir MDK (F/I/MDK) dilakukan melalui kunjungan dari rumah ke rumah.
- 3) Data yang diisikan ke dalam R/I/KS atau F/I/MDK tidak boleh berdasarkan sumber data dari catatan yang telah ada di PPKBD, data/catatan pada PLKB atau petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang di desa/kelurahan dan data/catatan lain yang telah ada.
- 4) Sebelum melakukan pendataan dari rumah ke rumah terlebih dahulu dibuat sket letak rumah pada selembar kertas. Sket tersebut selanjutnya akan dipindahkan ke dalam peta keluarga sejahtera yang sebenarnya.
- 5) Untuk memudahkan dalam pembuatan sket peta keluarga yang terlewat di data, maka kunjungan kepada keluarga yang ada dilakukan secara berurutan menurut susunan/lokasi tempat tinggal mereka masing-masing. Jadi tidak meloncat-loncat dari satu tempat/lokasi ke tempat/lokasi lainnya.

Dalam hal pencatatan dan pelaporan secara normatif kader IMP belum mampu menjalankan perannya. Kader IMP hanya melaporkan perolehan akseptor baru tiap bulannya, bahkan kader sub PPKBD dan kelompok KB tidak melakukan pencatatan dan pelaporan sama sekali. Sedangkan dari kegiatan pendataan keluarga didahului dengan pelatihan di tingkat kecamatan dan desa dilanjutkan dengan kegiatan pendataan dengan kunjungan rumah (*door to door*).

Kader IMP dalam menjalankan peran pencatatan pendataan dan pemetaan sasaran diharapkan dapat :

- 1) IMP melakukan pencatatan kegiatan secara rutin dan ikut melaksanakan pendataan keluarga yang dilakukan satu tahun sekali.
- 2) Bersama penyuluh KB/PLKB melakukan pemetaan sasaran (kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan lain-lain).
- 3) IMP juga diharapkan mampu memanfaatkan hasil pendataan dan peta sasaran bagi kepentingan pembinaan di tingkat wilayahnya dan menuangkannya ke dalam peta PUS/peta keluarga.
- 4) Melakukan intervensi kegiatan-kegiatan di desanya berdasarkan peta PUS/peta keluarga yang dibuat.

Di bawah pembinaan dan bimbingan penyuluh KB, kader IMP telah melaksanakan pendataan keluarga maupun pemutakhiran data keluarga yang dilaksanakan setiap tahun. Setelah melakukan pendataan keluarga kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan peta keluarga. Mereka juga membuat laporan dan melakukan sosialisasi hasil dari pendataan keluarga. Namun berdasarkan hasil penelitian dalam hal pemanfaatan hasil pendataan keluarga yaitu dengan menindaklanjutinya dengan pembuatan R/1/PUS/15 dan pemetaan sasaran, belum dilakukan oleh kader IMP. Hasil pendataan keluarga hanya dikumpulkan kepada PPKBD dan penyuluh KB. Demikian juga dalam pembuatan kartu data potensi PPKBD, sub PPKBD, dan kelompok KB, serta laporan bulanan. selama ini yang mengerjakan adalah penyuluh KB.

Penyuluh KB diharapkan mampu untuk memberikan pembinaan dan pendampingan agar kader IMP dapat memiliki catatan terutama R/1/PUS/15 yang merupakan catatan nama PUS, kategori kesertaan KB , serta alasan tidak

ikut KB. Register ini sangat penting dimiliki oleh kader karena merupakan peta petunjuk bagi para kader IMP untuk melakukan pembinaan program KKB di wilayahnya.

Dilihat dari aspek kepentingan, menurut (BKKBN, 2015) bahwa ketersediaan data dan informasi yang cepat, tepat, dan akurat sangat bermanfaat untuk penentuan sasaran yang lebih tajam berdasarkan kondisi, potensi, dan kebutuhan aktual yang ada di setiap tingkatan wilayah. Disamping itu juga sangat bermanfaat untuk kepentingan pembangunan keluarga melalui program kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga. Bagi para kader IMP bahwa kegiatan pencatatan, pendataan dan pemetaan sangat diperlukan karena sebagai bahan evaluasi terhadap program KB serta sebagai pegangan dalam melakukan intervensi kegiatan.

e. Pelayanan Kegiatan.

Pelayanan kegiatan yang dilakukan oleh kader IMP sudah memenuhi norma-norma yang ada. Pelayanan kegiatan dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok sudah menggunakan prosedur yang baku. Secara perorangan kader IMP melakukan pelayanan terhadap calon peserta KB pil dan kondom, pelayanan KB dengan rujukan, serta pelayanan KB serentak. Sedangkan secara kelompok disampaikan melalui pertemuan posyandu dan beberapa kelompok kegiatan.

Peran pelayanan kegiatan yang diharapkan dari kader IMP yaitu :

- 1) Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yaitu usia ideal bagi pria dan wanita untuk menikah (25 dan 21 tahun), kesehatan reproduksi,

penanggulangan HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya, penyalahgunaan NAPZA, dan lain sebagainya.

- 2) Pengaturan kelahiran antara lain pemakaian alat kontrasepsi sesuai umur dan kondisi kesehatan ibu, jumlah anak, jarak kelahiran dan umur anak terkecil.
- 3) Pembinaan ketahanan keluarga melalui BKB, BKR dan BKL.
- 4) Peningkatan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan ekonomi keluarga melalui UPPKS atau kegiatan ekonomi produktif lainnya.

Seperti halnya dalam peran KIE dan konseling yang cenderung untuk mengajak dan memotivasi warga masyarakat, maka dalam peran pelayanan kegiatan ini lebih kepada tindak lanjut dari peran KIE dan konseling yaitu melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap keluarga dan kelompok kegiatan. Kader IMP melakukan penyuluhan kesehatan reproduksi dan alat kontrasepsi rasional, baik melalui KIE perorangan maupun kelompok, selanjutnya kader IMP melakukan rujukan bagi keluarga yang akan ikut KB terutama yang tidak dilakukan secara mandiri, misalnya KB MKJP IUD atau implan. Di dalam pembinaan kelompok BKB dan BKL dilaksanakan oleh kader IMP bersamaan dengan pelaksanaan posyandu. Sedangkan pembinaan terhadap kelompok BKR dan UPPKS menggunakan waktu tersendiri .

Dari hasil penelitian diketahui bahwa permasalahan dalam pelayanan kegiatan ini adalah kurangnya pembinaan, pendampingan, pelatihan, dan fasilitasi lainnya. Dalam hal fasilitasi perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas kader IMP melalui fasilitasi media penyuluhan. Bahwa salah satu kegiatan dalam penyelenggaraan penyuluhan adalah penyampaian informasi

kepada khalayak. Informasi tersebut biasa disampaikan secara langsung dengan tatap muka atau tidak langsung dengan menggunakan media penyuluhan.

Menurut Zakaria (2002) bahwa penggunaan media penyuluhan akan membantu memperjelas informasi yang disampaikan kepada penggunanya, karena dapat lebih menarik, lebih interaktif, dapat mengatasi batasan ruang, waktu dan indera manusia. Agar informasi yang disampaikan bisa lebih jelas dan mudah dipahami sesuai dengan tujuan yang akan dicapai maka informasi tersebut perlu dikemas sesuai dengan karakteristik dari setiap media yang digunakan. Selain itu untuk mendukung efektifitas dalam kelompok kegiatan perlu dikembangkan media KIE kreatif dengan harapan agar para keluarga lebih tertarik untuk ikut aktif dalam kelompok kegiatan (poktan) yang ada.

Menurut BKKBN (2015) bahwa arah kebijakan dan strategi nasional dalam program KKB yang berhubungan dengan pelayanan kegiatan antara lain adalah:

- 1) Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas.
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan KB dan jejaring pelayanan, serta pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk pelayanan KB.
- 3) Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan MKJP untuk mengurangi resiko *drop out* maupun penggunaan non MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber

KB serta pemberian pelayanan KB lanjutan dengan mempertimbangkan prinsip rasional, efektif dan efisien (REE).

- 4) Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB, serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB.
- 5) Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB.
- 6) Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan, sosialisasi mengenai pentingnya wajib belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, dan peningkatan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja.
- 7) Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber KB.

Dalam menunjang kebijakan pemerintah tersebut, menurut kader IMP pelayanan kegiatan sangat penting untuk dilakukan karena dapat membantu masyarakat untuk memperoleh informasi serta pelayanan KB. Selain itu kelompok kegiatan juga membutuhkan pelayanan dan pendampingan agar dapat berjalan secara rutin.

f. Kemandirian.

Apabila ditinjau dari aspek norma-norma bahwa upaya kemandirian yang dilakukan oleh kader IMP dapat diterima oleh masyarakat setempat. Upaya

kemandirian terutama yang berupa iuran dan jimpitan dilakukan dengan memperoleh kesepakatan anggota (warga masyarakat) melalui musyawarah dalam pertemuan sehingga tidak ada yang merasa keberatan.

Upaya kemandirian yang dilakukan oleh kader IMP meliputi kemandirian dalam pengelolaan kegiatan, antara lain :

- 1) Mengupayakan pelayanan kontrasepsi.
- 2) Pendanaan kelompok melalui iuran, jimpitan dan penjualan produk setempat.
- 3) Mendorong kemandirian kelompok kegiatan (poktan) dalam memfasilitasi pelayanan KB.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari peran kemandirian yang ada pada umumnya sudah dilakukan oleh para kader IMP dengan cara penyediaan alkon ulang (pil dan kondom). Pendanaan kelompok melalui iuran dan jimpitan. Sedangkan penjualan produk lokal juga dilakukan namun tidak ada intervensi dan pendekatan kelompok artinya anggota kelompok melakukan penjualan produk lokal secara sendiri-sendiri. Wujud fasilitasi kelompok kegiatan dalam pelayanan KB di samping pelayanan KB ulang pil dan kondom dilakukan melalui pendaftaran dan pendampingan terhadap calon akseptor yang akan ikut program KB.

Hasil dari wawancara yang dilakukan dalam upaya peran kemandirian, anggota kelompok kegiatan terutama kelompok UPPKS sangat memerlukan pembinaan dan latihan ketrampilan serta akses permodalan dan pemasaran. Hal ini merupakan tantangan bagi pengelola program KKB untuk dapat menjawab

permasalahan tersebut sehingga program KKB akan lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Intervensi dari program pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan dan sangat cocok untuk peningkatan peran kader IMP mengingat pada dasarnya kader IMP merupakan pembina dari suatu kelompok. Menurut Zubaedi (2013) program pemberdayaan masyarakat untuk usaha kecil yang dilakukan melalui pendekatan kelompok akan lebih efektif, mengingat akumulasi kapital akan sulit dicapai di kalangan masyarakat dengan usaha kecil. Dengan kata lain akumulasi kapital harus dilakukan bersama-sama dalam wadah kelompok atau usaha bersama. Oleh sebab itu kelompok kegiatan terutama UPPKS sangat cocok dikembangkan melalui program pemberdayaan ini agar menjadi kelompok yang lebih produktif dan dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Tentu saja hal ini harus disertai dengan pendampingan secara efektif, disamping jenis usaha yang dilakukan disesuaikan dengan potensi serta kebutuhan masyarakat setempat.

Menurut Sumardjo (2012) bahwa pendekatan pemberdayaan yang bersifat *top down* di mana masyarakat dianggap sebagai obyek, terbukti tidak mampu memberdayakan masyarakat, masyarakat tidak menjadi mandiri tetapi justru tergantung pada program-program pemberdayaan. Idealnya pemberdayaan mampu mengubah sasaran baik secara individu, kelompok maupun masyarakat dari kondisi tidak berdaya ke kondisi berdaya dan bermuara pada kondisi mandiri.

Apabila ditinjau dari aspek kepentingan bahwa peran kemandirian sangat penting dilakukan oleh kader IMP karena dengan upaya kemandirian dapat

meningkatkan semangat para anggota, meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta dapat memenuhi kebutuhan kegiatan kelompok secara mandiri.

2. Analisis Kendala Peran Kader IMP

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan peran kader IMP. Beberapa kendala tersebut disampaikan oleh beberapa informan baik dari DissosP3AKB, penyuluh KB, kader IMP, serta warga masyarakat.

Dari DissosP3AKB kabupaten Klaten menyampaikan beberapa kendala sebagai berikut : jumlah sumber daya manusia (SDM) yang masih kurang, baik yang berada di tingkat kabupaten maupun penyuluh KB, keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana dan prasarana, bentuk organisasi perangkat daerah (OPD), kemampuan kader yang masih kurang dan banyak kader terutama kader sub PPKBD dan kelompok KB yang kurang aktif, serta dukungan pemihakan alokasi anggaran APBDesa yang masih kurang.

Beberapa kendala yang disampaikan penyuluh KB berupa : jumlah penyuluh KB yang masih kurang, jumlah honor PPKBD yang masih bervariasi/belum seragam, ada beberapa desa yang jumlah honorinya sudah cukup namun ada yang honorinya masih kurang, beberapa kader sub PPKBD dan kelompok KB kurang aktif, kurangnya jumlah kader kelompok kegiatan, kemampuan kader IMP yang masih kurang karena rata rata memiliki tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya pembinaan dan pelatihan terhadap kader, sarana dan prasarana KIE masih kurang, alokasi anggaran dari pemerintah desa untuk program KKB masih kurang termasuk belum adanya honor kader sub PPKBD dan kelompok KB , serta data program yang kurang lengkap.

Sedangkan informan yang berasal dari kader IMP dan warga masyarakat menyampaikan beberapa kendala yang mereka hadapi adalah : masih ada keengganan masyarakat untuk mengikuti kelompok kegiatan, suami tidak mengizinkan untuk KB terutama MOW, rumor tentang alkon implan dan IUD, kurangnya kader kelompok kegiatan, kurangnya kepedulian pemerintah desa, terlalu banyak pertemuan akan memberatkan warga, pembinaan dari petugas kurang, sarana penyuluhan kurang/keterbatasan materi, kader tidak memiliki data basis sasaran, sulitnya ketemu warga di wilayah perumahan, pelatihan ketrampilan, dan akses permodalan.

Dari beberapa kendala tersebut ada beberapa kendala yang saling mempengaruhi antara yang satu dengan lainnya. Oleh karena itu dalam pembahasan ini akan dirangkum menjadi kendala yang merupakan pokok persoalan. Kendala-kendala pokok tersebut berupa kekurangan dalam hal : jumlah penyuluh KB, alokasi anggaran pemerintah, kemitraan dengan program pemberdayaan masyarakat, jumlah kader kelompok kegiatan (poktan), serta kualifikasi dan kompetensi kader IMP.

a. Jumlah Penyuluh KB.

Bila dibandingkan antara jumlah penyuluh KB sebanyak 60 orang dengan jumlah desa/kelurahan wilayah binaan yang ada di kabupaten Klaten yang berjumlah 401 desa/kelurahan maka seorang penyuluh KB memiliki wilayah binaan 6-7 desa/kelurahan. Hal ini jelas jauh dari cukup. Di mana perbandingan yang ideal adalah seorang penyuluh KB menangani wilayah binaan sebanyak 1 sampai dengan 2 desa/kelurahan.

Pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh KB tidak bisa merata sampai ke tingkat RW apalagi RT, akibatnya adalah beberapa peran yang dilakukan oleh kader IMP menjadi tidak efektif. Sehingga tidak mengherankan apabila masih muncul beberapa persoalan misalnya : ada suami yang tidak mengizinkan istrinya untuk ikut KB, beredarnya rumor negatif tentang penggunaan alat kontrasepsi, keengganan masyarakat untuk mengikuti pertemuan dan kelompok kegiatan, serta kader IMP tidak memiliki data basis sebagai pegangan untuk melakukan kegiatan program.

Dengan berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan peluang bagi pemerintah untuk dapat merekrut tenaga penyuluh KB baik sebagai PNS maupun P3K, sehingga kebutuhan akan tenaga penyuluh KB lambat laun akan terpenuhi.

b. Alokasi Anggaran dari Pemerintah.

Hampir sama dengan permasalahan kurangnya jumlah penyuluh KB, kurangnya alokasi anggaran dari pemerintah pusat, daerah, dan desa berakibat pada kurangnya fasilitasi yang berupa pelatihan dan pembinaan pada kader, selain itu juga sarana dan prasarana untuk kader menjadi sangat terbatas. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan peran kader IMP karena apabila kita melihat kondisi bahwa rata-rata tingkat pendidikan kader yang relatif masih rendah maka sangat berpengaruh terhadap kualitas dari pelaksanaan peran yang diembannya. Terutama dalam pelaksanaan KIE dan konseling serta pelayanan kegiatan.

Demikian juga kepedulian dari pemerintah desa untuk mengalokasikan APBDesa dalam program KKB juga masih minim. Alokasi anggaran baru sebatas untuk insentif/honorarium PPKBD, itupun masih dalam jumlah yang relatif kecil dan tidak seragam antara desa/kelurahan yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan honorarium untuk kader sub PPKBD dan kelompok KB serta kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan program KKB belum ada. Kondisi ini jelas dapat mempengaruhi semangat para kader IMP yang dapat kontra produktif bagi keberhasilan program.

Namun dibalik kondisi tersebut sebenarnya komitmen pemerintah untuk mendukung program KKB cukup tinggi. Jalinan kemitraan dan komunikasi yang dilakukan oleh DissosP3AKB dan penyuluh KB dengan mitra terkait baik pemerintah maupun swasta juga cukup baik. Kondisi ini diperkuat dengan jumlah kader IMP yang ada di setiap tingkatan wilayah serta dengan respon dan semangat yang tinggi.

Oleh karena itu hal ini merupakan peluang khususnya DissosP3AKB serta penyuluh KB untuk memanfaatkan hadirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan jalan melakukan advokasi yang lebih intensif agar Desa dapat mengalokasikan anggaran secara memadai bagi program KKB tentu saja perlu dibarengi dengan petunjuk teknis alokasi anggaran program KKB melalui APBDes.

c. Kemitraan dengan Program Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk meningkatkan peran kader IMP dalam hal kemandirian diketahui bahwa kader memerlukan memerlukan tambahan permodalan serta pelatihan ketrampilan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pendekatan yang

perlu dilakukan adalah melalui kemitraan dengan program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, untuk mengembangkan potensi yang ada menjadi tindakan nyata.

Menurut Hutomo (2000) pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri maupun aspek kebijakannya.

Salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat adalah permodalan. Lambannya akumulasi kapital di kalangan pengusaha mikro, kecil, dan menengah, merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Oleh sebab itu tidak salah, kalau dalam pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, pemecahan dalam aspek modal ini penting dan memang harus dilakukan.

Selain masalah permodalan dan pelatihan ketrampilan, usaha mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya usaha tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan, atau walaupun dapat dijual tetapi dengan harga yang amat rendah. Oleh sebab, itu komponen penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran.

Dari berbagai program pemberdayaan masyarakat tentu saja telah memberikan manfaat yang cukup signifikan bagi peningkatan kesejahteraan. Namun tidak sedikit pula masyarakat yang gagal memanfaatkan program ini. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan antara lain kurangnya pendampingan terhadap kelompok penerima bantuan program atau dapat juga disebabkan oleh program yang diterapkan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu faktor pendampingan juga sangat perlu untuk diperhatikan dalam pemanfaatan program pemberdayaan masyarakat ini.

d. Jumlah Kader Kelompok Kegiatan (Poktan).

Kelompok Kegiatan dalam program KKB terdiri dari kelompok BKB, BKR, BKL, dan UPPKS yang biasanya dibentuk pada tingkat RW atau posyandu. Dari beberapa kelompok kegiatan tersebut yang memerlukan jumlah kader relatif banyak agar dapat berjalan secara efektif adalah kelompok kegiatan BKB karena harus membina dan mendampingi balita tiap kelompok umur dari 0-1 tahun sampai dengan 4-5 tahun. Sehingga apabila hanya ditangani oleh kader di tingkat RW atau posyandu maka akan menemui kesulitan mengingat jumlah kader yang terbatas.

Oleh karena itu perlu dilakukan upaya agar kelompok kegiatan BKB dapat berjalan secara efektif. Alternatif yang dapat dilakukan adalah melalui pembentukan poktan BKB dengan melibatkan pengurus dan pelaksana tingkat desa, jadi poktan BKB dibina dan didampingi oleh kader tingkat desa. Selain itu dapat juga dengan memanfaatkan tenaga dari muda-mudi/remaja yang ada di wilayah RW atau posyandu tersebut untuk ikut membina dan mendampingi kegiatan poktan BKB.

e. Kualifikasi dan Kompetensi Kader IMP

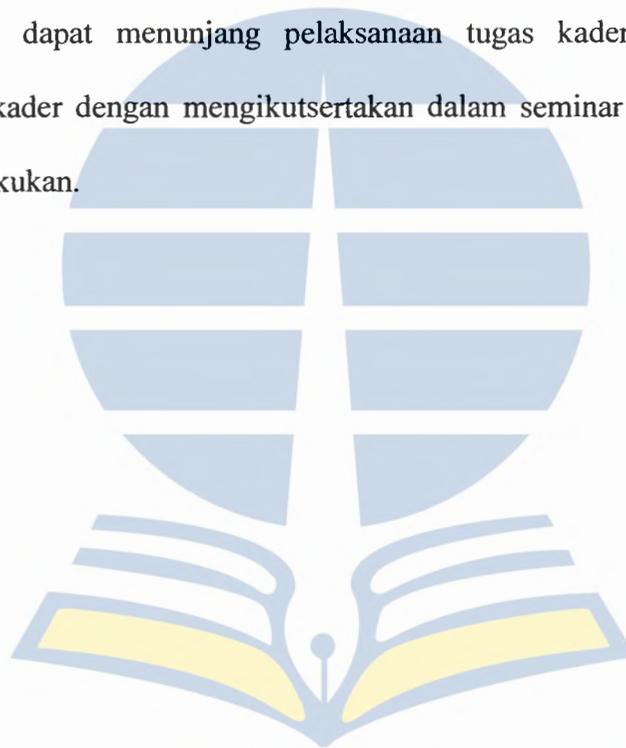
Kualifikasi dan kompetensi kader IMP merupakan faktor internal yang mempengaruhi kinerja para kader dalam menjalankan perannya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan ibu Nuryanti, SKM (DissosP3AKB) dan Dra. Suryatmi (koordinator penyuluh KB kecamatan Kemalang) bahwa ada beberapa kader IMP yang usianya sudah lanjut serta rata-rata pendidikannya masih rendah sehingga memiliki kemampuan yang sangat terbatas.

Mengingat bahwa kader merupakan tenaga yang berasal dari masyarakat, dipilih oleh masyarakat itu sendiri yang bekerja secara sukarela untuk membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta syarat dan kriteria pemilihan kader yang relatif sederhana, maka pendekatan melalui peningkatan kompetensi lebih tepat dilakukan dibandingkan dengan peningkatan kualifikasi.

Kompetensi identik dengan pengetahuan dan keterampilan kader dalam menjalankan perannya. Menurut Simon, dkk. (1995) bahwa peningkatan pengetahuan dan ketrampilan kader sangat dipengaruhi adanya pelatihan. Sedangkan menurut Strauss dan Syaless di dalam Notoatmodjo (1989) pelatihan berarti mengubah pola perilaku, karena dengan pelatihan maka akhirnya akan menimbulkan perubahan perilaku. Pelatihan adalah bagian dari pendidikan yang menyangkut proses belajar, berguna untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku, dalam waktu relatif singkat dan metodenya mengutamakan praktek daripada teori. Pelatihan merupakan suatu proses belajar mengajar terhadap pengetahuan dan

keterampilan tertentu serta sikap agar peserta semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik, sesuai dengan standar.

Dengan demikian dalam rangka meningkatkan kompetensi para kader dapat dilakukan dengan menambah frekuensi program pelatihan yang selama ini masih sangat kurang karena hanya diikuti oleh beberapa kader PPKBD dan pelaksanaannya di tingkat provinsi. Ke depan diharapkan pelatihan kader bisa dilaksanakan di tingkat kabupaten dengan peserta kader IMP dari semua tingkatan. Disamping itu fasilitasi berupa pembinaan dari penyuluh KB, sarana prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan tugas kader, serta upaya pemberdayaan kader dengan mengikutsertakan dalam seminar dan *workshop* perlu untuk dilakukan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ditinjau dari 3 (tiga) aspek peran yang terdiri dari norma-norma, kemampuan, dan kepentingan maka dari 6 (enam) peran kader IMP dalam program KKB di kabupaten Klaten, peran yang telah dapat dilakukan adalah pertemuan, KIE dan konseling, pelayanan kegiatan, dan kemandirian. Namun peran-peran tersebut belum dilaksanakan secara optimal karena beberapa kendala yang dihadapi. Ditinjau dari aspek kepentingan bahwa semua peran kader IMP penting dan bermanfaat bagi program KKB. Sedangkan apabila ditinjau dari aspek norma-norma dan kemampuan maka dapat diketahui bahwa dalam peran pengorganisasian masih dilakukan melalui penunjukan dan belum ada tindak lanjut berupa pembentukan pengurus serta pembagian tugas. Namun dalam hal ini PPKBD mampu menjadi koordinator bagi kader di bawahnya. Dalam peran pendataan, pemetaan, dan pencatatan, hanya pendataan dan pemetaan yang telah dilakukan, sedangkan dalam hal memanfaatkan hasil pendataan dan peta sasaran yang merupakan tindak lanjut dari pendataan dan pemetaan keluarga belum dilaksanakan. Demikian juga dalam pencatatan dan pelaporan yang baku.
2. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh kader IMP dalam menjalankan perannya. Namun dapat dirangkum bahwa beberapa kendala tersebut bermuara pada : jumlah penyuluh KB yang relatif minim dibandingkan dengan jumlah wilayah binaan yang ada, dukungan alokasi anggaran program

KKB dari pemerintah yang terbatas, kurangnya jalinan dengan kemitraan dengan program pemberdayaan masyarakat, kurangnya jumlah kader kelompok kegiatan (poktan), serta kualifikasi dan kompetensi kader yang masih terbatas.

B. Saran

1. Pemerintah melalui BKKBN melakukan perekrutan tenaga penyuluh KB baik sebagai PNS maupun P3K, sehingga terdapat keseimbangan ratio antara penyuluh KB dengan jumlah desa/wilayah binaan.
2. Pemerintah melalui BKKBN maupun DissosP3AKB dapat mengalokasikan anggaran fasilitasi bagi penguatan peran kader IMP berupa pembinaan, pelatihan, dan pengadaan buku pedoman serta media KIE dan konseling untuk kader IMP.
3. DissosP3AKB dan penyuluh KB melakukan advokasi yang lebih efektif terhadap pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa serta para *stakeholder* lainnya agar pemerintah desa dapat meningkatkan alokasi APBDes untuk program KKB. Upaya ini perlu didukung dengan pembuatan petunjuk teknis alokasi anggaran program KKB melalui APBDes serta pelatihan advokasi terhadap para penyuluh KB.
4. Perlunya jalinan kemitraan dengan program pemberdayaan masyarakat untuk menjawab kebutuhan para kader IMP dalam hal meningkatkan kemandirian.
5. Perlunya dukungan kebijakan yang dapat membangkitkan keberadaan poktan sehingga poktan dapat hidup dan berkembang. Dukungan dapat berupa penambahan alokasi anggaran, pengembangan media KIE yang lebih menarik,

pelatihan pengelola poktan yang lebih efektif. Hal ini penting karena poktan memiliki fungsi sebagai media yang cukup efektif bagi para kader IMP dalam menjalankan perannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abcarian, Gilbert and George S. Masannat. 1970. *Contemporary Political Systems*. New York: Charles Scribner's Sons.
- Ahmad, Zaini, dan Taylor, Dennis. 2009. "Commitment to Independence by Internal Auditor: The Effects of Role Ambiguity and Role Conflict." *Managerial Auditing Journal*, Vol. 24, No. 9, pp. 899-925.
- Ali, Faried. 2013. *Teori dan Konsep Administrasi : Dari Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefinisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amirullah dan Budiyono, Haris. 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Ilmu Graha.
- Anderson, James E. 1979. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bailey, Mary. 1992. "Do Physicists Use Case Studies? Thoughts on Publik Administration Research". *Publik Administration Review*, 52.1 (Jan/Feb 1992): 47.
- Berry, David. 2003. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Biddle, B.J and Thomas, E.J. 1966. *Role Theory : Concept and Research*. NewYork: Wiley.
- Cahyono, Dwi. 2008. "Persepsi Ketidakpastian Lingkungan, Ambiguitas Peran, dan Konflik Peran Sebagai Mediasi antara Program Mentoring dengan Kepuasan Kerja, Prestasi Kerja dan Niat Ingin Pindah." Disertasi tidak dipublikasikan. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Chandler, R. C. & J. C. Plano. 1988. *The Public Administration Dictionary*. Second Edition. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO Inc.
- Cholid, Sofyan. 2009. *Keluarga dalam Perspektif Fungsional*. Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial UI. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Cochran, Charles L. & Eloise F. Malone. 1995. *Publik Policy: Perspectives and Choices*. New York: Mc. Graw-Hill, Inc.

- Cooper, Philip J. et al. 1998. *Public Administration for the Twenty-First Century*. Fort Worth: Harcourt Brace College Publishers.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Penj. Achmad Fawaid. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cutlip, Scott M. 1957. *Effective Public Relation*. New York: Prentice-Hall IMC.
- Damajanti, A. 2003. "Hubungan antara Mentoring dengan Ambiguitas Peran, Konflik Peran, Kesan Ketidakpastian Lingkungan, Kinerja, dan Niat Pindah di Lingkungan Auditor Junior (Studi Kasus pada KAP di Indonesia)." Tesis tidak dipublikasikan. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Davis, Keith, and Newsstrom, W, Jhon. 1989. *Human Behavior A Work : Organizational Behavior*. New York: McGraw Hill International.
- Dessier, Gary. 1980. *Organization Theory : Integrating Structure and Behavior*. Englewood Cliffs-New Jersey: Prentice-hall, Inc.
- Dessler, G. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Indeks.
- Gunawan L. A., dan Sutejo, Hari. 1980. *Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa*. Jakarta: IAKAMI.
- Hendropuspito, D., OC. 1989. *Sosiologi Sistematis*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Henry, Nicholas. 2004. *Public Administration and Public Affairs*. 9th Ed. Upper Sadle River. New Jersey: Pearson Prentice-Hall.
- Herartri R. 2008. *Peran Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan (IMP) dalam Pelaksanaan Program KB di Era Otonomi Daerah*. Jurnal Ilmiah KB & KR, Th II Nomor 2, 2008. Jakarta: Puslitbang Keluarga Sejahtera dan Kualitas Perempuan, BKKBN.
- Hersey, Faul, Blanchard. 1995. *Management of Organization Behavior*. Terjemahan Agus Darma. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Horton, Paul B., dan Hunt, Chester L. 1993. *Sosiologi*, (Alih Bahasa : Aminuddin Ram, Tita Sobari). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hutomo, M.Y. 2000. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi : Tinjauan Teoritik dan Implementasi". *Seminar Sehari Pemberdayaan Masyarakat*. Makalah. 6 Maret 2000. Jakarta: Bappenas.
- Keban, Yermias.T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep, Teori dan Isu*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media.

- Keliat, B. A. 1992. *Gangguan Konsep Diri*. Jakarta: PB Kedokteran EGC.
- Kozier, Barbara. 1995. *Peran dan Mobilitas Kondisi Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Gunung Agung.
- Maaly Guimei. 2001. "Community Workers as Extension of Nursing Personnel". *Journal of Nursing Scholarship*. March 2001. Alexandria: Faculty of Nursing University of Alexandria.
- Mantra, Ida Bagus. 1987. *Kader Tenaga Harapan Masyarakat*. Jakarta: Proyek Pengembangan Penyuluhan Gizi.
- Maslow. 1943. *Theory of Human Motivation*. Psychological Review.
- Middleton, John. 2002. *Organizational Behavior*. United Kingdom: First published by Capstone Publishing (a Wiley company).
- Huberman, dan Miles. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, D. 2005. *Ilmu Komunikasi : Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Narwoko, Dwi dan Bagong Suyanto. 2007. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Nazir, Moh. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nigro, A. Felix and Nigro, G. Liyd. 1984. *Modern Public Administration*. New York: Harper International Edition.
- Notoatmodjo, Soekidjo, dan Sarwono, Solita. 1987. *Pengantar Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta: BPKM FKM Universitas Indonesia.
- Notoatmodjo. 1989. *Dasar-dasar Pendidikan dan Pelatihan*. Jakarta: BPKM UI.
- Noviyanti, 2015. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Surabaya: FSIH Unesa.
- Pasolong, H. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Patton, M.Q. 1980. *Qualitative Evaluation Methods*. Beverly Hills, CA: Sage Publication.

- Pffifner, J. Dan Presthus, R.V. 1960. *Public Administration*. New York: The Ronald Press Company.
- Prayitno dan Erman Amti. 2004. *Dasar-Dasar Bimbingan Konseling*. Cetakan ke dua. Jakarta: Rineka Cipta.
- Puspasari A. 2002. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Kader Posyandu di Kota Sabang Propinsi Nangroe Aceh Darussalam." Skripsi. Bogor: Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.
- Raho, Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Robbins, Stephen P. 1978. *The Administrative Process: Integrating Theory and Practice*. New Delhi: Prentice-Hall of India Private Limited.
- Robbins, Stephen P. 2003. *Organizational Behavior, Tenth Edition*. New Jersey: Pearson Education, Inc. alih bahasa: Molan, Benyamin. (2006). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Gramedia.
- Rogers, E.M. 1973. *Communication Strategies for Family Planning*. New York, NY: Free Press.
- Rogers, Everett M. 1974. *Communication In Organization*. New York: The Free Press Macmillan Publishing.
- Rosenbloom, David H. 1993. *Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector*. Edisi ke tiga. New York: McGraw-Hill, Inc.
- Sarwono, S.W. 2002. *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Schermerhorn, R, John. 1991. *Managing Organization Behavior*. New York: John Publishing Inc.
- Shafritz, Jay M. & Hyde, Albert C. 1992. *Classics Of Public Administration*. 3rd Ed. California: Brooks/Cole Publishing Company Pacific Grove.
- Silalahi, Ulber.2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Simon, Herbert A. 1997. *Administrative Behavior: a Study of Decision-Making Processes in Administrative Organizations (4th ed.)*. New York: Free Press.
- Simon, MGB, Greene, W.H., Gottlieb, N.H. 1995. *Introduction to Health Education and Health Promotion*. Illionis USA: Waveland Press. Inc.
- Sinaga, Taruli R.2001. Makalah. *Peranan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Dalam Pembangunan Kesehatan Masyarakat*.

- Soekanto, S. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Stillman II, Richard J. 1992. *Public Admnistraion (Concepts and Cases)*. Boston, USA: Houghton Mifflin Company.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sukidin dan Damai, Damadi. 2011. *Administrasi Publik*. Yogyakarta: Laksbang Press Indo.
- Sumardjo. 2012. Review dan Refleksi Model Penyuluhan dan Inovasi Penyuluhan Masa Depan [makalah]. *Seminar Nasional Membangun Penyuluhan Masa Depan yang Berkeadilan dan Menyejahterakan*, 20 Februari 2012. Bogor: Ilmu Penyuluhan Pembangunan, Sekolah Pascasarjana, IPB..
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Terry, G.R., dan Leslie W. Rue. 2013. *Dasar-Dasar Manajemen*. Cetakan Keempatbelas. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thoha, Miftah. 2001. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Thompson, C. (2001, September 24). *Conservation of Resources Theory, A Sloan Work and Family Encyclopedia Entry*. Chestnut Hill, MA: Boston College
- Utomo ID, Arsyad SS dan Hasmi EN. 2006. *Village Family Planning Volunteers in Indonesia: Their Role in the Family Planning Programme. Reproductive Health Matters*. 2006:14(27):73-82. www.rhmjournal.org.uk. [30 Mei 2010].
- Wahyu Devita Riyani. 2011. *Peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Terhadap Keberhasilan Pencapaian Akseptor KB Pria Metode Kontrasepsi Medis Operatif Pria (MOP) (Studi Kualitatif di Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember)*. Skripsi. Jember: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember.
- Wahyuni, Sari. 2012. *Qualitative Research Method : Theory and Practice*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

- Widiastuti. 2006. "*Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Partisipasi Kader dalam Kegiatan Posyandu di Kelurahan Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Tahun 2006.*" Tesis. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.
- Wilonoyudho, Saratri. 2014. Artikel. *KB dan Otonomi Daerah*. Warta KB No.1. Tribulan I. Bidang Adpin. Semarang: BKKBN Provinsi Jateng.
- Zainun, Bukhari Haji. 1990. *Administrasi dan Manajemen Kepegawaian Pemerintah Negara Indonesia*. Jakarta: Haji Masagung.
- Zakaria, A. 2002. *Standar Teknis Media Penyuluhan Pertanian*. Jakarta: Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, Departemen Pertanian.
- Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Zulkifli, *Posyandu Kader Kesehatan*, dalam <http://www.libraryusu.com> diakses pada tanggal 26 September 2015.
- _____. 1995. *Pedoman Manajemen Peran Serta Masyarakat*. Jakarta: Dirjen Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes RI.
- _____. 2008. *Buku Pegangan Penyuluh Keluarga Berencana*. Jakarta: BKKBN.
- _____. 2010. *Pedoman Tata Cara Kerja PLKB/PKB Dalam Program KB Nasional di Tingkat Desa/Kelurahan*. Semarang: BKKBN Provinsi Jawa Tengah.
- _____. 2013. *KIE KKB Lini Lapangan*. Jakarta: BKKBN.
- _____. 2013. *Pedoman Institusi Masyarakat Pedesaan Dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional*. Semarang: BKKBN Provinsi Jawa Tengah.
- _____. 2013. *Teknik Advokasi dan KIE*. Media Pembelajaran BKL Seri 10. Semarang: BKKBN Provinsi Jawa Tengah.
- _____. 2014. *Panduan Penguatan Institusi Masyarakat Pedesaan / Perkotaan (IMP)*. Jakarta: BKKBN.
- _____. 2015. *Analisis Pendataan Keluarga Tahun 2015 Kabupaten Klaten*. Klaten: Kantor PP dan KB Kabupaten Klaten.
- _____. 2015. Menyibak Peralihan Kewenangan Pengelolaan PLKB. *Jurnal Keluarga*. Edisi 9. Jakarta: Direktorat AKIE BKKBN.

- _____. 2015. *Panduan Penguatan Institusi Masyarakat Pedesaan / Perkotaan (IMP)*. Jakarta: BKKBN.
- _____. 2015. *Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019*. Jakarta: BKKBN.
- _____. 2016. *Klaten Dalam Angka Tahun 2016*. Klaten: BPS kabupaten Klaten.
- _____. 2016. *Laporan Tahunan Kantor PP dan KB Tahun 2016*. Klaten: Kantor PP dan KB Kabupaten Klaten.
- _____. 2016. *Peraturan Bupati Klaten No. 47 Tahun 2016*. Klaten: Pemerintah Kabupaten Klaten.
- _____. 2017. *Petunjuk Teknis Kampung KB*. Direktorat Bina Lini Lapangan. Jakarta: BKKBN.

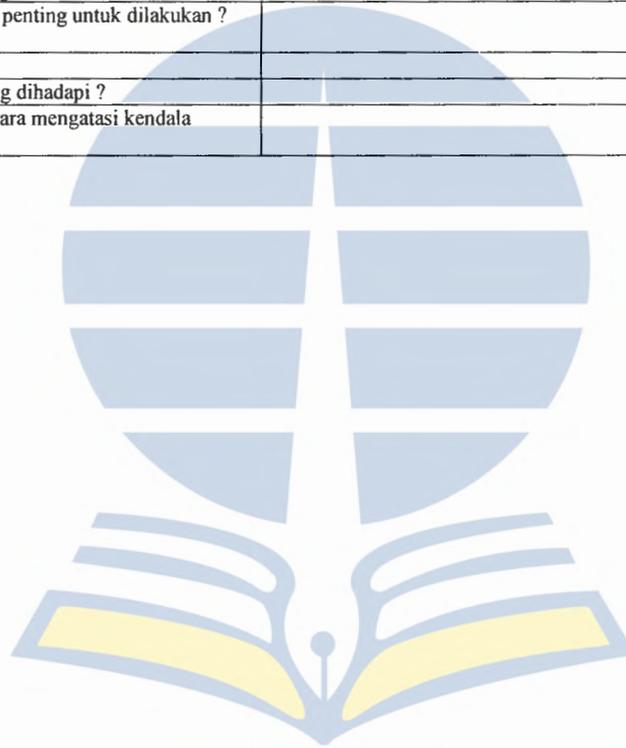


Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Informan		Kader IMP
Identitas		
a	Nama	
b	Umur	
c	Alamat	
d	Pendidikan	
e	Jabatan	
f	Pelaksanaan	
Pertanyaan		Jawaban
1	Bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh DissosP3AKB ?	
2	Bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh Koordinator Penyuluh KB dan Penyuluh KB ?	
3	Bagaimana fasilitasi dan dukungan yang diberikan oleh DissosP3AKB, Koordinator Penyuluh KB, Penyuluh KB, dan Pemerintah Desa ?	
4	Apakah pernah memperoleh pembinaan dan pelatihan dalam bidang Program KKB ?	
5	Menurut anda bagaimana pembinaan dan pelatihan dalam bidang Program KKB ?	
6	Bagaimana tanggapan saudara terhadap Program KKB ?	
7	ApakahSaudara tahu tentang IMP dan 6 pokok peran IMP ?	
8	Apa saja kendala yang saudara alami selama menjalankan tugas sebagai kader IMP ?	
9	Bagaimana cara saudara mengatasi kendala tersebut ?	
A. PENGORGANISASIAN		
1. Norma-norma		
10	Bagaimana proses pembentukan IMP ?	
11	Bagaimana fasilitasi dari pemerintah desa dalam pembentukan IMP dan pembuatan Surat Keputusan / Surat Tugas ?	
2. Kemampuan		
12	Apakah saudara sudah melakukan pembentukan pengurus dan pembagian tugas ?	
13	Apakah kelompok kegiatan dapat aktif berjalan ?	
3. Kepentingan		
14	Apakah pengorganisasian penting untuk dilakukan ? mengapa ?	
- Kendala		
15	Apa saja kendala yang dihadapi ?	
16	Bagaimana cara saudara mengatasi kendala tersebut ?	
B. PERTEMUAN		
1. Norma-norma		
17	Bagaimana proses persiapan pelaksanaan pertemuan kader IMP ?	
18	Bagimana proses pelaksanaan pertemuan ? Apakah saudara melakukan konsultasi dengan pemerintah desa, penyuluh KB, dan petugas lain dalam rangka pelaksanaan pertemuan ?	
2. Kemampuan		
19	Apakah saudara menyelenggarakan pertemuan rutin ?	
20	Apakah saudara memanfaatkan pertemuan rutin sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, pembinaan, evaluasi, pemecahan masalah, serta perencanaan kegiatan ?	
3. Kepentingan		
21	Apakah pertemuan penting untuk dilakukan ? Mengapa ?	
- Kendala		
22	Apa saja kendala yang dihadapi ?	
23	Bagaimana cara anda mengatasi kendala tersebut	

	?	
	C. KIE DAN KONSELING	
	1. Norma-norma	
24	Bagaimana jika ada warga masyarakat yang tidak setuju dengan ajakan saudara ?	
25	Bagaimana apabila ada keluhan dari klien yang sifatnya rahasia ?	
26	Apa yang saudara lakukan apabila tidak dapat menjawab/mengatasi permasalahan klien ?	
	2. Kemampuan	
27	Bagaimana saudara melakukan KIE dan Konseling perorangan ?	
28	Bagaimana saudara melakukan KIE kelompok dan massa ?	
29	Bagaimana saudara melakukan konsultasi dan rujukan terhadap permasalahan KIE dan Konseling ?	
30	Bagaimana kerjasama yang dijalin dengan tokoh masyarakat setempat ?	
	3. Kepentingan	
31	Apakah KIE dan Konseling penting untuk dilakukan ? Mengapa ?	
	- <i>Kendala</i>	
32	Apa saja kendala yang dihadapi ?	
33	Bagaimana cara saudara mengatasi kendala tersebut ?	
	D. PENCATATAN PENDATAAN DAN PEMETAAN SASARAN	
	1. Norma-norma	
32	Apakah R/R sudah menggunakan formulir yang baku dan dibuat rutin setiap bulan ?	
33	Apakah pendataan keluarga dilakukan melalui kunjungan rumah ?	
34	Apakah ada pelatihan pendataan keluarga di tingkat kecamatan dan desa ?	
35	Apakah hasil pendataan keluarga dilaporkan kepada pemerintah desa dan penyuluh KB secara berjenjang ?	
	2. Kemampuan	
36	Apakah saudara melakukan R/R secara rutin terhadap kegiatan yang dilaksanakan dengan mengikuti pola R/R yang baku ?	
37	Bagaimana proses pelaksanaan pendataan keluarga ?	
39	Apakah saudara sudah memanfaatkan hasil pendataan keluarga untuk kepentingan program KKB ?	
	3. Kepentingan	
40	Apakah pencatatan pendataan dan pemetaan sasaran penting untuk dilakukan ? mengapa ?	
	- <i>Kendala</i>	
41	Apa saja kendala yang dihadapi ?	
42	Bagaimana cara saudara mengatasi kendala tersebut ?	
	E. PELAYANAN KEGIATAN	
	1. Norma-norma	
43	Bagaimana saudara melakukan pelayanan terhadap calon peserta KB Pil dan Kondom serta pelayanan KB dengan rujukan ?	
44	Bagaimana saudara melakukan pelayanan terhadap kelompok kegiatan ?	
	2. Kemampuan	
45	Apakah saudara melakukan pembinaan, pendampingan, dan rujukan baik secara perorangan maupun kelompok dalam hal : PUP, Penanggulangan HIV/AIDS PMS dan Penyalahgunaan NAPZA, Pengaturan Kelahiran, Pembinaan Ketahanan Keluarga, serta Pemberdayaan Ekonomi Keluarga ?	
	3. Kepentingan	
47	Apakah pelayanan kegiatan penting untuk	

	dilakukan ? Mengapa ?	
	- <i>Kendala</i>	
48	Apa saja kendala yang dihadapi ?	
49	Bagaimana cara saudara mengatasi kendala tersebut ?	
	F. KEMANDIRIAN	
	1. Norma-norma	
50	Apakah upaya kemandirian yang dilakukan oleh kader IMP dilakukan melalui iuran, jimpitan, dan penjualan produk setempat yang tidak memberatkan anggotanya serta warga masyarakat ?	
	2. Kemampuan	
51	Apakah saudara melakukan upaya kemandirian ?(iuran, jimpitan, dan penjualan produk setempat)	
52	Apakah upaya kemandirian tersebut sangat membantu dalam penyuluhan dan pelayanan program KKB ?	
53	Bagaimana upaya memanfaatkan peluang ekonomi produktif melalui program pemberdayaan ekonomi ?	
	3. Kepentingan	
54	Apakah kemandirian penting untuk dilakukan ? Mengapa ?	
	- <i>Kendala</i>	
55	Apa saja kendala yang dihadapi ?	
56	Bagaimana cara saudara mengatasi kendala tersebut ?	



Informan		DissosP3AKB Kabupaten Klaten
Identitas		
a	Nama	
b	Umur	
c	Alamat	
d	Pendidikan	
e	Jabatan	
f	Pelaksanaan	
Pertanyaan		Jawaban
1	Menurut saudara bagaimana pengelolaan Program KKB di kabupaten Klaten ?	
2	Bagaimana pelaksanaan tugas dari Kepala Seksi Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan ?	
3	Bagaimana Peran Kader IMP dalam Program KKB di Kabupaten Klaten?	
4	Menurut saudara bagaimana pelaksanaan peran Kader IMP di tingkat desa?	
5	Bagaimana pembinaan yang dilakukan terhadap Kader IMP ?	
6	Apa maksud dan tujuan pembinaan para Kader IMP ?	
7	Siapa saja yang bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap Kader IMP ?	
8	Bagaimana proses sosialisasi bagi para pelaksana pembinaan ?	
9	Menurut saudara, apakah para pelaksana pembinaan Kader IMP memahami sosialisasi dan sudah melaksanakannya ?	
10	Apakah sudah ada dan bagaimana upaya advokasi dan kemitraan untuk kelancaran Program KKB terutama dalam pembinaan Kader IMP ?	
11	Menurut saudara apakah jumlah sumberdaya manusia sudah cukup memadai untuk pembinaan Kader IMP ?	
12	Menurut saudara bagaimana kemampuan sumberdaya manusia dalam pembinaan Kader IMP ?	
13	Apakah ada pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pelaksana pembinaan Kader IMP ?	
14	Apakah ada dan bagaimana pembinaan dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas Kader IMP ?	
15	Bagaimana fasilitas-fasilitas berupa sarana-prasarana untuk mendukung ?	
16	Bagaimana dukungan berupa alokasi anggaran dari pemerintah untuk kebijakan tersebut ?	
17	Bagaimana respon dan komitmen para pelaksana pembinaan Kader IMP ?	
18	Bagaimana tanggapan dan dukungan dari para pengambil kebijakan di tingkat desa?	
19	Bagaimana menurut saudara dengan struktur OPD sekarang ini kaitannya dengan pembinaan Kader IMP ?	
20	Apakah ada standar operasional prosedur dalam rangka pembinaan kader IMP ?	
21	Faktor pendukung apa sajakah yang ada dalam pelaksanaan pembinaan Kader IMP di kabupaten Klaten ?	
22	Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka pembinaan kader IMP?	
23	Bagaimana upaya yang dilakukan oleh (Kasie Dalduk, Penyuluhan dan Penggerakan DISSOSP3AKB/Koordinator dan Penyuluh KB) dalam mengatasi kendala-kendala tersebut ?	

Informan		Koordinator dan Penyuluh KB
Identitas		
a	Nama	
b	Umur	
c	Alamat	
d	Pendidikan	
e	Jabatan	
f	Pelaksanaan	
Pertanyaan		Jawaban
1	Menurut saudara bagaimana pelaksanaan Program KKB di kecamatan ?	
2	Bagaimana pelaksanaan tugas Penyuluh KB ? apakah ada sasaran kinerja pegawai ?	
3	Bagaimana Peran Kader IMP dalam Program KKB di Kecamatan ?	
4	Bagaimana Pelaksanaan 6 Pokok Peran IMP	
5	Bagaimana Pembinaan Kader IMP di kecamatan ?	
6	Apa maksud dan tujuan dari pembinaan Kader IMP ?	
7	Siapa saja yang bertugas untuk melakukan Pembinaan Kader IMP ?	
8	Apakah sudah ada sosialisasi bagi para pelaksana pembinaan Kader IMP ?	
9	Menurut saudara, apakah para pelaksana pembinaan Kader IMP memahami sosialisasi dan sudah melaksanakannya ?	
10	Apakah sudah ada dan bagaimana upaya advokasi dan kemitraan untuk kelancaran pembinaan Kader IMP ?	
11	Menurut saudara apakah jumlah sumberdaya manusia sudah cukup memadai untuk pembinaan kader IMP ?	
12	Menurut Saudara Bagaimana kemampuan sumberdaya manusia tingkat kecamatan dalam pembinaan kader IMP ?	
13	Apakah ada pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pelaksana pembinaan Kader IMP ?	
14	Apakah ada dan bagaimana pembinaan dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas Kader IMP ?	
15	Bagaimana fasilitas-fasilitas berupa sarana-prasarana untuk mendukung ?	
16	Bagaimana dukungan berupa alokasi anggaran dari pemerintah untuk pembinaan Kader IMP ?	
17	Bagaimana respon dan komitmen para pelaksana tingkat kecamatan dan desa dalam pembinaan Kader IMP ?	
18	Bagaimana tanggapan dan dukungan dari para pengambil kebijakan?	
19	Menurut saudara bagaimana dukungan dari pemerintah desa dalam pelaksanaan pembinaan Kader IMP ?	
20	Bagaimana menurut Saudara dengan struktur OPD sekarang ini kaitannya pembinaan Kader IMP ?	
21	Bagaimana standar operasional prosedur dalam rangka pembinaan Kader IMP ?	
22	Faktor pendukung apa sajakah yang ada dalam pelaksanaan pembinaan Kader IMP di kecamatan ?	
23	Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka pembinaan Kader IMP?	
24	Bagaimana upaya yang dilakukan oleh (Koordinator dan Penyuluh KB) dalam mengatasi kendala-kendala tersebut ?	

Informan		Warga Masyarakat
Identitas		
a	Nama	
b	Umur	
c	Alamat	
d	Pendidikan	
e	Jabatan	
f	Pelaksanaan	
Pertanyaan		Jawaban
1	Bagaimana pembinaan/penyuluhan (KIE dan Konseling) perorangan yang dilakukan oleh Kader IMP ?	
2	Bagaimana pembinaan/penyuluhan (KIE dan Konseling) kelompok dan massa yang dilakukan oleh Kader IMP ?	
3	Apakah saudara memahami apa yang disampaikan oleh kader dalam KIE dan Konseling ?	
4	Seberapa sering Kader IMP melakukan KIE dan Konseling ?	
5	Bagaimana kerjasama yang dijalin dengan tokoh masyarakat setempat ?	
6	Apa saja yang saudara harapkan dari kader IMP dalam KIE dan Konseling namun belum dapat terpenuhi ?	
7	Bagaimana Kader IMP melakukan Pendataan Keluarga ?	
8	Bagaimana kader IMP melakukan pelayanan KB ulang Pil dan Kondom ?	
9	Bagaimana Kader IMP melakukan rujukan pelayanan KB ?	
10	Bagaimana kader IMP melakukan penyuluhan tentang ibu menyusui, ibu hamil, kesehatan reproduksi remaja, PUP, Penanggulangan HIV/AIDS, Penanggulangan NAPZA, PMS ?	
11	Bagaimana kader IMP melakukan penyuluhan tentang Pengaturan Kelahiran (Alkon Rasional, Jumlah Anak, Jarak Kelahiran) ?	
12	Apakah terdapat kelompok Kegiatan BKB, BKR, dan BKL dan UPPKS ?	
13	Bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh Kader IMP terhadap Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, dan BKL) ?	
14	Bagaimana berjalannya kelompok UPPKS di wilayah saudara ?	
15	Apakah kelompok UPPKS yang ada sudah menjalin kemitraan ? jelaskan ?	
16	Apa saja kendala yang dihadapi ?	
17	Apakah ada upaya kemandirian ? (iuran, jimpitan, dan penjualan produk setempat)	
18	Apakah upaya kemandirian tersebut sangat membantu dalam penyuluhan dan pelayanan program KKB ?	

Informan		Kader IMP	
		Identitas	
a	Nama	Muryati	Sunarni
b	Umur	66 Tahun	54 Tahun
c	Alamat	Gergunung RT 03 RW 09, Gergunung, Klaten Utara	Balemuda RT 14 RW 04, Kemalang, Kemalang
d	Pendidikan	D III	SLTA
e	Jabatan	PPKBD Kelurahan Gergunung, Kecamatan Klaten Utara	PPKBD Desa Kemalang, Kecamatan Kemalang
f	Pelaksanaan	Jumat, 5 Mei 2017	Senin, 8 Mei 2017
Pertanyaan		Jawaban	
1	Bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh DissosP3AKB ?	Masih kurang, 2 kali setahun	Cukup baik, cuma hanya 2 kali setahun, frekuensinya masih kurang, kita bisa bertemu dengan kader-kader dari kecamatan lain, bisa sharing
2	Bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh Koordinator Penyuluh KB dan Penyuluh KB ?	Sudah cukup baik, tiap bulan melalui forum pertemuan ppkdb biasanya anjngsana bersama bidan desa (perwakilan bidan desa), untuk akhir-akhir ini setelah ada balai penyuluhan KB dilaksanakan di balai penyuluhan KB. Kalau ada informasi penting dan mendesak Penyuluh KB melakukan kunjungan rumah kepada PPKBD untuk menyampaikannya, termasuk penyampaian fasilitasi	Bagus, tiap bulan ada pembinaan PPKBD di kecamatan kemalang, karena bu Sur konsekuen, saya biasanya leda-lede (tidak serius) tapi kalau pekerjaan dari bu Sur saya tepati. Penyuluh KB juga mendatangi posyandu-posyandu memberikan pengarahan dan mencari akseptor. Kemudian juga mendatangi pada pertemuan PKK setiap tanggal 25 dan pertemuan kader posyandu setiap tanggal 15. Setiap bulan, juga melakukan pembinaan BKB dan BKL yang dipadukan dengan kegiatan posyandu.
3	Bagaimana fasilitasi dan dukungan yang diberikan oleh DissosP3AKB, Koordinator Penyuluh KB, Penyuluh KB, dan Pemerintah Desa ?	Masih kurang terutama untuk buku-buku pedoman, leaflet, APE, namun dalam hal pembinaan cukup. Yang dari desa belum ada fasilitasi untuk pengiriman akseptor, sedangkan honorarium untuk PPKBD malah menurun dibandingkan saat ada dari kabupaten dulu yaitu Rp. 500.000,- per tahun	Ada dana dari kabupaten tapi masih kurang. Pernah ada bantuan 1.000.000. , tidak mengembalikan, pinjaman 5.000.000,- dengan mengangsur dan sekarang sudah lunas. Dari Penyuluh KB dapat bantuan, materi juga dapat. Dari pemerintah desa dapat, ada honor tiap tahun 600.000, sudah dua tahun ini posyandu mendapat bantuan 2.000.000 dipotong pajak. Namun tidak ada dana pembinaan untuk kelompok kegiatan dari pemerintah desa Jadi memang masih minim.
4	Apakah pernah memperoleh pembinaan dan pelatihan dalam bidang Program KKB ?	Saya sudah pernah, untuk frekuensinya serta kuotanya kurang	Pernah pembinaan di gedung baka, di solo, pelatihan di semarang 5 hari tahun 2016 satu kali pernah juga ikut temu kader di semarang
5	Menurut anda bagaimana pembinaan dan pelatihan dalam bidang Program KKB ?	Pembinaan dan pelatihan baik namun biasanya waktunya kurang. Di samping penyampaian materi seharusnya ada praktek sehingga waktu agar diperpanjang misalnya 2 hari atau 3 hari	Pembinaan bagus sekali, saya bisa memahami, Pelatihan juga sebagian besar saya memahami. Untuk waktunya pelatihan di kabupaten masih kurang
6	Bagaimana tanggapan saudara terhadap Program KKB ?	Program KB bagus sekali, karena memang sejak dari dulu saya menjadi kader KB. Perbedaan dengan yang dulu. Dulu saya harus kunjungan rumah. Sekarang cukup dalam pertemuan kader posyandu, sekarang lebih mudah karena ada kader RW	Saya sangat mendukung dan bangga sekali menjadi kader KB

7	Apakah Saudara tahu tentang IMP dan 6 pokok peran IMP ?	Sudah tahu tapi lupa, 6 pokok peran bantu	Sudah pernah, namun apa saja saya lupa
8	Apa saja kendala yang saudara alami selama menjalankan tugas sebagai kader IMP ?	Kalau dulu tahun 80-an banyak sekali kendala. Masyarakat sekarang sudah sadar untuk ber KB. Masih ada keengganan masyarakat untuk mengikuti kelompok kegiatan dengan alasan 'jer metu kumpul-kumpul wae bu'	Kendala, kalau dulu banyak, anaknya banyak disuruh KB malah memarahi, tapi sekarang sudah sadar Untuk masalah tugas saya yang banyak seperti di PAUD, PKK Kecamatan/Desa, PPKBD. Selama ini saya dapat membagi waktu. Dulu memang tidak enak bila ada yang sudah suntik kita ajak untuk implan tapi sekarang tidak menjadi masalah. Bila ada yang mau steril (MOW) bagi yang tidak mampu, belum ada kepedulian dari pemerintah desa
9	Bagaimana cara saudara mengatasi kendala tersebut ?	Ya harus pelan-pelan untuk menyadarkan masyarakat untuk mau berkumpul dan merasakan manfaat dari kegiatan. Kemudian saya juga selalu menyampaikan melalui PKK Kelurahan maupun PKK RW	Saya berusaha untuk minta dukungan dari pemerintah desa untuk memberikan bantuan transportasi bagi calon peserta KB Steril
A. PENGORGANISASIAN			
1. Norma-norma			
10	Bagaimana proses pembentukan IMP ?	Ditunjuk dari kelurahan	Pertama kali ditunjuk
11	Bagaimana fasilitasi dari pemerintah desa dalam pembentukan IMP dan pembuatan Surat Keputusan / Surat Tugas ?	Dulu saya ditunjuk menjadi PPKBD, sudah mendapat SK dari kelurahan, ada honor dari kelurahan 500.000 setahun	Sudah ada SK dari Desa. Setiap tahun ada honor 600.000 tapi untuk operasional tidak ada
2. Kemampuan			
12	Apakah saudara sudah melakukan pembentukan pengurus dan pembagian tugas ?	PPKBD hanya 1 orang (tunggal) tidak ada susunan pengurus sehingga tidak ada pembagian tugas	Perseorangan jadi tidak ada pembagian tugas
13	Apakah kelompok kegiatan dapat aktif berjalan ?	Ya, berjalan rutin	Berjalan aktif dan rutin
3. Kepentingan			
14	Apakah pengorganisasian penting untuk dilakukan ? mengapa ?	Sangat penting agar kegiatan dapat berjalan	Penting, namun untuk saat ini sudah cukup, kami dapat mengkoordinir kader-kader di tingkat RW maupun RT
- Kendala			
15	Apa saja kendala yang dihadapi ?	Tidak Ada Kendala, karena tidak ada pengaruhnya apabila di bentuk pengurus, karena sudah ada pertemuan PKK	Saya kira sudah cukup, tidak ada kendala meskipun sendiri dan belum terbentuk pengurus namun kader PKB RW dan PKB RT sangat membantu, saya tinggal memantau. Di samping itu apabila terlalu banyak kepengurusan, saya takut kalau ada permintaan berupa seragam, piknik, dan sebagainya.
16	Bagaimana cara saudara mengatasi kendala tersebut ?	Saya menyampaikan informasi dan penyuluhan melalui pertemuan PKK	Misalkan ada kendala ya saya minta bantuan dari puskesmas maupun penyuluh KB

B. PERTEMUAN			
	1. Norma-norma		
17	Bagaimana proses persiapan pelaksanaan pertemuan kader IMP ?	Kita sampaikan undangan	Undangan serta persiapan konsumsi, semula anjingsana di rumah kader tiap posyandu, tapi karena dirasa terlalu membebani dan setelah adanya alokasi dana apbdes terhadap posyandu 2 juta per tahun maka sekarang pertemuan dilaksanakan bertempat di kantor desa.
18	Bagaimana proses pelaksanaan pertemuan ? Apakah saudara melakukan konsultasi dengan pemerintah desa, penyuluh KB, dan petugas lain dalam rangka pelaksanaan pertemuan ?	Saya sering berkonsultasi kepada Penyuluh KB dan Bidan Desa. Untuk konsultasi kepada penyuluh KB saya lakukan dengan berkunjung di Balai Penyuluhan KB	Kalau diperlukan saya selalu berkonsultasi baik dengan pemerintah desa, penyuluh KB, maupun bidan desa, apalagi bu Sur kan sering menghadiri pertemuan kader jadi konsultasi dapat dilakukan saat pertemuan
	2. Kemampuan		
19	Apakah saudara menyelenggarakan pertemuan rutin ?	Ya, Satu kali dibarengkan dengan pertemuan kader posyandu	Ya, Dua kali sebulan yaitu tanggal 15 dan 25 dibarengkan dengan pertemuan kader posyandu dan PKK, kalau ada hal yang mendesak kita tambahkan waktunya
20	Apakah saudara memanfaatkan pertemuan rutin sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, pembinaan, evaluasi, pemecahan masalah, serta perencanaan kegiatan ?	Pembukaan, pembacaan notulen, pembinaan dari bu bidan dan penyuluh KB, Pembinaan dari PPKBD, lain-lain, Penutupan. Dibacakan informasi dan rencana kerja, termasuk pelayanan KB, safari, IVA, Folio, Vitamin A, dan sebagainya	Pembukaan, pembacaan notulen, pengarahan dari ketua posyandu, pembinaan penyuluh KB dan puskesmas, Pembinaan dari PPKBD, lain-lain, Penutupan. Rencana kegiatan biasanya hanya rencana pertemuan yang akan datang
	3. Kepentingan		
21	Apakah pertemuan penting untuk dilakukan ? Mengapa ?	Sangat penting disamping sebagai sarana silaturahmi juga untuk menyampaikan informasi program KB dan program lainnya serta untuk menyampaikan rencana kegiatan	Penting karena segala informasi dapat cepat untuk disampaikan
	- Kendala		
22	Apa saja kendala yang dihadapi ?	Berjalan lancar	Selama ini berjalan lancar. Namun kadang waktunya bersamaan dengan kegiatan lain
23	Bagaimana cara anda mengatasi kendala tersebut ?	(Tidak Ada)	Kita mengatur waktunya
C. KIE DAN KONSELING			
	1. Norma-norma		
24	Bagaimana jika ada warga masyarakat yang tidak setuju dengan ajakan saudara ?	Ya, tidak apa-apa, kita sifatnya kan hanya mengajak, kalau mau ya syukur, kalau belum mau ya sudah	Ya sudah biasa menghadapi seperti itu, kita tak dapat memaksa. nanti kalau mereka membutuhkan juga akan menghubungi kita
25	Bagaimana apabila ada keluhan dari klien yang sifatnya rahasia ?	Kita jaga kerahasiaan, kita hanya menyampaikan keluhan kepada petugas yang menangani misalnya penyuluh KB atau bidan desa	Secara umum kita jaga rahasia, tapi kita juga harus berkonsultasi pada petugas yang tahu
26	Apa yang saudara lakukan apabila tidak dapat menjawab/mengatasi permasalahan klien ?	Saya tanyakan kepada yang lebih tahu. Kepada penyuluh KB dan bidan desa	Ya kita tanyakan kepada petugas

	2. Kemampuan		
27	Bagaimana saudara melakukan KIE dan Konseling perorangan ?	Kita menentukan sasaran KIE yaitu PUS yang habis melahirkan. KIE dan Konseling dilakukan melalui posyandu, kunjungan rumah biasanya hanya yang akan KB Steril.	Saya menyiapkan materi misalnya tentang HIV/AIDS, Narkoba. Saya lakukan dengan berhati-hati tidak terlalu formal, misalnya saat ada orang kumpul-kumpul, saya kira ini lebih efektif, hemat, dan tidak tersinggung
28	Bagaimana saudara melakukan KIE kelompok dan massa ?	Melalui pertemuan kader posyandu kelurahan dan Posyandu Nusa Indah VII. Untuk Posyandu yang lain dilakukan oleh kader posyandu yang lain. KIE massa saya lakukan saat acara tirakatan 17 Agustus dan Halal bi halal	Ya, saya melakukan pada saat pertemuan kader posyandu. KIE massa belum pernah saya lakukan
29	Bagaimana saudara melakukan konsultasi dan rujukan terhadap permasalahan KIE dan Konseling ?	Konsultasi 1 bulan sekali. Rujukan hanya kalau ada permasalahan dan kalau ada yang akan ikut KB MOW, Implan, dan IUD	3 sampai 4 kali setiap bulan. Rujukan bila ada yang ingin KB MOW
30	Bagaimana kerjasama yang dijalin dengan tokoh masyarakat setempat ?	Kerjasama dilakukan dengan ketua PKK RW, dan tokoh masyarakat dan tokoh agama	Kerjasama dengan tokoh masyarakat saya lakukan dengan pak kades, pak RW, pak RT tapi seringnya ke pak RT, sekalian setor uang beras bantuan/raskin ke sini
	3. Kepentingan		
31	Apakah KIE dan Konseling penting untuk dilakukan ? Mengapa ?	Penting, karena masyarakat sangat membutuhkan	Penting, karena kita sebagai kader memiliki tugas untuk mengajak warga masyarakat untuk ber KB supaya kesejahteraan keluarga dapat meningkat, disamping itu juga untuk mensukseskan program KB
	- <i>Kendala</i>		
32	Apa saja kendala yang dihadapi ?	Sarana prasarana KIE belum punya apalagi kader yang lain. Untuk buku, brosur, leaflet, petunjuk KIE konseling belum pernah mendapat, saya hanya dapat papan tentang alat kontrasepsi tapi warga juga tidak dapat	Tidak ada. Warga cukup menerima dan antusias, materi cukup, waktu cukup. Sarana KIE sudah dikasih, saya kira cukup.
33	Bagaimana cara saudara mengatasi kendala tersebut ?	Saya konsultasi pada Penyuluh KB dan saya sampaikan kepada kader yang lain	(Tidak ada)
	D. PENCATATAN PENDATAAN DAN PEMETAAN SASARAN		
	I. Norma-norma		
32	Apakah R/R sudah menggunakan formulir yang baku dan dibuat rutin setiap bulan ?	Belum. Hanya laporan akseptor baru	Belum. Tapi saya melaporkan akseptor baru kepada bu Sur
33	Apakah pendataan keluarga dilakukan melalui kunjungan rumah ?	Ya	Ya
34	Apakah ada pelatihan pendataan keluarga di tingkat kecamatan dan desa ?	Ada	Ada
35	Apakah hasil pendataan keluarga dilaporkan kepada pemerintah desa dan penyuluh KB secara berjenjang ?	Ya, setelah semua RT dan RW mengumpulkan, saya rekapitulasi kemudian saya laporkan kepada penyuluh KB dan kelurahan	Ya, dari kader posyandu dan pak kadus, saya koreksi kemudian saya rekap dan saya laporkan kepada penyuluh KB dan pak kades

2. Kemampuan			
36	Apakah saudara melakukan R/R secara rutin terhadap kegiatan yang dilaksanakan dengan mengikuti pola R/R yang baku ?	Tidak, kalau pertemuan ada catatannya. Laporan kepada Penyuluh KB hanya akseptor baru, nama dan alamat, dan AB yang habis melahirkan di RSI dan RSIA	Untuk catatan pertemuan ada, namun untuk kegiatan penyuluhan tidak ada. Saya buat tapi belum sesuai dengan laporan yang baku
37	Bagaimana proses pelaksanaan pendataan keluarga ?	Saya ikut pelatihan di tingkat kecamatan dilanjutkan pelatihan di tingkat kelurahan dengan peserta kader pendata tingkat RW dan RT. Untuk peta keluarga pendataan tahun 2015 sudah buat tapi belum diikuti perkembangannya. Hasil pendataan keluarga ddisosialisasikan di tingkat kelurahan	Didahului pelatihan di tingkat kecamatan, untuk tingkat desa pelatihan kepada kader posyandu bersama-sama pak kadus kemudian saya membetulkan dan merekapitulasi, tapi untuk tahun 2016 saya hanya minta perkembangannya saja serta minta data dari desa. Untuk peta keluarga tiap RT sudah dibuat sebagian sudah lengkap, yang membuat peta adalah pak kadus, yang menempeli kader. Hasil pendataan saya serahkan ke desa sambil minta tanda tangan kepada kades
39	Apakah saudara sudah memanfaatkan hasil pendataan keluarga untuk kepentingan program KKB ?	Belum, karena semua saya kumpulkan kepada penyuluh KB	Belum
3. Kepentingan			
40	Apakah pencatatan pendataan dan pemetaan sasaran penting untuk dilakukan ? mengapa ?	Penting, karena dapat mempermudah para kader untuk melakukan kegiatan terutama kunjungan rumah bagi PUS yang belum KB	Penting, untuk mengetahui pencapaian program KB
<i>- Kendala</i>			
41	Apa saja kendala yang dihadapi ?	Sulit ketemu warga yang di perkotaan, Untuk Data Hasil pendataan saya kumpulkan semua kepada Penyuluh KB, saya tidak memfotocopy, dan tidak diikuti perkembangannya untuk tahun sekarang	Membutuhkan waktu yang cukup lama
42	Bagaimana cara saudara mengatasi kendala tersebut ?	Saya sudah kasih buku ke tiap-tiap kader RW namun juga belum tahu kabarnya	Saya menyisihkan waktu untuk laporan
E. PELAYANAN KEGIATAN			
I. Norma-norma			
43	Bagaimana saudara melakukan pelayanan terhadap calon peserta KB Pil dan Kondom serta pelayanan KB dengan rujukan ?	Untuk KB Pil dan Kondom tidak, karena tidak ada yang minat. Kalau ada yang butuh pil dan kondom saya suruh beli. Rujukan untuk KB Implan dan IUD di Klinik Sang Timur, untuk KB MOW di Klinik Griya Raharja Prosesnya, warga daftar kepada kader atau bu bidan kemudian saya tindak lanjuti laporan kepada penyuluh KB, diberikan surat dari dinas kemudian saya antar Untuk pelayanan KB serentak saya daftar dulu serta mengisi formulir yang diberikan penyuluh KB	Pil dan Kondom langsung saya serahkan kepada akseptor, karena ulang tidak perlu advise dari bidan Rujukan untuk KB yang MKJP ya di Puskesmas, bu Ajeng, PKBI dan Griya Raharja Saya laporan ke Penyuluh KB dulu, kalau di puskesmas ada persyaratan fotokopi KK, KTP, dan BPJS. Untuk KB safari, saya daftar dulu yang mau ikut KB kemudian saya siapkan Kartu KB nya beserta lembar persetujuan yang harus ditandatangani suami supaya nanti pas pelaksanaan dapat berjalan lancar. Kemudian saya antar ke tempat pelayanan.

44	Bagaimana saudara melakukan pelayanan terhadap kelompok kegiatan ?	Saya menyampaikan lewat pertemuan PKK dan kader posyandu kelurahan Tiap tanggal 15 di rumah saya ada pertemuan kelompok UPPKS	BKB sekalian posyandu tiap tanggal 9, BKR tiap minggu sekali, BKL pada saat posyandu. UPPKS setiap tanggal 11. Berjalan lancar dari peserta 15 yang hadir ada 10-12 orang
2. Kemampuan			
45	Apakah saudara melakukan pembinaan, pendampingan, dan rujukan baik secara perorangan maupun kelompok dalam hal : PUP, Penanggulangan HIV/AIDS PMS dan Penyalahgunaan NAPZA, Pengaturan Kelahiran, Pembinaan Ketahanan Keluarga, serta Pemberdayaan Ekonomi Keluarga ?	Ya semuanya sudah pernah saya sampaikan pada pertemuan PKK dan kader posyandu di kelurahan	Ya semuanya, juga konseling melalui Posyandu dan kelompok BKR Kharisma
3. Kepentingan			
47	Apakah pelayanan kegiatan penting untuk dilakukan ? Mengapa ?	Penting, karena dapat membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan	Penting, karena masyarakat membutuhkan
- <i>Kendala</i>			
48	Apa saja kendala yang dihadapi ?	Saya merasa kesulitan dalam pembinaan karena keterbatasan materi	Belum ada bantuan dari pemerintah desa kalau merujuk akseptor MOW Kurangnya kader untuk kelompok kegiatan terutama BKB Bantuan modal UPPKS yang belum ada
49	Bagaimana cara saudara mengatasi kendala tersebut ?	Mengundang bu bidan dan Penyuluh KB	Selama ini dapat berjalan namun belum bagus Berusaha cari peluang untuk tambah modal
F. KEMANDIRIAN			
1. Norma-norma			
50	Apakah upaya kemandirian yang dilakukan oleh kader IMP dilakukan melalui iuran, jimpitan, dan penjualan produk setempat yang tidak memberatkan anggotanya serta warga masyarakat ?	Tidak, semua sudah dimusyawarahkan dalam pertemuan	Tidak, kan sudah disepakati dalam pertemuan
2. Kemampuan			
51	Apakah saudara melakukan upaya kemandirian ?(iuran, jimpitan, dan penjualan produk setempat)	Ya sudah dengan penjualan produk setempat selain itu juga membuat pot untuk tanaman	Sudah ada semua
52	Apakah upaya kemandirian tersebut sangat membantu dalam penyuluhan dan pelayanan program KKB ?	Secara langsung belum, namun kelompok uppks sudah ada perkembangan dan menambah semangat para kader	Sangat membantu program KB

53	Bagaimana upaya memanfaatkan peluang ekonomi produktif melalui program pemberdayaan ekonomi ?	Pernah, dalam hal pengelolaan limbah koran. Dulu pernah kerjasama dengan PNPM namun terhenti. Tapi kadang dalam acara pameran/bazar Lingkungan Hidup meminta untuk dapat mengeluarkan produk dari UPPKS sini. Ini ada rencana kerjasama dengan penilik non formal (UPTD Pendidikan) dalam hal penjualan produknya.	Belum ada, anggota kami produksinya hanya industri rumah tangga, kripik tempe, ceriping ketela, dan sebagainya
3. Kepentingan			
54	Apakah kemandirian penting untuk dilakukan ? Mengapa ?	Ya Penting, karena dapat meningkatkan pendapatan keluarga	Penting, karena dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Di samping itu juga dapat menambah semangat anggota.
	- <i>Kendala</i>		
55	Apa saja kendala yang dihadapi ?	Permodalan	Permodalan
56	Bagaimana cara saudara mengatasi kendala tersebut ?	Membuat produk dari limbah koran karena beayanya kecil Ada simpan pinjam Membuat produk makanan	Untuk UPPKS semula sudah disiapkan tempatnya tapi tidak jadi turun bantuannya karena terkait aturan



Informan		Kader IMP	
		Identitas	
a	Nama	Warsini	Itawati
b	Umur	45 Tahun	42 Tahun
c	Alamat	Gergunung RT 02 RW 09, Gergunung, Klaten Utara	Balemuda RT 14 RW 04, Kemalang, Kemalang
d	Pendidikan	SD	SLTA
e	Jabatan	Sub PPKBD RW 09 Kelurahan Gergunung, Kecamatan Klaten Utara	Sub PPKBD RW 04 Desa Kemalang, Kecamatan Kemalang
f	Pelaksanaan	Jumat, 5 Mei 2017	Selasa, 9 Mei 2017
Pertanyaan		Jawaban	Jawaban
1	Bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh DissosP3AKB ?	Belum pernah	Saya pernah dibina di gedung Baka tapi lupa pembinaan apa, di Semarang pernah juga dalam rangka temu kader
2	Bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh Koordinator Penyuluh KB dan Penyuluh KB ?	Dilakukan oleh Penyuluh KB pada pertemuan kader posyandu tingkat desa, dilakukan anjangsana	Penyuluh KB mendatangi posyandu, pendampingan, menyampaikan informasi dan penyuluhan
3	Bagaimana fasilitasi dan dukungan yang diberikan oleh DissosP3AKB, Koordinator Penyuluh KB, Penyuluh KB, dan Pemerintah Desa ?	Tidak ada	Ada..APE/BKB Kit, Pil, kondom. Dari pemerintah desa berupa bantuan posyandu. Pernah mengajukan proposal bantuan untuk modal UPPKS tapi tidak turun karena harus berbadan hukum
4	Apakah pernah memperoleh pembinaan dan pelatihan dalam bidang Program KKB ?	Belum pernah pelatihan, hanya pembinaan di posyandu dan pertemuan PKK	Pernah pembinaan di gedung baka dan temu kader di semarang
5	Menurut anda bagaimana pembinaan dan pelatihan dalam bidang Program KKB ?	Cukup bagus	Cukup Bagus
6	Bagaimana tanggapan saudara terhadap Program KKB ?	Setuju dan bagus, saya juga ikut KB IUD sudah 8 tahun	Bagus sekali, karena dengan KB bisa meningkatkan perekonomian keluarga
7	ApakahSaudara tahu tentang IMP dan 6 pokok peran IMP ?	Saya belum tahu IMP	Kader IMP baru dengar sekarang. Sebelumnya saya belum pernah dengar.
8	Apa saja kendala yang saudara alami selama menjalankan tugas sebagai kader IMP ?	Suami tidak mengizinkan untuk KB terutama MOW, Rumor tentang alkon implan dan IUD	Ada yang beralasan agama tidak memperbolehkan sehingga dia KB sendiri, Ada suami yang tidak mengizinkan padahal anaknya sudah banyak, Ada juga yang masih merasa takut, Sulit mengumpulkan peserta kelompok kegiatan dengan berbagai alasan, Jumlah kadernya juga masih kurang karena kader-kader biasanya merangkap tugas sebagai kader Posyandu, PKK, BKB, BKR, dan BKL.
9	Bagaimana cara saudara mengatasi kendala tersebut ?	Saya jelaskan bahwa untuk MOW sekarang ada yang tidak dipotong saluran tubanya, Dan apabila tidak mampu saya minta tolong kepada PPKBD atau Penyuluh KB dan bidan desa utk menjelaskan	kita lakukan pendekatan, kita mengitrimkan undangan, kita lebih efektifkan waktu agar tidak terlalu lama, kita kasih PMT,

A. PENGORGANISASIAN			
	4. Norma-norma		
10	Bagaimana proses pembentukan IMP ?	Hanya ditunjuk	Saya ditunjuk jadi kader
11	Bagaimana fasilitasi dari pemerintah desa dalam pembentukan IMP dan pembuatan Surat Keputusan / Surat Tugas ?	Belum ada	Belum ada
	5. Kemampuan		
12	Apakah saudara sudah melakukan pembentukan pengurus dan pembagian tugas ?	Belum ada susunan kepengurusan dan pembagian tugas	Sudah ada kepengurusan namun tidak aktif, dan tidak ada pembagian tugas. Pembentukan pengurus lewat PKK RW susunan pengurus Ketua, Sekretaris, Bendahara.
13	Apakah kelompok kegiatan dapat aktif berjalan ?	Ya	Ya
	6. Kepentingan		
14	Apakah pengorganisasian penting untuk dilakukan ? mengapa ?	Penting	Ya, untuk pengorganisasian kader-kader di tingkat RW sementara bergabung dengan PKK RW
	- Kendala		
15	Apa saja kendala yang dihadapi ?	Tidak ada.	Kurangnya kepedulian dari pemerintah desa
16	Bagaimana cara saudara mengatasi kendala tersebut ?	Rencana akan digabung dengan PKK RW	Akan melakukan pendekatan kepada pemerintah desa, konsultasi kepada PPKBD, TP PKK, Penyuluh KB, dan Puskesmas
B. PERTEMUAN			
	4. Norma-norma		
17	Bagaimana proses persiapan pelaksanaan pertemuan kader IMP ?	Undangan, dengan anjingsana	(Tidak ada)
18	Bagaimana proses pelaksanaan pertemuan ? Apakah saudara melakukan konsultasi dengan pemerintah desa, penyuluh KB, dan petugas lain dalam rangka pelaksanaan pertemuan ?	Ya, sama bu Mur	(Tidak Ada)
	5. Kemampuan		
19	Apakah saudara menyelenggarakan pertemuan rutin ?	Satu kali sebulan dengan anjingsana	Tidak ada pertemuan
20	Apakah saudara memanfaatkan pertemuan rutin sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, pembinaan, evaluasi, pemecahan masalah, serta perencanaan kegiatan ?	Pembukaan, nutulen pertemuan kemarin, isian-isian, arisan, laporan, penutupan. Kadang-kadang ada informasi dan rencana kerja	(Tidak ada)
	6. Kepentingan		
21	Apakah pertemuan penting untuk dilakukan ? Mengapa ?	Penting karena untuk penyampaian informasi dan rencana kerja serta untuk menambah keakraban warga	Ya, penting...tapi disini setiap RT sudah ada pertemuan.

	- Kendala		
22	Apa saja kendala yang dihadapi ?	Tidak ada kendala. Cuma untuk isian kadang ada kekosongan	Setiap RT sudah ada pertemuan, nanti kalau pertemuan terus-menerus akan memberatkan warga
23	Bagaimana cara anda mengatasi kendala tersebut ?	Kita berusaha untuk mencari materi lewat internet atau buku-buku yang bermanfaat	Untuk saat sekarang masih belum bisa, Ibu RW sudah sepuh, usia sekitar 80 tahun sehingga ada kesulitan
C. KIE DAN KONSELING			
4. Norma-norma			
24	Bagaimana jika ada warga masyarakat yang tidak setuju dengan ajakan saudara ?	Tidak apa-apa	Sudah biasa, mungkin lain kali mereka akan ikut KB
25	Bagaimana apabila ada keluhan dari klien yang sifatnya rahasia ?	Sedapat mungkin rahasia saya jaga	Ya kita harus menjaga rahasia klien
26	Apa yang saudara lakukan apabila tidak dapat menjawab/mengatasi permasalahan klien ?	Saya tanyakan kepada bu Mur	Saya tanya kepada bu Narni
5. Kemampuan			
27	Bagaimana saudara melakukan KIE dan Konseling perorangan ?	Saya lakukan pendekatan secara perorangan, misalnya setelah melahirkan kita ajak untuk ber KB	Srcara pontanitas. Wawancara saling berhadapan lewat posyandu, saat belanja bersama
28	Bagaimana saudara melakukan KIE kelompok dan massa ?	Menyampaikan KIE melalui kelompok PKK RW, kalau KIE massa belum pernah	Sudah pernah menyampaikan dalam pertemuan posyandu, KIE massa belum pernah
29	Bagaimana saudara melakukan konsultasi dan rujukan terhadap permasalahan KIE dan Konseling ?	Belum pernah	Lewat posyandu, pertemuan PKK dan kader posyandu, 1 kali setiap bulan
30	Bagaimana kerjasama yang dijalin dengan tokoh masyarakat setempat ?	Ketua RW/ Ketua RT dan panitia pengajian	bagus
6. Kepentingan			
31	Apakah KIE dan Konseling penting untuk dilakukan ? Mengapa ?	Ya Penting, karena dapat meningkatkan pengetahuan warga masyarakat	Penting, untuk mensukseskan program KB, serta peserta KB dapat meningkat
- Kendala			
32	Apa saja kendala yang dihadapi ?	Sarana untuk penyuluhan belum punya	Pembinaan dalam penyuluhan kurang
33	Bagaimana cara saudara mengatasi kendala tersebut ?	Biasanya disampaikan bu Mur	Minta pembinaan
D. PENCATATAN PENDATAAN DAN PEMETAAN SASARAN			
4. Norma-norma			
32	Apakah R/R sudah menggunakan formulir yang baku dan dibuat rutin setiap bulan ?	Tidak buat	Tidak laporan
33	Apakah pendataan keluarga dilakukan melalui kunjungan rumah ?	Ya	Tidak tahu

34	Apakah ada pelatihan pendataan keluarga di tingkat kecamatan dan desa ?	Ada	Tidak tahu
35	Apakah hasil pendataan keluarga dilaporkan kepada pemerintah desa dan penyuluh KB secara berjenjang ?	Ya, saya laporkan ke bu Mur	Tidak tahu
5. Kemampuan			
36	Apakah saudara melakukan R/R secara rutin terhadap kegiatan yang dilaksanakan dengan mengikuti pola R/R yang baku ?	tidak	Tidak
37	Bagaimana proses pelaksanaan pendataan keluarga ?	Dengan kunjungan keliling <i>door to door</i> . Peta sudah buat tapi dikumpulkan Untuk hasil pendataan sudah saya laporkan bu Mur, namun belum ada sosialisasi. Sebelum pendataan, warga diberitahu tentang akan dilakukannya pendataan keluarga serta manfaatnya. Tapi belum saya sampaikan hasilnya karena masih dikumpulkan	Tidak pernah ikut. Yang mendata suami saya Peta belum pernah, yang bikin dari desa. Demikian juga sosialisasi juga belum
39	Apakah saudara sudah memanfaatkan hasil pendataan keluarga untuk kepentingan program KKB ?	Belum	Belum
6. Kepentingan			
40	Apakah pencatatan pendataan dan pemetaan sasaran penting untuk dilakukan ? mengapa ?	Penting, karena kita dapat tahu sasaran PUS yang perlu kita kunjungi	Penting, karena kalau memiliki data tersebut kita dapat tahu mana PUS yang sudah ber KB mana yang belum, serta dapat diikuti perkembangannya, jadi akan memudahkan kita
- Kendala			
41	Apa saja kendala yang dihadapi ?	Yang susah di perumahan, dikira minta bantuan, dan perlu bolak-balik untuk ketemu	Saya tidak punya datanya karena belum dikasih blangko dan belum ada pembinaan dari Penyuluh KB dan PPKBD
42	Bagaimana cara saudara mengatasi kendala tersebut ?	Memang harus bolak-balik, dan kadang meminta bantuan dari Penyuluh KB	Sementara menggunakan SIP dari puskesmas
E. PELAYANAN KEGIATAN			
4. Norma-norma			
43	Bagaimana saudara melakukan pelayanan terhadap calon peserta KB Pil dan Kondom serta pelayanan KB dengan rujukan ?	Tidak, saya hanya mendaftar, ada yang berangkat sendiri, yang mengantar biasanya PPKBD Daftar dulu saya laporkan ke bu Mur beserta persyaratannya KK, KTP, BPJS, lalu warga diberitahu waktu pelaksanaannya	Tidak, karena sudah diurus di posyandu di rumah bu Narni. Biasanya akseptor yang meminta, "bu pil ku entek, bu pile wonten mboten?". yang mengantar bu Narni. Bu narni mengantar calon akseptor ke puskesmas dan tempat pelayanan lainnya
44	Bagaimana saudara melakukan pelayanan terhadap kelompok kegiatan ?	BKL Tiap tanggal 18 di rumah bu Mur	BKB tanggal 9, BKR setiap minggu, BKL setiap posyandu, UPPKS setiap tanggal 11

	5. Kemampuan		
45	Apakah saudara melakukan pembinaan, pendampingan, dan rujukan baik secara perorangan maupun kelompok dalam hal : PUP, Penanggulangan HIV/AIDS PMS dan Penyalahgunaan NAPZA, Pengaturan Kelahiran, Pembinaan Ketahanan Keluarga, serta Pemberdayaan Ekonomi Keluarga ?	Ya melakukan, melalui kumpulan dan kunjungan rumah	Pernah tentang ibu menyusui pas pertemuan posyandu
	6. Kepentingan		
47	Apakah pelayanan kegiatan penting untuk dilakukan ? Mengapa ?	Penting, agar kegiatan kelompok dapat berjalan	Penting, untuk membantu masyarakat
	- Kendala		
48	Apa saja kendala yang dihadapi ?	Dana bantuan untuk pengembangan	Alat peraga kurang, Modal kurang, Pelatihan ketrampilan belum ada misalnya kami ingin sekali ada pelatihan ketrampilan kerajinan hantaran lamaran, Kadernya juga kurang, UPPKS ada yang tidak lancar dalam pengembalian
49	Bagaimana cara saudara mengatasi kendala tersebut ?	Iuran dalam kumpulan	Sudah kita rembug , kita mencari peluang dapat pinjaman/bantuan
		F. KEMANDIRIAN	
	4. Norma-norma		
50	Apakah upaya kemandirian yang dilakukan oleh kader IMP dilakukan melalui iuran, jimpitan, dan penjualan produk setempat yang tidak memberatkan anggotanya serta warga masyarakat ?	Tidak	Tidak, untuk iuran dan jimpitan sudah disepakati anggota
	5. Kemampuan		
51	Apakah saudara melakukan upaya kemandirian ?(iuran, jimpitan, dan penjualan produk setempat)	iuran RW dan RT sudah ada, jimpitan juga ada, tidak ada penjualan produk	Hanya penjualan produk setempat ada, enthik, emping, tempe,
52	Apakah upaya kemandirian tersebut sangat membantu dalam penyuluhan dan pelayanan program KKB ?	Belum membantu	Tidak tahu
53	Bagaimana upaya memanfaatkan peluang ekonomi produktif melalui program pemberdayaan ekonomi ?	Dulu kerjasama dengan PNPM untuk membuat kerajinan dari koran bekas	Belum ada

6. Kepentingan			
54	Apakah kemandirian penting untuk dilakukan ? Mengapa ?	Penting	Ya Penting, karena kita tidak tergantung dari bantuan
	- Kendala		
55	Apa saja kendala yang dihadapi ?	Permodalan	Permodalan
56	Bagaimana cara saudara mengatasi kendala tersebut ?	Iuran dan jimpitan	Sudah mengajukan



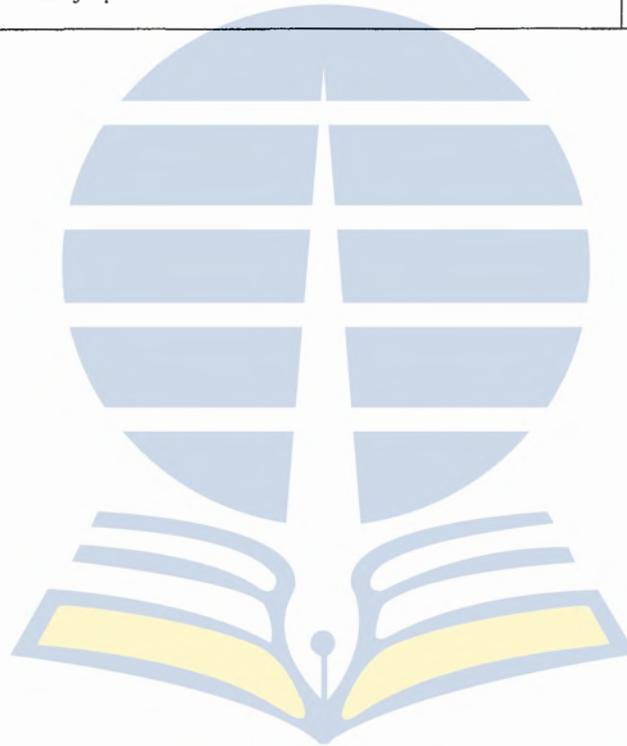
Informan		Kader IMP	
		Identitas	
a	Nama	Ratna	Suratmi
b	Umur	50 Tahun	39 Tahun
c	Alamat	Gergunung RT 03 RW 09, Gergunung, Klaten Utara	Balemuda RT 14 RW 04, Kemalang, Kemalang
d	Pendidikan	SLTA	SLTP
e	Jabatan	Kelompok KB RT 03 RW 09 Kelurahan Gergunung, Kecamatan Klaten Utara	Kelompok KB RT 14 RW 04 Desa Kemalang, Kecamatan Kemalang
f	Pelaksanaan	Jumat, 5 Mei 2017	Selasa, 9 Mei 2017
Pertanyaan		Jawaban	Jawaban
1	Bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh DissosP3AKB ?	Tidak pernah	Saya belum pernah
2	Bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh Koordinator Penyuluh KB dan Penyuluh KB ?	Penyuluh KB mendatangi pertemuan kader	Penyuluh KB memberikan penyuluhan KB di posyandu
3	Bagaimana fasilitasi dan dukungan yang diberikan oleh DissosP3AKB, Koordinator Penyuluh KB, Penyuluh KB, dan Pemerintah Desa ?	Tidak ada	Tidak ada
4	Apakah pernah memperoleh pembinaan dan pelatihan dalam bidang Program KKB ?	Belum pernah	Belum pernah karena saya masih baru
5	Menurut anda bagaimana pembinaan dan pelatihan dalam bidang Program KKB ?	Belum pernah	Belum pernah
6	Bagaimana tanggapan saudara terhadap Program KKB ?	Setuju dan bagus, saya sudah 4 kali ikut KB implan	Bagus
7	Apakah Saudara tahu tentang IMP dan 6 pokok peran IMP ?	Saya belum tahu	Kader IMP saya ndak tahu
8	Apa saja kendala yang saudara alami selama menjalankan tugas sebagai kader IMP ?	Suami tidak mengizinkan untuk KB	Saya belum dilatih, saya masih baru menjadi kader, masih kesulitan dalam memberikan penyuluhan, buku panduan juga belum punya.
9	Bagaimana cara saudara mengatasi kendala tersebut ?	Minta bantuan kepada bu mur untuk menjelaskan	Biasanya saya minta tolong kepada bu Nami
A. PENGORGANISASIAN			
7. Norma-norma			
10	Bagaimana proses pembentukan IMP ?	Hanya ditunjuk	Dulu diajak bu Nami
11	Bagaimana fasilitasi dari pemerintah desa dalam pembentukan IMP dan pembuatan Surat Keputusan / Surat Tugas ?	Belum ada	Belum ada
8. Kemampuan			
12	Apakah saudara sudah melakukan pembentukan pengurus dan pembagian tugas ?	Tidak ada	Tidak ada
13	Apakah kelompok kegiatan dapat aktif berjalan ?	Ya, berjalan rutin	Ya

	9. Kepentingan		
14	Apakah pengorganisasian penting untuk dilakukan ? mengapa ?	Ya, penting	Penting
	- Kendala		
15	Apa saja kendala yang dihadapi ?	Tidak Ada	Belum ada kepengurusan
16	Bagaimana cara saudara mengatasi kendala tersebut ?	Digabung dengan kepengurusan PKK RT	Saya akan konsultasi dengan Bu Ita dan Bu Narni
	B. PERTEMUAN		
	7. Norma-norma		
17	Bagaimana proses persiapan pelaksanaan pertemuan kader IMP ?	Undangan, anjingsana	Semua anggota sudah tahu, jadi tidak perlu undangan
18	Bagaimana proses pelaksanaan pertemuan ? Apakah saudara melakukan konsultasi dengan pemerintah desa, penyuluh KB, dan petugas lain dalam rangka pelaksanaan pertemuan ?	Konsultasi sama bu Mur	Yang konsultasi bu Narni
	8. Kemampuan		
19	Apakah saudara menyelenggarakan pertemuan rutin ?	Ya, Satu kali sebulan	Ya, Pertemuan sekali seminggu di tempat bu Narni anggota 20 orang
20	Apakah saudara memanfaatkan pertemuan rutin sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, pembinaan, evaluasi, pemecahan masalah, serta perencanaan kegiatan ?	Pembukaan, pembacaan Notulen, Isian, lain-lain, penutupan. Kadang-kadang ada rencana kerja	Pembukaan (doa), Pembacaan Notulen, Penyuluhan dari PPKBD, arisan, penutupan. Tidak ada rencana kerja
	9. Kepentingan		
21	Apakah pertemuan penting untuk dilakukan ? Mengapa ?	Ya, penting.. karena untuk penyampaian informasi, disamping itu kan ada arisan ibu-ibu	Ya, penting
	- Kendala		
22	Apa saja kendala yang dihadapi ?	Tidak ada kendala	Para Ibu-ibu ada beberapa yang tidak hadir
23	Bagaimana cara anda mengatasi kendala tersebut ?	(Tidak Ada)	diampiri
	C. KIE DAN KONSELING		
	7. Norma-norma		
24	Bagaimana jika ada warga masyarakat yang tidak setuju dengan ajakan saudara ?	Tidak apa-apa.. harus bersabar	Tidak apa-apa
25	Bagaimana apabila ada keluhan dari klien yang sifatnya rahasia ?	Kita jaga	Kita jaga
26	Apa yang saudara lakukan apabila tidak dapat menjawab/mengatasi permasalahan klien ?	Konsultasi bu Muryati	Tanya bu Narni
	8. Kemampuan		
27	Bagaimana saudara melakukan KIE dan	Lewat posyandu	Belum pernah melakukan kunjungan rumah dan KIE perorangan

	Konseling perorangan ?		
28	Bagaimana saudara melakukan KIE kelompok dan massa ?	Melalui pertemuan PKK RT, kalau massa ndak pernah	Belum pernah
29	Bagaimana saudara melakukan konsultasi dan rujukan terhadap permasalahan KIE dan Konseling ?	Belum pernah	Belum pernah
30	Bagaimana kerjasama yang dijalin dengan tokoh masyarakat setempat ?	Ketua RW/Ketua RT	bagus
	9. Kepentingan		
31	Apakah KIE dan Konseling penting untuk dilakukan ? Mengapa ?	Penting, untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat	Penting, masyarakat biar tahu program KB
	- Kendala		
32	Apa saja kendala yang dihadapi ?	Buku pedomannya belum ada	Belum ada pembinaan
33	Bagaimana cara saudara mengatasi kendala tersebut ?	Tidak melakukan KIE	Tanya bu nami
	D. PENCATATAN PENDATAAN DAN PEMETAAN SASARAN		
	7. Norma-norma		
32	Apakah R/R sudah menggunakan formulir yang baku dan dibuat rutin setiap bulan ?	Tidak	Tidak
33	Apakah pendataan keluarga dilakukan melalui kunjungan rumah ?	Ya	Belum Pernah
34	Apakah ada pelatihan pendataan keluarga di tingkat kecamatan dan desa ?	Ada	Tidak tahu
35	Apakah hasil pendataan keluarga dilaporkan kepada pemerintah desa dan penyuluh KB secara berjenjang ?	Ya	Tidak tahu
	8. Kemampuan		
36	Apakah saudara melakukan R/R secara rutin terhadap kegiatan yang dilaksanakan dengan mengikuti pola R/R yang baku ?	tidak	tidak
37	Bagaimana proses pelaksanaan pendataan keluarga ?	Dengan kunjungan rumah. Peta sudah buat tapi dikumpulkan. Belum ada sosialisasi.	Tidak tahu
39	Apakah saudara sudah memanfaatkan hasil pendataan keluarga untuk kepentingan program KKB ?	Belum	Belum
	9. Kepentingan		
40	Apakah pencatatan pendataan dan pemetaan sasaran penting untuk dilakukan ? mengapa ?	Ya Penting, karena merupakan pegangan kita untuk melakukan kegiatan.	Penting
	- Kendala		
41	Apa saja kendala yang dihadapi ?	Pada saat pendataan di perumahan	Tidak tahu
42	Bagaimana cara saudara mengatasi kendala	Kita kunjungi sampai ketemu	(Tidak ada)

	tersebut ?		
E. PELAYANAN KEGIATAN			
	7. Norma-norma		
43	Bagaimana saudara melakukan pelayanan terhadap calon peserta KB Pil dan Kondom serta pelayanan KB dengan rujukan ?	Tidak. Warga daftar dulu, yang mengantar bu mur	Tidak. Bu narni yang mengantar
44	Bagaimana saudara melakukan pelayanan terhadap kelompok kegiatan ?	Tiap tanggal 18 ada BKL Tiap tanggal 15 di rumah bu mur	BKB bareng posyandu tanggal 9, BKR setiap minggu
	8. Kemampuan		
45	Apakah saudara melakukan pembinaan, pendampingan, dan rujukan baik secara perorangan maupun kelompok dalam hal : PUP, Penanggulangan HIV/AIDS PMS dan Penyalahgunaan NAPZA, Pengaturan Kelahiran, Pembinaan Ketahanan Keluarga, serta Pemberdayaan Ekonomi Keluarga ?	Belum pernah, biasanya bu Mur lewat posyandu	Sudah pernah bersama-sama melalui posyandu tentang pengaturan kelahiran
	9. Kepentingan		
47	Apakah pelayanan kegiatan penting untuk dilakukan ? Mengapa ?	Ya, penting, karena kadang-kadang warga menanyakan informasi pelayanan KB	Penting
	- Kendala		
48	Apa saja kendala yang dihadapi ?	Buku pedoman untuk penyuluhan kurang Diadakan latihan ketrampilan	Ada pembinaan untuk kader
49	Bagaimana cara saudara mengatasi kendala tersebut ?	Baru mengusulkan pada bu Mur	Mengusulkan pada bu Narni
F. KEMANDIRIAN			
	7. Norma-norma		
50	Apakah upaya kemandirian yang dilakukan oleh kader IMP dilakukan melalui iuran, jimpitan, dan penjualan produk setempat yang tidak memberatkan anggotanya serta warga masyarakat ?	Tidak	Tidak
	8. Kemampuan		
51	Apakah saudara melakukan upaya kemandirian ?(iuran, jimpitan, dan penjualan produk setempat)	Ya, iuran dan jimpitan	Tidak ada
52	Apakah upaya kemandirian tersebut sangat membantu dalam penyuluhan dan pelayanan program KKB ?	Belum	Tidak tahu
53	Bagaimana upaya memanfaatkan peluang ekonomi produktif melalui program	Belum	Belum

	pemberdayaan ekonomi ?		
	9. Kepentingan		
54	Apakah kemandirian penting untuk dilakukan ? Mengapa ?	Penting, misalnya di kelompok BKL kita dapat membeli sendiri peralatan-peralatan untuk pemeriksaan kesehatan.	Penting
	- Kendala		
55	Apa saja kendala yang dihadapi ?	permodalan	permodalan
56	Bagaimana cara saudara mengatasi kendala tersebut ?	luran dan jimpitan	Mengajukan bantuan



Lampiran 2. Transkrip Wawancara

Informan		DissosP3AKB Kabupaten Klaten
Identitas		
a	Nama	Nuryanti, SKM.
b	Umur	50 Tahun
c	Alamat	Dk. Kasaran RT 01/RW 01 Pasungan, Ceper, Klaten
d	Pendidikan	SI Kesehatan Masyarakat
e	Jabatan	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan DissosP3AKB Kabupaten Klaten
f	Pelaksanaan	Rabu, 10 Mei 2017
Pertanyaan		Jawaban
1	Menurut saudara bagaimana pengelolaan Program KKB di kabupaten Klaten ?	Pengelolaan program KKB di kabupaten Klaten di bawah koordinasi dari DissosP3AKB kabupaten Klaten yang diberikan tugas tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dalam melaksanakan tugasnya penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana meliputi pengendalian penduduk, penyuluhan, dan penggerakan serta keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dilaksanakan oleh kepala bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang memiliki 2 seksi yaitu seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan serta seksi Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
2	Bagaimana pelaksanaan tugas dari Kepala Seksi Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan ?	Tugas saya sesuai dengan tupoksi dapat dilihat pada Peraturan Bupati Klaten No. 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten.
3	Bagaimana Peran Kader IMP dalam Program KKB di Kabupaten Klaten?	Peran kader IMP sangat bagus, mereka begitu responsif terhadap program. Pada saat pelaksanaan pelayanan KB serta pameran-pameran pada even-even tertentu, dapat kita lihat bahwa kader IMP begitu antusias dan bersemangat dalam mensukseskan program KB. Disamping itu mereka memiliki rasa ingin tahu yang besar dari program-program yang kita sampaikan.
4	Menurut saudara bagaimana pelaksanaan peran Kader IMP di tingkat desa?	Secara umum kami menilainya sedang-sedang saja, bahkan ada banyak yang masih kurang, mereka melaksanakan perannya hanya sekedar yang ia tahu. Kami pun maklum karena kader IMP ada beberapa yang usianya sudah lanjut, semangat ada, namun kemampuannya sangat terbatas.
5	Bagaimana pembinaan yang dilakukan terhadap Kader IMP ?	Begini...karena kita ada keterbatasan SDM dan anggaran maka pembinaan dengan jalan mengumpulkan PPKBD se kabupaten Klaten kita laksanakan sebanyak 2 kali dalam se tahun, yang dikemas dalam acara Jambore / Temu Kader PPKBD serta refreshing dalam rangka hari keluarga nasional (Harganas) di tingkat kabupaten. Sedangkan bentuk pembinaan lainnya adalah dengan cara mengunjungi pertemuan PPKBD yang diselenggarakan di tingkat eks. kawedanan, kemudian rapat koordinasi di tingkat kecamatan yang diikuti oleh kader PPKBD. Mendatangi kecamatan rata-rata 2 kali setiap bulannya. Jadi pembinaan terhadap para kader IMP dari kabupaten memang baru menjangkau PPKBD. Di samping itu setiap tahun kita adakan lomba kader IMP dari kader PPKBD, sub PPKBD, dan PKB RT, kemudian juga mengirimkan kader IMP baik itu dalam acara jambore/temu kader di tingkat provinsi maupun eks karesidenan.
6	Apa maksud dan tujuan pembinaan para Kader IMP ?	Yang jelas untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan para kader...dan yang lebih penting ini wujud kepedulian pemerintah terhadap para kader IMP agar para kader IMP lebih peduli dan bersemangat lagi dalam program KKB. Sehingga dalam kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di kabupaten, kami sering mengundang narasumber yang benar-benar kompeten dalam bidangnya. Selain itu agar para kader IMP lebih aktif dan intensif lagi memberikan KIE bahkan sampai ke tingkat desa wisata sehingga dapat membantu masyarakat dalam memperoleh

		informasi khususnya dalam pelayanan KB.
7	Siapa saja yang bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap Kader IMP ?	Untuk tingkat kabupaten ya pada bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terutama adalah memang tupoksi dari kami di seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan. Sedangkan untuk tingkat kecamatan adalah para penyuluh KB.
8	Bagaimana proses sosialisasi bagi para pelaksana pembinaan ?	Setiap awal bulan kan kita ada pembinaan terhadap para penyuluh KB, di situ mesti kami sampaikan bila ada informasi yang berhubungan dengan kader IMP, di samping itu juga kami sampaikan lewat WA (<i>Whatsapp</i>), baru saja informasi mengenai pendataan kader IMP <i>online</i> kami sampaikan. Untuk mengundang kader IMP dalam acara di tingkat kabupaten kami berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten selanjutnya mengirimkan surat yang ditujukan kepada camat untuk mengirimkan kader IMP.
9	Menurut saudara, apakah para pelaksana pembinaan Kader IMP memahami sosialisasi dan sudah melaksanakannya ?	Ya...semua memahami dan sudah melaksanakannya.
10	Apakah sudah ada dan bagaimana upaya advokasi dan kemitraan untuk kelancaran Program KKB terutama dalam pembinaan Kader IMP ?	Ya...kami selalu melakukan advokasi dan koordinasi. Advokasi kami lakukan baik dengan pemerintah kabupaten, dewan, maupun dengan tokoh masyarakat. Koordinasi, komunikasi terus kami lakukan dengan dinas terkait serta jalinan kemitraan dengan mitra kerja serta sudah ada MoU (berlaku 3 tahun ke depan). Di samping itu sudah terbentuk tim pokja KB kabupaten yang dikukuhkan dengan surat keputusan bupati Klaten. Demikian juga dalam rangka penguatan program KB di tingkat provinsi dan Kabupaten di Jawa Tengah, Klaten merupakan salah satu kabupaten yang dipilih sebagai ajang program <i>My Choice</i> yang diselenggarakan atas kerjasama antara BKKBN dengan John Hopkins Bloomberg School of Public Health dan Bill & Melinda Gates Foundation. Kerjasama dilaksanakan dalam jangka waktu 3 tahun (Oktober 2014 s/d Oktober 2017). Program <i>My Choice</i> yang terdiri dari 5 konsorsium yaitu : Demand Creation/Demand Generation (John Hopkins), Penguatan Faskes untuk KB (JH Piego), Penguatan Distribusi Alkon (JSI), Penguatan Peran Swasta (DKT), Desentralisasi Monev (PMK-UGM)
11	Menurut saudara apakah jumlah sumberdaya manusia sudah cukup memadai untuk pembinaan Kader IMP ?	Baik tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan jumlah SDM nya sangat kurang, karena harus membina kader IMP yang jumlahnya banyak. Untuk saat ini seksi kami hanya berjumlah 4 personel. Sedangkan jumlah Penyuluh KB tersebar di 26 kecamatan berjumlah 63 penyuluh yang harus membina 401 desa.
12	Menurut saudara bagaimana kemampuan sumberdaya manusia dalam pembinaan Kader IMP ?	Secara umum kemampuannya cukup bagus dan siap dalam pelaksanaan pembinaan kader IMP.
13	Apakah ada pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pelaksana pembinaan Kader IMP ?	Ya, ada pelatihan. baik petugas dari kabupaten maupun para penyuluh KB. Biasanya pelatihan dilakukan di BKKBN Provinsi Jawa Tengah. Selain itu juga dari mitra kerja juga sering mengadakan pelatihan seperti yang diselenggarakan oleh Program <i>My Choice</i> .
14	Apakah ada dan bagaimana pembinaan dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas Kader IMP ?	Untuk pembinaan seperti yang saya sampaikan di depan tadi, sedangkan untuk pelatihan memang juga ada namun hanya sebagian kecil saja kader yang dilatih, itupun biasanya terbatas bagi kader PPKBD serta kader kelompok kegiatan
15	Bagaimana fasilitas-fasilitas berupa sarana-prasarana untuk mendukung ?	Fasilitas-fasilitas juga ada misalnya berupa blangko untuk pencatatan dan pelaporan, kemudian bahan KIE yang berupa buku pedoman kader, poster, leaflet, KIE kit, BKB kit namun jumlahnya sangat terbatas dan masih sangat kurang

16	Bagaimana dukungan berupa alokasi anggaran dari pemerintah untuk kebijakan tersebut ?	Untuk dukungan anggaran masih sangat kurang
17	Bagaimana respon dan komitmen para pelaksana pembinaan Kader IMP ?	Secara umum cukup baik. Namun kadang apabila kami memerlukan data untuk keperluan program, agak terlambat kami menerima laporannya.
18	Bagaimana tanggapan dan dukungan dari para pengambil kebijakan di tingkat desa?	Dukungan sudah ada, namun sebagian besar belum optimal dalam mengakomodir dari program kita. walaupun kita sudah berusaha keras dengan jalan melakukan advokasi tapi hasilnya belum seperti yang kita harapkan. Advokasi yang kita lakukan melalui Dispermades, para camat, para pendamping desa, serta dibantu oleh program <i>My Choice</i> dengan menyusun pedoman alokasi anggaran program KKB dengan dana APBDesa, namun sampai saat ini sebagian besar desa masih kecil dukungannya untuk mengalokasikan anggaran APBDesa untuk Program KKB.
19	Bagaimana menurut saudara dengan struktur OPD sekarang ini kaitannya dengan pembinaan Kader IMP ?	Dengan struktur yang ada sekarang ini yang jelas satu dinas urusannya lebih banyak yaitu meliputi sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta keluarga berencana sehingga Program KKB menjadi kurang fokus. Semula memang kami mengharapkan agar Program KKB dapat menjadi OPD tersendiri, namun harus bergabung dengan bidang yang lain karena kebijakan otonomi daerah yang menghendaki miskin struktur tapi kaya fungsi berkaitan dengan anggaran yang kurang memadai. Sehingga di tingkat kecamatanpun masih tidak ada perkembangan. Pernah kami mengusulkan untuk dibentuk UPT KB pada tiap eks. kawedanan namun tidak disetujui.
20	Apakah ada standar operasional prosedur dalam rangka pembinaan kader IMP ?	Ada. Semua kegiatan ada SOP nya sehingga bila ada kegiatan kita tahu langkah-langkah dan prosedurnya.
21	Faktor pendukung apa sajakah yang ada dalam pelaksanaan pembinaan Kader IMP di kabupaten Klaten ?	Faktor Pendukung berupa : - Tingginya komitmen Pemerintah dalam Program KKB antara lain melalui terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. - Adanya jalinan kerjasama dan kesepakatan baik dengan lintas sektoral maupun dengan mitra kerja/swasta. - Jumlah kader yang banyak dari tingkat desa sampai dengan RT - Semangat kader yang tinggi
22	Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka pembinaan kader IMP?	Kendala-kendala yang dihadapi antara lain : - Jumlah SDM yang masih kurang, baik yang berada di tingkat kabupaten maupun penyuluh KB - Keterbatasan anggaran - Keterbatasan sarana dan prasarana, - Bentuk OPD - Rendahnya pengetahuan kader IMP serta banyak kader terutama kader Sub PPKBD dan PKB RT yang kurang aktif. - Dukungan pemihakan alokasi anggaran APBDesa yang masih kurang
23	Bagaimana upaya yang dilakukan oleh (Kasie Dalduk, Penyuluhan dan Penggerakan DISSOSPEAKB/Koordinator dan Penyuluh KB) dalam mengatasi kendala-kendala tersebut ?	- Mengusulkan tambahan Penyuluh KB baru, penambahan anggaran, pemenuhan sarana dan prasarana, tambahan frekuensi pelatihan, advokasi yang lebih intensif.

Informan		Koordinator dan Penyuluh KB	
		Identitas	
a	Nama	Drs. Wagino, MM.	Dra. Suryatmi
b	Umur	50 Tahun	50 Tahun
c	Alamat	Jl. Manahan II RT 03 RW 07, Jonggrangan, Klaten Utara	Bendogantungan RT 01 RW 07, Sumberejo, Klaten Selatan
d	Pendidikan	S 2	S 1
e	Jabatan	Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Klaten Utara	Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Kemalang
f	Pelaksanaan	Rabu, 3 Mei 2017	Senin, 8 Mei 2017
Pertanyaan		Jawaban	Jawaban
1	Menurut saudara bagaimana pelaksanaan Program KKB di kecamatan ?	Secara garis besar dapat saya sampaikan begini : setiap awal bulan diadakan rapat koordinasi dengan peserta seluruh kader PPKBD serta bidan desa se kecamatan Klaten Utara melalui forum itu disampaikan evaluasi dan rencana kerja serta berbagai informasi. Sedangkat tempatnya berpindah-pindah (anjangsana). Setiap bulannya para kader PPKBD mengirimkan daftar calon akseptor baru dari masing-masing wilayah. untuk dapat dilayani di berbagai KKB yang ada. Pelayanan KB di Klaten Utara dengan mengoptimalkan faskes yang ada yaitu di Puskesmas Klaten Utara, PKBI, RSI, MJC/Intan Pariwara, Griya Raharja, Mitra Medika, PMI, Permata Bunda, Polres. Disamping itu juga ada dukungan yang merupakan jejaring puskesmas yaitu di Klinik Poncowati dan bidan Ni'mah. Kemudian kita melakukan KIE/Konseling dengan cara mengunjungi pertemuan kader di tingkat desa/kelurahan yang terdiri dari 8 desa/kelurahan yaitu karanganom (tgl. 6), belangwetan (tgl. 26), gergunung (tgl.20), Jonggrangan (tgl. 6), Sekarsuli (tgl. 14), Jebugan (tgl. 18), Ketandan (tgl. 22), Bareng Lor (tgl. 15). Selanjutnya pada akhir bulan kita fokus pada laporan bulanan.	Pelaksanaan program KKB di kecamatan Kemalang melalui : Pembinaan PPKBD se kecamatan Kemalang kita laksanakan pada minggu ke-3 setiap bulan, pembinaan di tingkat desa dilaksanakan melalui pertemuan kader PKK dan kader Posyandu di tiap-tiap desa, pelayanan KB secara rutin dilaksanakan pada hari selasa dan kamis sedangkan untuk pelayanan KB serentak kami laksanakan 3 kali dalam satu tahun. Sedangkan untuk laporan kami laksanakan pada minggu terakhir setiap bulan. Selain itu advokasi juga kami lakukan setiap ada kegiatan yang memerlukan advoksi.
2	Bagaimana pelaksanaan tugas Penyuluh KB ? apakah ada sasaran kinerja pegawai ?	Penyuluh KB di kecamatan Klaten Utara berjumlah 3 orang termasuk koordinator lapangan. Dari jumlah desa/kelurahan yang ada yaitu 8 desa maka kita bagi saya 2 desa kemudian ibu Nisa 3 desa dan ibu Leni 2 desa. Ya ada, dari SKP kita buat rencana kerja bulanan	Kami di kecamatan hanya berdua, saya dan ibu Supatmi. Saya merangkap sebagai koordinator. Untuk jumlah desanya ada 13 desa. Yang 6 desa yaitu kepurun, kemalang, dompol, bawukan, kendalsari, dan tangkil adalah wilayah binaan saya. Sisanya wilayah binaan ibu supadmi sebanyak 7 desa yaitu Tegalmulyo, Tlogowatu, Sidorejo, Balerante, Bumiharjo, Panggang dan Talun. Dalam pelaksanaan tugas kami sangat terbantu oleh para kader terutama PPKBD. Ya, setiap tahun harus membuat SKP karena untuk pedoman pelaksanaan tugas PLKB
3	Bagaimana Peran Kader IMP dalam Program KKB di Kecamatan ?	Setiap desa/kelurahan ada PPKBD sebagai koordinator kader yang ada di desa/kelurahan anggotanya terdiri dari kader PKBRW dan PKBRT serta kader-kader posyandu di wilayah setempat. Sebagai koordinator di desanya PPKBD melakukan tugas penyampaian informasi pembinaan juga melakukan koordinasi dan advokasi kepada kepala	Dengan personil kami yang hanya berjumlah 2 orang memang kami sangat membutuhkan para kader untuk mensukseskan program KB di kecamatan kemalang. Peran kader terutama PPKBD sangat membantu kami dalam menjalankan tugas-tugas kami terutama dalam mengajak calon peserta KB dan dalam pendataan keluarga

		desa/kelurahan dan TP PKK desa. Sebagai ketua Paguyuban PPKBD di kecamatan Klaten Utara adalah PPKBD kelurahan Gergunung. Dia mengkoordinir anggotanya yang berkaitan dengan program KB. Antara lain dalam koordinasi kader yang akan mengikuti pelatihan, bila ada pelayanan baik rutin maupun serentak. Pada tiap bulan saat pertemuan kader PPKBD, dia melaporkan baik secara lisan maupun tertulis.	
4	Bagaimana Pelaksanaan 6 Pokok Peran IMP	Semua PPKBD di kecamatan Klaten Utara sudah memiliki SK dari Kepala Desa/Kelurahan, semua berbentuk perseorangan jadi tidak ada pembagian tugas, sedangkan PKBRW dan PKBRT belum ada yang memiliki SK. Untuk Kepengurusan, sebagian besar belum ada. Untuk pertemuan dilakukan secara rutin setiap bulan. KIE dilaksanakan melalui tatap muka, pertemuan, dan kunjungan rumah. Ada buku bantu PUS. Pendataan dilakukan oleh kader pendata. Penyuluh KB sebagai koordinator. Melakukan KB ulang untuk pil dan kondom. KIE yang disampaikan adalah mengenai kesehatan reproduksi, Pendewasaan Usia Perkawinan serta UPPKS, sedangkan untuk kegiatan biasanya swadaya murni. Tidak tergantung pada bantuan.	Kader IMP belum memiliki SK dari kepala desa. Mereka dulu hanya ditunjuk untuk menjadi kader KB. Jadi belum ada susunan pengurus dan pembagian tugas. Sebagian PPKBD sudah melakukan pertemuan di tingkat desa dibarengkan dengan pertemuan PKK dan kader posyandu. Bila ada informasi yang berasal dari kecamatan disampaikan dalam forum pertemuan tersebut. Di samping itu PPKBD mendatangi pertemuan di tingkat RW dan RT. Biasanya dilaksanakan pada sore hari. Untuk KIE dan Konseling dilakukan oleh baik kader PPKBD, Sub PPKBD, maupun PKBRT. KIE baik kelompok maupun perorangan biasanya dilakukan pada saat posyandu (dalam KMS dituliskan KB nya apa?). sedangkan kunjungan rumah jarang dilakukan. Untuk pendataan keluarga dilaksanakan oleh PPKBD, kader PKK, kader Posyandu, PKB RW, dan PKB RT. Prosesnya dilakukan sosialisasi dulu di tingkat kecamatan kemudian ditindaklanjuti di tingkat desa. Setelah selesai maka dibuat peta namun hanya sebagian yang membuat itupun belum lengkap. Hasil pendataan dikumpulkan kepada PPKBD kemudian kepada Penyuluh KB. Disamping itu hasil pendataan juga dilaporkan dan disosialisasikan di tingkat desa. Dalam hal pelayanan KB. pelayanan rujukan untuk kecamatan Kemalang hanya dilakukan pada calon akseptor KB MOP dan MOW, sedangkan untuk KB Implan dan IUD cukup dilaksanakan di KKB Puskesmas Kemalang dan KKB Sejahtera Tlogowatu. Sedangkan dalam kemandirian memang ada beberapa kelompok UPPKS namun masih terbatas pada usaha penjualan produk-produk usaha rumah tangga.
5	Bagaimana Pembinaan Kader IMP di kecamatan ?	Penbinaan dilakukan secara rutin setiap bulan bersamaan dengan pertemuan bulanan di tingkat kecamatan. Di samping kegiatan posdaya dimana ada simpan pinjam, tabungan, sosial. Pembinaan juga dilakukan dengan memanfaatkan pertemuan kader di tingkat desa/kelurahan dan kelompok kegiatan. Di samping itu untuk kegiatan pembinaan dan pelatihan di tingkat kabupaten, eks. Karesidenan, dan provinsi kami selalu mengirimkan.	Pembinaan kami laksanakan secara rutin setiap bulan melalui pertemuan PPKBD di kecamatan. Saya lakukan advokasi baik dengan pak camat dan para kepala desa agar kader memperoleh pemihakan dari desa. Namun baru sebatas PPKBD.
6	Apa maksud dan tujuan dari pembinaan Kader IMP ?	Supaya kader lebih aktif, mempunyai rasa tanggungjawab terhadap tugas yang diembannya, dpat membantu pemerintah desa/kelurahan	Agar kader lebih bersemangat. Dengan harapan supaya kader dapat melaksanakan tugasnya. Tapi memang Penyuluh KB juga harus

		dalam program KB maupun bidang yang lain misalnya dalam kegiatan TP PKK, karena kader IMP ini banyak yang merangkap sebagai kader yang lain misalnya kader jumentik kader TB. Dengan pembinaan diharapkan PPM baik PA maupun PB dapat tercapai.	mendampingi.
7	Siapa saja yang bertugas untuk melakukan Pembinaan Kader IMP ?	Penyuluh KB dan DissosP3AKB	Koordinator Penyuluh KB dan Penyuluh KB
8	Apakah sudah ada sosialisasi bagi para pelaksana pembinaan Kader IMP ?	Sudah dilaksanakan namun kebanyakan kepada kader PPKBD. Dari PPKBD kemudian diteruskan ke tingkat yang lebih bawah. Jadi PPKBD dalam hal ini sebenarnya ikut melakukan pembinaan pada kader di bawahnya.	Sudah
9	Menurut saudara, apakah para pelaksana pembinaan Kader IMP memahami sosialisasi dan sudah melaksanakannya ?	Ya, sudah. Termasuk PPKBD yang juga diberikan sosialisasi juga memahami.	Ya, sudah
10	Apakah sudah ada dan bagaimana upaya advokasi dan kemitraan untuk kelancaran pembinaan Kader IMP ?	Upaya sudah kami laksanakan melalui camat, kepala desa/kelurahan, serta dengan TP PKK baik kecamatan maupun desa. Termasuk untuk honor SKD supaya ada pemihakan dari desa. Meskipun sudah mendapat honor semua namun setiap desa/kelurahan jumlahnya berbeda.	Sudah ada, melalui camat dan kepala desa
11	Menurut saudara apakah jumlah sumberdaya manusia sudah cukup memadai untuk pembinaan kader IMP ?	Jumlah Penyuluh KB masih kurang, kalau untuk kader IMP sudah memadai	Jumlah SDM nya kurang, disamping tugasnya banyak luas wilayahnya ada 13 desa dan hanya diampu oleh 2 orang penyuluh KB. Untuk kader sudah memadai yang jelas ada PPKBD di tiap desa yang cukup aktif. Karena PPKBD juga ikut membina para kader PKB RW maupun PKB RT
12	Menurut Saudara Bagaimana kemampuan sumberdaya manusia tingkat kecamatan dalam pembinaan kader IMP ?	Sudah cukup bagus. Untuk tingkat desa/kelurahan secara umum kemampuannya cukup bagus dan merata.	Sebagian besar memang cukup baik. Namun ada beberapa desa yang masih kurang
13	Apakah ada pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pelaksana pembinaan Kader IMP ?	Penyuluh PLKB ada pelatihan, namun masih sangat terbatas dan minim. PPKBD juga sama	Pelatihan rata-rata dilakukan 1 tahun sekali
14	Apakah ada dan bagaimana pembinaan dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas Kader IMP ?	Ada, namun sangat jarang mendapat pelatihan	Ada pembinaan dari DissosP3AKB sebanyak 2 kali dalam satu tahun
15	Bagaimana fasilitas-fasilitas berupa sarana-prasarana untuk mendukung ?	Sarana KIE belum Memadai BKB Kit hanya terbatas	Ada, namun masih sangat kurang

		Alat transportasi sepeda Buku agenda Blangko laporan cukup	
16	Bagaimana dukungan berupa alokasi anggaran dari pemerintah untuk pembinaan Kader IMP ?	Masih sangat kurang, anggaran berupa dukungan pembinaan dan transportasi	Alokasi anggaran hanya sedikit untuk pembinaan dan transportasi kader
17	Bagaimana respon dan komitmen para pelaksana tingkat kecamatan dan desa dalam pembinaan Kader IMP ?	Bagus. sebagai contoh pada saat pengiriman MOW, baik Penyuluh KB maupun kader tidak usah menunggu perintah sudah tahu apa yang harus dilakukan, baik pra maupun pasca pelayanan.	Respon dan komitmennya Bagus. Baik Penyuluh KB maupun Kader.
18	Bagaimana tanggapan dan dukungan dari para pengambil kebijakan?	Dari disosP3AKB cukup baik contoh saat kita dan kader melakukan rujukan akseptor selalu difasilitasi dengan baik	Cukup baik.
19	Menurut saudara bagaimana dukungan dari pemerintah desa dalam pelaksanaan pembinaan Kader IMP ?	Secara umum bagus, namun untuk honor PPKBD masih beragam, ada desa/kelurahan yang memberikan pemihakan yang cukup namun ada yang masih kurang	Cukup bagus namun perlu ditingkatkan alokasi anggaran untuk program KB
20	Bagaimana menurut Saudara dengan struktur OPD sekarang ini kaitannya pembinaan Kader IMP ?	Struktur OPD menurut saya tidak masalah, namun yang jelas kurang personil	Struktur OPD sejarang terlalu memberatkan Penyuluh KB, karena dengan jumlah personil yang sedikit Penyuluh KB harus menjalankan tugasnya sesuai SKP, namun harus mengerjakan tugas administrasi berupa laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran
21	Bagaimana standar operasional prosedur dalam rangka pembinaan Kader IMP ?	Secara garis besar melalui : Pertemuan kader, Pembinaan dan Pelatihan , Pengiriman kader	Pembinaan di tingkat kecamatan dan desa
22	Faktor pendukung apa sajakah yang ada dalam pelaksanaan pembinaan Kader IMP di kecamatan ?	Baik Penyuluh KB maupun Kader bersemangat. Adanya perhatian dari DissosP3AKB Adanya perhatian dari pemerintah desa/kelurahan Kerjasama kemitraan yang baik Komunikasi lancar Jumlah kader yang banyak.	Kader mempunyai semangat yang tinggi Ada honor PPKBD dari pemerintah desa
23	Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka pembinaan Kader IMP?	Jumlah Penyuluh KB kurang Jumlah kader Poktan yang Kurang Data program kurang lengkap Fasilitas berupa buku pedoman, KIE Kit sangat terbatas Alokasi anggaran pelatihan dan pembinaan yang kurang Honor PPKBD yang belum merata	Rata-rata tingkat pendidikan Kader IMP yang masih rendah Dukungan dari pemerintah desa yang tidak merata dan tidak ada keseragaman Buku pedoman penyuluhan yang kurang Pada umumnya pembinaan tidak sampai ke tingkat RW dan RT karena jumlah Penyuluh KB yang kurang Kegiatan BKB kekurangan kader, demikian juga APE nya
24	Bagaimana upaya yang dilakukan oleh (Koordinator dan Penyuluh KB) dalam mengatasi	Pertemuan Pembinaan kita integrasikan dengan pertemuan kader TP PKK, Posyandu	Adanya Pendampingan terhadap kader terutama PPKBD yang kemampuannya masih kurang

	kendala-kendala tersebut ?	Mengoptimalkan pertemuan PPKBD dengan Kader IMP lainnya di lapangan Kerjasama dengan bidan desa Kerjasama dengan faskes swasta	Advokasi kepada pemerintahan desa melalui forum paguyuban kepala desa Jalinan kerjasama dengan TP PKK kecamatan maupun TP PKK desa agar ada integrasi dalam pembinaan Advokasi alokasi anggaran APBDesa untuk pengadaan APE Usulan penambahan Penyuluh KB
--	----------------------------	--	--



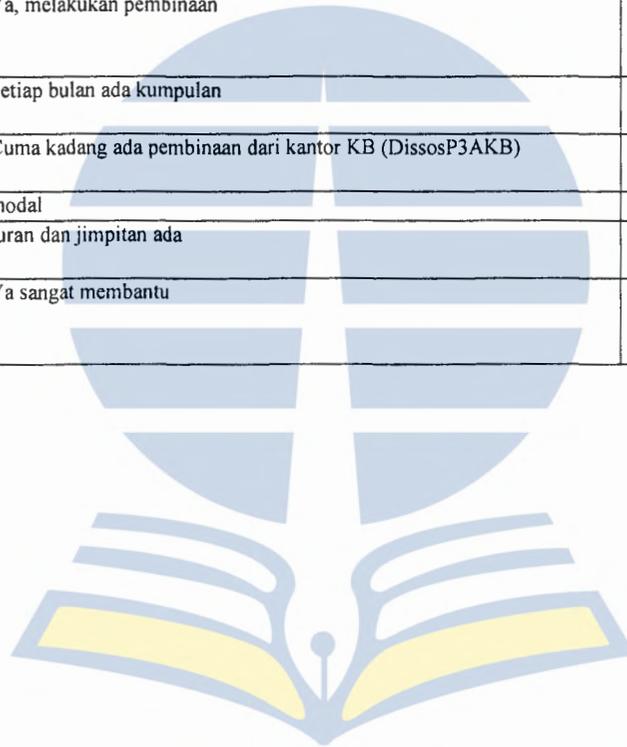
Informan		Koordinator dan Penyuluh KB	
Identitas			
a	Nama	Nisa Nursita, SE.	Supatmi
b	Umur	37 Tahun	57 Tahun
c	Alamat	Perum Griya Husada Permai Blok F No. 8, Trunuh, Klaten Selatan	Cangkring RT 23 RW 11, Gumul, Karangnongko
d	Pendidikan	S 1	SLTA
e	Jabatan	Penyuluh KB Kecamatan Klaten Utara	Penyuluh KB Kecamatan Kemalang
f	Pelaksanaan	Rabu, 3 Mei 2017	Senin, 8 Mei 2017
Pertanyaan		Jawaban	
1	Menurut saudara bagaimana pelaksanaan Program KKB di kecamatan ?	Secara umum pelaksanaan program KKB berjalan lancar, setiap bualnya diadakan pertemuan PPKBD beserta bidan desa. Untuk pelayanan KB saya melakukan KIE melalui Posyandu, serta pertemuan kader. Disamping KIE juga disampaikan informasi yang berhubungan dengan Program KB.	Setiap bulan dilakukan pertemuan PPKBD di kecamatan. Dan saya melakukan KIE biasanya melalui pertemuan kader di desa serta kegiatan posyandu. Untuk pelayanan KB dilaksanakan setiap hari selasa dan kamis serta dilakukan safari.
2	Bagaimana pelaksanaan tugas Penyuluh KB ? apakah ada sasaran kinerja pegawai ?	Secara umum berjalan dengan lancar. Karena saya bertugas di tiga desa. Ya, SKP saya pakai sebagai pedoman untuk pelaksanaan tugas-tugas saya	Ya. karena jumlah wilayah binaan saya banyak, kita harus dapat membagi waktu untuk dapat melakukan binaan ke desa. Saya minta tolong kepada PPKBD apabila ada informasi yang perlu saya sampaikan. Ya, ada.
3	Bagaimana Peran Kader IMP dalam Program KKB di Kecamatan ?	Untuk wilayah binaan saya cukup bagus, namun peran yang menonjol hanya PPKBD	PPKBD sangat membantu dalam tugas-tugas saya karena informasi tentang program biasanya saya teruskan kepada kader PPKBD di desa binaan saya.
4	Bagaimana Pelaksanaan 6 Pokok Peran IMP	Untuk wilayah binaan saya belum diberi SK dari Desa/Kelurahan. Seluruhnya berbentuk perorangan. Pertemuan rutin dilakukan setiap bulan. KIE dan Konseling dilakukan pada saat posyandu dan pertemuan kader. seringkali ada kunjungan rumah kepada akseptor baik pra maupun pasca pelayanan. Untuk data basis pasangan usia subur diperoleh dari pendataan keluarga. Namun saat ini hasil pendataan keluarga dikumpulkan di tingkat kecamatan. Sehingga kader tidak memegang data sasaran program KB. Pendataan dilakukan oleh para kader. semua kader dari tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan RT terlibat. Untuk pelayanan KB Pil dan Kondom memang PPKBD ada yang melakukan. Untuk KB Pil biasanya dikonsultasikan dengan bidan desa setempat. Sedangkan untuk KB Kondom bisa diberikan secara langsung. Dalam pelayanan rujukan yang melakukan adalah PPKBD. Penyuluhan hanya dilakukan oleh PPKBD sedangkan PKB RW dan PKB RT belum melakukan penyuluhan. Dalam pembinaan Poktan Bina Keluarga baik PPKBD maupun PKB RW dan PKB RT semuanya terlibat dalam pembinaan. Dalam pertemuan kader biasanya dilakukan	Ada yang sudah memiliki SK dari kepala desa, ada yang belum. Untuk PKB RW, dan PKB RT belum ada yang memiliki SK. Kalau untuk kepengurusan biasanya berbentuk tunggal. Untuk pertemuan dilakukan melalui pertemuan kader yang ada di desa. Biasanya dilakukan satu bulan sekali. KIE dilakukan dengan memanfaatkan kegiatan posyandu serta kunjungan rumah. Pendataan Keluarga dilakukan oleh PPKBD, PKB RW, PKB RT, dan tokoh masyarakat. Didahului dengan sosialisasi di tingkat kecamatan kemudian tingkat desa dan langsung berjalan. Hasil pendataan keluarga ditindaklanjuti dengan pembuatan peta keluarga, sosialisasi dalam pertemuan TP PKK tingkat desa. Hasil Pendataan Keluarga dilaporkan oleh PPKBD kepada Penyuluh KB dan Kepala Desa. Dan arsipnya disimpan oleh PPKBD. Yang mengantar calon akseptor KB adalah PPKBD begitu juga bila ada yang perlu dirujuk. Dalam upaya kemandirian, dalam kelompok-kelompok pertemuan yang ada, memang ada iuran dan jimpitan namun belum memberikan dukungan bagi program KB. Ada upaya ekonomi produktif namun sifatnya perorangan dan hanya produksi dan

		iuran dan jimpitan.	pemasaran produk lokal. Tapi yang cukup menonjol adanya industri kerajinan batik tulis.
5	Bagaimana Pembinaan Kader IMP di kecamatan ?	Pembinaan dilakukan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan dan pengiriman-pengiriman kader, untuk kelurahan gergunung pernah ada pelatihan kader.	Pembinaan dilakukan baik di kecamatan maupun desa, juga saya lakukan advokasi kepada kepala desa agar ada honor bagi kader PPKBD. Pembinaan ke desa lewat PPKBD, PKB RW, PKB RT, serta pendekatan kepada ibu Kepala desa (Ketua TP PKK)
6	Apa maksud dan tujuan dari pembinaan Kader IMP ?	Tujuannya untuk : Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kader itu sendiri, kader dapat menyampaikan informasi kepada tingkat yang lebih bawah.	Agar kader lebih terampil serta kemampuannya meningkat Selain itu dengan pembinaan kader akan merasa lebih diperhatikan
7	Siapa saja yang bertugas untuk melakukan Pembinaan Kader IMP ?	Penyuluh KB dan dari DissosP3AKB	Penyuluh KB
8	Apakah sudah ada sosialisasi bagi para pelaksana pembinaan Kader IMP ?	Sudah, sudah ada pelatihan dari BKKBN Provinsi dan pembinaan dari DissosP3AKB	Setiap ada informasi baru dari program disampaikan di kecamatan dan diteruskan di desa
9	Menurut saudara, apakah para pelaksana pembinaan Kader IMP memahami sosialisasi dan sudah melaksanakannya ?	memahami	Ya, sosialisai dapat saya pahami
10	Apakah sudah ada dan bagaimana upaya advokasi dan kemitraan untuk kelancaran pembinaan Kader IMP ?	Advokasi sudah saya lakukan dengan kepala desa supaya menerbitkan SK supaya para PPKBD memperoleh honor. Sedangkan kemitraan saya lakukan dengan TP PKK dan badan desa dalam pembinaan kader	Advokasi saya lakukan dengan kepala desa, TP PKK, serta kerjasama dengan koramil
11	Menurut saudara apakah jumlah sumberdaya manusia sudah cukup memadai untuk pembinaan kader IMP ?	Penyuluh KB saya kira cukup untuk melakukan pembinaan kepada kader mengingat wilayah binaan saya hanya 3 desa/ kelurahan, tapi untuk pembinaan sampai PKB RW ke bawah juga belum cukup. Untuk jumlah kader kelompok kegiatan saja yang jumlah personelnnya kurang.	SDM manusia belum cukup
12	Menurut Saudara Bagaimana kemampuan sumberdaya manusia tingkat kecamatan dalam pembinaan kader IMP ?	Kemampuan SDM cukup bagus. Untuk tingkat desa dilaksanakan secara berjenjang	Untuk tingkat kecamatan sudah bagus. Sedangkan tingkat desa juga sama namun ada beberapa desa yang masih kurang
13	Apakah ada pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pelaksana pembinaan Kader IMP ?	Untuk pelatihan masih kurang, tapi untuk pembinaan sudah cukup	Pelatihan masih sangat kurang
14	Apakah ada dan bagaimana pembinaan dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas Kader IMP ?	Untuk kader masih kurang	Tidak ada

15	Bagaimana fasilitas-fasilitas berupa sarana-prasarana untuk mendukung ?	Untuk sarana pendukung saya kira sudah cukup	Fasilitas untuk Penyuluh KB cukup namun untuk kader yang berupa buku pedoman, KIE Kit dan ATK masih kurang.
16	Bagaimana dukungan berupa alokasi anggaran dari pemerintah untuk pembinaan Kader IMP ?	Alokasi anggaran untuk kegiatan pertemuan dan pembinaan namun masih kurang	Alokasi anggaran dari pemerintah masih minim. Dari desa juga sudah ada yang menganggarkan
17	Bagaimana respon dan komitmen para pelaksana tingkat kecamatan dan desa dalam pembinaan Kader IMP ?	Baik dan bersemangat	Baik
18	Bagaimana tanggapan dan dukungan dari para pengambil kebijakan?	Tanggapan dan Dukungan dari Dinas, kecamatan dan desa/kelurahan cukup baik	Secara umum tanggapan dan dukungan bagus
19	Menurut saudara bagaimana dukungan dari pemerintah desa dalam pelaksanaan pembinaan Kader IMP ?	Sudah relatif bagus, sudah ada honor PPKBD namun yang untuk PKB RW dan PKB RT belum ada. Selain itu pemihakan untuk kegiatan Program KB juga masih sedikit.	Dukungan cukup bagus.
20	Bagaimana menurut Saudara dengan struktur OPD sekarang ini kaitannya pembinaan Kader IMP ?	Saya kira sudah baik struktur OPD nya	Struktur OPD tidak masalah, namun perlu ditambah Jumlah Penyuluh KB
21	Bagaimana standar operasional prosedur dalam rangka pembinaan Kader IMP ?	Mengunjungi pertemuan kader, kunjungan rumah, fasilitasi kepada kader, serta pembinaan di tingkat kecamatan dan desa	Melalui rapat koordinasi desa
22	Faktor pendukung apa sajakah yang ada dalam pelaksanaan pembinaan Kader IMP di kecamatan ?	Jalinan kerjasama yang baik Komunikasi lancar Dukungan dari pemerintah desa	Kader responnya bagus Adanya kerjasama Kader bersemangat Komunikasi lancar
23	Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka pembinaan Kader IMP?	Kendala yang dihadapi : Susahnya melakukan KIE MKJP Operasional pembinaan masih kurang Jumlah SDM (Penyuluh KB) masih kurang	Kurangnya Penyuluh KB Sarana Prasarana kurang Dukungan anggaran masih kurang
24	Bagaimana upaya yang dilakukan oleh (Koordinator dan Penyuluh KB) dalam mengatasi kendala-kendala tersebut ?	Berusaha melakukan pendekatan terhadap pemerintahan desa serta pendampingan kader agar kader dapat menyampaikan ke tingkat yang lebih bawah.	Dengan melakukan advokasi, pembinaan, pendekatan, dan pendampingan.

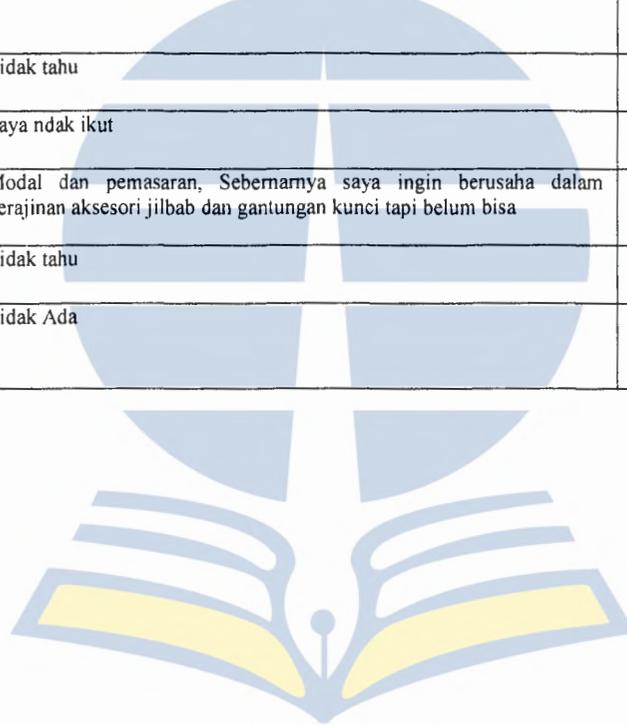
Informan		Warga Masyarakat	
		Identitas	
a	Nama	Sumiyati	Dwi Sriyani
b	Umur	38 Tahun	46 Tahun
c	Alamat	Gergunung RT 03 RW 09, Gergunung, Klaten Utara	Gergunung RT 03 RW 09, Gergunung, Klaten Utara
d	Pendidikan	SLTA	SLTA
e	Jabatan	Warga Masyarakat	Warga Masyarakat
f	Pelaksanaan	Jumat, 5 Mei 2017	Jumat, 5 Mei 2017
Pertanyaan		Jawaban	Jawaban
1	Bagaimana pembinaan/penyuluhan (KIE dan Konseling) perorangan yang dilakukan oleh Kader IMP ?	Diajak KB supaya jarak kelahiran tidak terlalu dekat	Diajak KB pas Posyandu
2	Bagaimana pembinaan/penyuluhan (KIE dan Konseling) kelompok dan massa yang dilakukan oleh Kader IMP ?	Ya di kumpulan	Di pertemuan dan di posyandu
3	Apakah saudara memahami apa yang disampaikan oleh kader dalam KIE dan Konseling ?	paham	Ya saya paham
4	Seberapa sering Kader IMP melakukan KIE dan Konseling ?	Tidak pasti, kadang pas arisan, setiap ada informasi baru	Kalau ada informasi baru, disampaikan
5	Bagaimana kerjasama yang dijalin dengan tokoh masyarakat setempat ?	bagus	bagus
6	Apa saja yang saudara harapkan dari kader IMP dalam KIE dan Konseling namun belum dapat terpenuhi ?	Tidak ada	Tidak ada
7	Bagaimana Kader IMP melakukan Pendataan Keluarga ?	Melakukan dengan kunjungan rumah	Dengan kunjungan dari rumah ke rumah
8	Bagaimana kader IMP melakukan pelayanan KB ulang Pil dan Kondom ?	Tidak tahu	Tidak tahu
9	Bagaimana Kader IMP melakukan rujukan pelayanan KB ?	Rujukan dilakukan oleh bu muryati	Yang merujuk bu Mur
10	Bagaimana kader IMP melakukan penyuluhan tentang ibu menyusui, ibu hamil, kesehatan reproduksi remaja, PUP, Penanggulangan HIV/AIDS, Penanggulangan NAPZA, PMS ?	Melalui pertemuan	Lewat pertemuan dan posyandu

11	Bagaimana kader IMP melakukan penyuluhan tentang Pengaturan Kelahiran (Alkon Rasional, Jumlah Anak, Jarak Kelahiran) ?	Melalui pertemuan	Pertemuan dan posyandu
12	Apakah terdapat kelompok Kegiatan BKB, BKR, dan BKL dan UPPKS ?	Ada BKB tanggal 6 bersamaan posyandu, BKL tanggal 18, UPPKS tanggal 15	Ya. ada
13	Bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh Kader IMP terhadap Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, dan BKL) ?	Ya, melakukan pembinaan	Kadang-kadang ada penyuluhan
14	Bagaimana berjalannya kelompok UPPKS di wilayah saudara ?	Setiap bulan ada kumpulan	Setiap tanggal 15 ada kumpulan, sore hari
15	Apakah kelompok UPPKS yang ada sudah menjalin kemitraan ? jelaskan ?	Cuma kadang ada pembinaan dari kantor KB (DissosP3AKB)	Dulu pernah ada dari PNPB, sekarang tidak tahu
16	Apa saja kendala yang dihadapi ?	modal	modal
17	Apakah ada upaya kemandirian ? (iuran, jimpitan, dan penjualan produk setempat)	Iuran dan jimpitan ada	Iuran dan jimpitan
18	Apakah upaya kemandirian tersebut sangat membantu dalam penyuluhan dan pelayanan program KKB ?	Ya sangat membantu	Sangat membantu



Informan		Warga Masyarakat	
Identitas			
a	Nama	Sumini	Susi Susanti
b	Umur	34 Tahun	22 Tahun
c	Alamat	Randuawar RT 13 RW 04, Kemalang, Kemalang	Randuawar RT 12 RW 04, Kemalang, Kemalang
d	Pendidikan	SLTA	SLTP
e	Jabatan	Warga Masyarakat	Warga Masyarakat
f	Pelaksanaan	Selasa, 9 Mei 2017	Selasa, 9 Mei 2017
Pertanyaan		Jawaban	Jawaban
1	Bagaimana pembinaan/penyuluhan (KIE dan Konseling) perorangan yang dilakukan oleh Kader IMP ?	Saya didatangi bu Sunarni, setelah melahirkan, memberikan penyuluhan tentang asi eksklusif 0-6 bulan, MP Asi setelah 6 bulan, disuruh ikut KB	Dikunjungi ibu sunarni diberitahu cara memberikan makanan sehat dan vitamin untuk anak, disuruh KB, saya sekarang KB suntik karena susuk saya ndak berani
2	Bagaimana pembinaan/penyuluhan (KIE dan Konseling) kelompok dan massa yang dilakukan oleh Kader IMP ?	Penyuluhannya pas pertemuan posyandu, bu narni dan bu bidan	Di posyandu, bu narni dan bu bidan
3	Apakah saudara memahami apa yang disampaikan oleh kader dalam KIE dan Konseling ?	Paham, kalau ndak paham tanya	paham
4	Seberapa sering Kader IMP melakukan KIE dan Konseling ?	Ya kadang-kadang ada penyuluhan	Setiap ada informasi safari diumumkan, saya ndak tahu persis, kadang saya sendiri yang lupa untuk ikut
5	Bagaimana kerjasama yang dijalin dengan tokoh masyarakat setempat ?	Bagus kerjasamanya	bagus
6	Apa saja yang saudara harapkan dari kader IMP dalam KIE dan Konseling namun belum dapat terpenuhi ?	Penyuluhannya supaya lebih mendetail dan lebih jelas, misalnya memberikan makanan lima bintang pada anak, komposisi makanan	Penyuluhannya supaya lebuah jelas, pakai alat peraga
7	Bagaimana Kader IMP melakukan Pendataan Keluarga ?	Dilakukan oleh pak tarto	Dilakukan oleh pak tarto
8	Bagaimana kader IMP melakukan pelayanan KB ulang Pil dan Kondom ?	Tidak pernah	Tidak pernah
9	Bagaimana Kader IMP melakukan rujukan pelayanan KB ?	Yang KB IUD, Implan, dan MOW diantar bu narni	Yang mengantar bu narni
10	Bagaimana kader IMP melakukan penyuluhan tentang ibu menyusui, ibu hamil, kesehatan reproduksi remaja, PUP, Penanggulangan HIV/AIDS, Penanggulangan NAPZA, PMS ?	PUP dan PMS belum, lewat posyandu	Sudah pernah

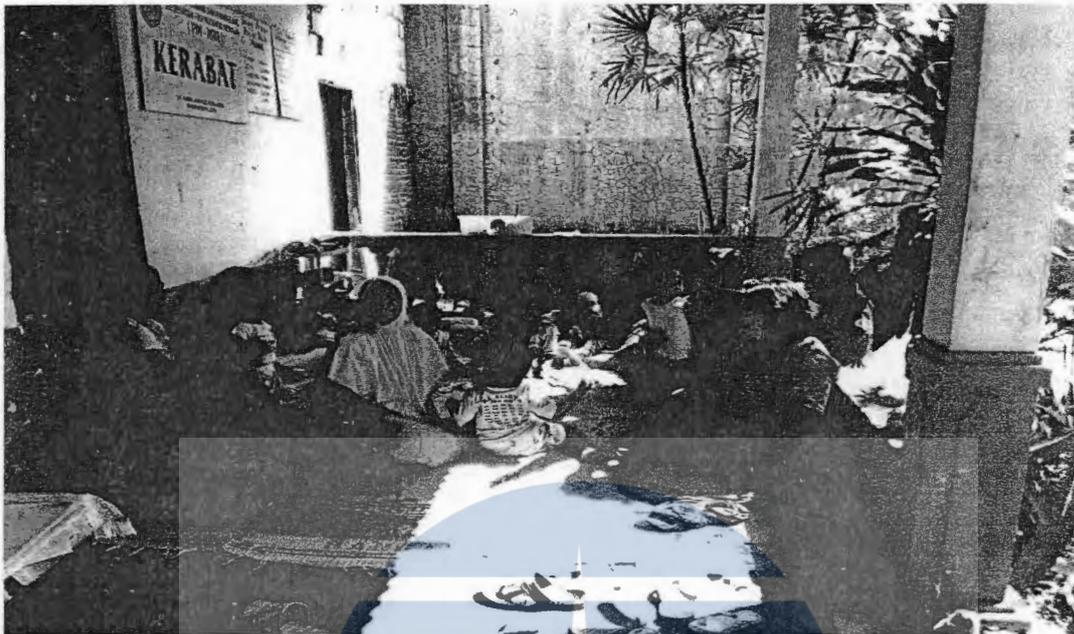
11	Bagaimana kader IMP melakukan penyuluhan tentang Pengaturan Kelahiran (Alkon Rasional, Jumlah Anak, Jarak Kelahiran) ?	Sudah pernah, yang menyampaikan bu nami dan bu bidan nana	Saya ndak tahu
12	Apakah terdapat kelompok Kegiatan BKB, BKR, dan BKL dan UPPKS ?	Ya ada, yang UPPKS ndak tahu	Ada
13	Bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh Kader IMP terhadap Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, dan BKL) ?	Setiap bulan berjalan, bu nami yang membina, yang lainnya membantu	Ada penyuluhan saat posyandu dan BKB
14	Bagaimana berjalannya kelompok UPPKS di wilayah saudara ?	Tidak tahu	Tidak tahu
15	Apakah kelompok UPPKS yang ada sudah menjalin kemitraan ? jelaskan ?	Saya ndak ikut	Tidak tahu
16	Apa saja kendala yang dihadapi ?	Modal dan pemasaran, Sebetulnya saya ingin berusaha dalam kerajinan aksesoris jilbab dan gantungan kunci tapi belum bisa	Masalah modal sebenarnya saya ingin dagang makanan
17	Apakah ada upaya kemandirian ? (iuran, jimpitan, dan penjualan produk setempat)	Tidak tahu	Dulu ada iuran, tapi sekarang sudah tidak
18	Apakah upaya kemandirian tersebut sangat membantu dalam penyuluhan dan pelayanan program KKB ?	Tidak Ada	Tidak ada



Lampiran 3. Hasil Pengamatan

1	Hari / Tanggal	Selasa, 9 Mei 2017
	Jam	10.00 – 11.30
	Tempat	Rumah Ibu Sunarni Dk. Balemuda RT 14 RW 04, Kemalang, Kemalang
	Kegiatan	Pembinaan Poktan BKB Mawar Dk. Balemuda, Kemalang, Kemalang
	Peserta	PPKBD Sub PPKBD RW 04 Kelompok KB RT 14 Ibu Balita
Uraian Kegiatan		
<p>Kegiatan BKB dilaksanakan setelah kegiatan Posyandu, sebagai kader pembina dalam kegiatan ini terdiri dari 3 orang yaitu ibu Sunarni (PPKBD merangkap Ketua BKB Mawar), ibu Itawati (Sub PPKBD), dan ibu Suratmi (Kelompok KB). Media yang digunakan seperangkat APE dan Buku Pedoman BKB .</p> <p>Sebelum kegiatan berlangsung, ibu Sunarni menyiapkan materi untuk memberikan penyuluhan terhadap ibu balita peserta BKB</p> <p>Jalannya kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acara dibuka dengan berdoa bersama-sama sesuai dengan agama keyakinan masing-masing - Penyuluhan oleh ibu Sunarni (PPKBD) dengan tema Ibu Menyusui <p>Kader PPKBD, Sub PPKBD, dan Kelompok KB melakukan bimbingan dan pendampingan terhadap peserta BKB yang sedang mendampingi anaknya bermain dengan menggunakan APE</p> <p>Dengan jumlah kader yang hanya 3 orang mendampingi sebanyak 35 peserta BKB, terlihat kegiatan tidak dapat berjalan dengan optimal karena sejak dimulainya kegiatan sampai dengan selesai ibu peserta berkumpul menjadi 1 kelompok umur. Apabila jumlah kader lebih banyak maka ibu peserta BKB dan anak balitanya dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok umur sehingga ibu balita dapat memperoleh bimbingan berupa pengetahuan dan ketrampilan dalam mengasuh anaknya sesuai dengan tingkat kelompok umur.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acara ditutup dengan berdoa bersama-sama 		

Foto Kegiatan Pembinaan Poktan BKB Mawar Dk. Balemuda, Kemalang,
Kemalang



2	Hari / Tanggal	Senin, 15 Mei 2017
	Jam	10.00 – 11.30
	Tempat	Aula Balai Desa Kemalang Kecamatan Kemalang
	Kegiatan	Pertemuan Kader Posyandu Desa Kemalang Kecamatan Kemalang
	Peserta	Kepala Desa Ketua TP PKK Desa Bidan Desa Penyuluh KB PPKBD Kelompok KB Kader Posyandu
Uraian Kegiatan		
<ul style="list-style-type: none"> - Susunan acara adalah sebagai berikut : Pembukaan, Sambutan, Materi, Lain-lain, Penutupan. - Pembukaan, acara dibuka dengan berdoa bersama-sama - Sambutan oleh Bp. Sukarno (Kaur Umum /mewakili Kepala Desa Kemalang) Ucapan syukur dan selamat datang selanjutnya disampaikan pentingnya program KB dan Kesehatan, supaya kader KB terus aktif mengingatkan kepada warga masyarakat untuk ikut KB. Dengan ikut KB akan sangat menunjang bagi upaya peningkatan kesehatan keluarga karena kesehatan merupakan hal utama dalam kehidupan keluarga. Dalam menjalankan tugasnya kader diharapkan dapat berjuang secara tulus dan ikhlas. - Isian I disampaikan oleh Bp. M. Yuniarso (Penyuluh KB mewakili Ibu Suryatmi yang berhalangan hadir). Materi yang disampaikan adalah Peran Kader IMP serta menyampaikan maksud dan tujuan penelitian tentang kader IMP. - Isian II disampaikan oleh Ibu Nana (Bidan Desa Kemalang). Menyampaikan tentang rencana Pendataan Keluarga Sehat. Tujuan untuk mengetahui derajat kesehatan di suatu wilayah, indikator yang akan diteliti antara lain: air bersih, jamban, PHBS, dan KB. Minta tolong kepada ibu-ibu kader untuk menyampaikan informasi kepada warga masyarakat di sekitarnya agar mengumpulkan Fotokopi Kartu KK dan Jamkesmas/BPJS/KIS, selanjutnya agar menyiapkan peta wilayah RW dan RT. Sebagai responden adalah hanya kepala keluarga bukan semua anggota keluarga namun Kartu Jamkesmas/BPJS/KIS dari seluruh anggota keluarga di fotokopi . - Isian III oleh Ibu Sunarni (PPKBD Desa Kemalang) Berpesan agar para kader ikut melakukan KIE dan Penyuluhan kepada masyarakat melalui pertemuan di tingkat RW maupun RT sehingga 		

masyarakat yang ingin ikut KB dapat terlayani

- Lain-lain : Bp Sukarno menyampaikan dalam kegiatan Pendataan Keluarga Sehat ini agar kader berkoordinasi dan bekerjasama dengan Ketua RW dan RT.
- Penutupan. Acara ditutup dengan berdoa bersama-sama

Foto Kegiatan Pertemuan Kader Posyandu Desa Kemalang Kecamatan Kemalang



3	Hari / Tanggal	Senin, 16 Mei 2017
	Jam	15.30 – 17.00
	Tempat	Rumah Ibu Muryati Dk. Gergunung RT 03 RW 09, Gergunung, Klaten Utara
	Kegiatan	Pembinaan Poktan UPPKS Nusa Indah 7 Dk. Gergunung, Gergunung, Klaten Utara
	Peserta	PPKBD Sub PPKBD Kelompok KB Pengurus dan Anggota Kelompok UPPKS
Uraian Kegiatan		
<ul style="list-style-type: none"> - Susunan acara : Pembukaan, Kultum, Pembinaan/Kegiatan, Lain-lain, Penutupan. - Pembukaan dengan berdoa bersama-sama - Kultum diisi oleh Ibu Muryati - Pembinaan/Kegiatan dipimpin oleh Ibu Endang Sri Mulyani (Ketua Kelompok UPPKS Nusa Indah 7) tentang Pemanfaatan limbah koran bekas. Koran bekas dapat dibuat tempat minuman, tas keranjang, sajian buah, dan lain-lain. Dilanjutkan dengan praktek pembuatan peralatan rumah tangga tersebut dimulai dari koran bekas menjadi barang jadi. - Penutupan : kegiatan ditutup dengan berdoa bersama-sama. <p>Dilanjutkan dengan wawancara dengan ibu Endang Sri Mulyani (ketua kelompok UPPKS Nusa Indah 7) selain ketrampilan dengan memanfaatkan limbah koran bekas, kelompok UPPKS ini juga dimanfaatkan untuk menambah ketrampilan dengan pelatihan berbagai produk makanan. Antara lain : sale pisang dan bakpia patuk.</p>		

Foto Kegiatan Pembinaan Poktan UPPKS Nusa Indah dk. Gergunung,
Gergunung, Klaten Utara



4	Hari / Tanggal	Selasa, 16 Mei 2017
	Jam	10.00 – 11.30
	Tempat	Rumah Ibu Muryati Dk. Gergunung RT 03 RW 09, Gergunung, Klaten Utara
	Kegiatan	Pembinaan Poktan BKL Ngudi Waras Dk. Gergunung, Gergunung, Klaten Utara
	Peserta	Bidan Desa PPKBD Sub PPKBD Kelompok KB Pengurus dan Anggota Kelompok BKL
Uraian Kegiatan		
<p>Sebelum acara dimulai kader IMP dan pengurus kelompok BKL mempersiapkan tempat dan sarana untuk kegiatan BKL.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggota BKL mulai datang untuk menerima pembinaan dan periksa kesehatan secara gratis dengan urutan: pendaftaran, timbang berat badan, periksa kesehatan (gula darah, asam urat, kolesterol, dan tekanan darah), pemeriksaan kesehatan umum. Dalam pemeriksaan kesehatan umum, anggota BKL ditanya mengenai kondisi kesehatannya dan atau anggota BKL menyampaikan keluhan yang dialami sehubungan dengan kondisi kesehatannya. - Untuk pemeriksaan gula darah, asam urat, dan tekanan darah sudah dapat dilakukan sendiri oleh para kader. Sedangkan untuk pemeriksaan kolesterol dan kesehatan umum dilakukan oleh tenaga medis yaitu ibu Cici (Bidan Desa Gergunung) - Setelah pemeriksaan kesehatan selesai maka anggota BKL berkumpul menerima KIE, Penyuluhan dan informasi dari Ibu Muryati (PPKBD Gergunung) serta ibu Warsini (Sub PPKBD RW 09 Kel. Gergunung merangkap Ketua BKL) Materi KIE/Penyuluhan tentang Kesehatan Lansia. - Berdasarkan wawancara dengan ibu Warsini bahwa pemeriksaan secara gratis dapat dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari jimpitan warga RW 09 Kelurahan Gergunung. Hasil jimpitan dipergunakan untuk membeli peralatan pemeriksaan kesehatan. Sampai dengan saat ini kelompok BKL Ngudi Waras sudah memiliki peralatan : <i>body fit</i>, timbangan, cek asam urat, cek gula darah, dan <i>tensimeter</i>. Sedangkan untuk cek kolesterol belum memiliki. 		

Foto Kegiatan Pembinaan Poktan BKL Ngudi Waras dk. Gergunung, Gergunung, Klaten Utara





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 294 Gedung Pemda II Lt. 2 Telp. (0272)321046 Psw 314-318 Faks 328730
KLATEN 57424

Nomor : 072/508/V/31
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Klaten, 4 Mei 2017
Kepada Yth
1. Ka. Dinas Sos, PP, PA dan KB Kab. Klaten
2. Camat Klaten Utara
3. Camat Kemalang
Di

KLATEN

Menunjuk Surat dari Ka. UT UPBJJ Semarang No. 10/UN.31.33/LL/2017 Tanggal 10 Februari 2017 Perihal Permohonan Ijin Penelitian, dengan hormat kami beritahukan bahwa di Instansi/Wilayah yang Saudara pimpin akan dilaksanakan Penelitian oleh :

Nama : Muhammad Yuniarso
Alamat : Jl. Raya Semarang-Kendal KM 14.5, Mangkang wetan, Semarang
Pekerjaan : Mahasiswa UT
Penanggungjawab : Drs. Jamaludin, MSi
Judul/Topik : Studi Tentang Peran Kader Institusi Masyarakat Perdesaan (IMP) Dalam Program Kependudukan Keluarga Berencana (KKB) di Kabupaten Klaten
Jangka Waktu : 3 Bln (4 Mei s/d. 4 Agustus 2017)
Catatan : Menyerahkan Hasil Penelitian berupa *Hard Copy* dan *Soft Copy* Ke Bidang PPPE BAPPEDA Kabupaten Klaten.

Demikian atas kerjasama yang baik selama ini kami ucapkan terima kasih

An. BUPATI KLATEN
Kepala BAPPEDA
Ub. Kepala Bidang PPPE



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ka. Kantor Kesbangpol Kab. Klaten
2. Ka. UT UPBJJ Semarang
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip